

MENJAGA RESILIENSI, MELANJUTKAN MOMENTUM PERTUMBUHAN

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
NO. 43, SEPTEMBER 2024



Ombak besar yang mengelilingi kapal melambangkan dinamika eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan ekonomi. Ombak ini mencerminkan tantangan, risiko, dan dinamika yang dengan cepat berubah di tingkat global.

Kapal yang menerjang ombak tinggi menggambarkan usaha dan strategi yang diambil untuk menjaga resiliensi di tengah tantangan. Kapal yang kokoh dengan layar yang terbuka lebar melambangkan optimisme dan kekuatan dalam menghadapi tantangan, menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, resiliensi dapat dipertahankan.

Awan dan langit cerah di latar belakang memberikan kontras yang menenangkan dari ombak besar, melambangkan harapan dan visi yang positif meskipun di tengah berbagai tantangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa di balik tantangan, terdapat peluang untuk mencapai tujuan.







BANK INDONESIA



ISSN 2620-9241

DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Daftar Isi

Daftar Tabel	iv	Daftar Singkatan	x
Daftar Grafik	v	Prakata	xiv
Daftar Gambar	ix	Ringkasan Eksekutif	2

Bab 1 Perekonomian dan Sistem Keuangan Domestik Tetap Berdaya Tahan di Tengah Ketidakpastian Global 8

1.1	Perkembangan Ekonomi Keuangan Global Memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan Domestik	10
1.2	Sistem Keuangan Domestik Tetap Kuat dan Mendorong Intermediasi Perbankan	10
1.3	Persepsi Sumber-sumber Kerentanan dan Guncangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Semester I 2024	12
Boks 1.1	Prinsip Bauran Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia	14

Bab 2 Intermediasi Keuangan Didukung *Appetite* Perbankan dan Permintaan yang Masih Kuat 16

2.1	Sisi Penawaran Kredit Kuat untuk Mendukung Intermediasi Perbankan	18
2.2	Permintaan Kredit Tetap Terjaga di Tengah Pengaruh Tekanan Global	22
Boks 2.1	Kecenderungan Sisi Penggerak Pertumbuhan Kredit (Kredit lebih digerakkan oleh sisi permintaan)	25

Bab 3 Ketahanan Sistem Keuangan 28

3.1	Kemampuan Membayar Utang Korporasi Terjaga Di Tengah Ketidakpastian Global	30
3.2	Kemampuan Membayar Utang Rumah Tangga Terjaga Di Tengah Ketidakpastian Global	33
3.3	Ketahanan Perbankan dan IKNB yang Kuat Menopang Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global	35
Boks 3.1	Asesmen Financial Sector Assessment Program (FSAP) Indonesia 2023/2024	41
Boks 3.2	<i>Solvency Stress Test</i> Perbankan pada FSAP 2023/2024	43
Boks 3.3	Penguatan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber di Sektor Keuangan sesuai dengan PBI No. 2/2024 (PBI KKS)	45

Bab 4 Keuangan Inklusif dan Hijau Turut Mendukung Ketahanan

48

4.1 Pembiayaan UMKM Tumbuh Positif di Tengah Perlambatan Kinerja UMKM, Kenaikan Risiko, dan Penurunan *Lending Appetite* Kredit UMKM **50**

Boks 4.1 Pembiayaan Syariah Tumbuh Tinggi dengan Risiko Terjaga **54**

4.2 Pembiayaan Hijau Masih Prospektif Mendukung Intermediasi Perbankan **57**

Boks 4.2 Peran Kalkulator Hijau dalam Mendukung *Green Initiatives* **59**

Bab 5 Respons Kebijakan Makroprudensial dalam Menjaga Resiliensi

62

5.1 Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Dilanjutkan untuk Mendorong Intermediasi dan Ketahanan Sistem Keuangan **64**

5.2 Sinergi Kebijakan Terus Dipererat **68**

Boks 5.1 Penguatan KLM pada Semester I Tahun 2024 **69**

Bab 6 Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

72

6.1 Prospek Ekonomi dan Keuangan Domestik Tetap Kuat **74**

6.2 Optimisme Intermediasi Terjaga Didukung Kinerja Korporasi, *Appetite* Perbankan, dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial **75**

6.3 Arah Kebijakan Makroprudensial Tetap Akomodatif Untuk Mendorong Pembiayaan Perekonomian **76**

Boks 6.1 Implementasi Kebijakan Makroprudensial Kontrasiklikal RPLN Memperkuat Pengelolaan Sumber Pembiayaan Perbankan **78**

Kumpulan Grafik dan Tabel

80

Daftar Tabel

Bab 2 Intermediasi Keuangan Didukung *Appetite* Perbankan dan Permintaan yang Masih Kuat

Tabel 2.1.1	Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi dan Jenis Penggunaan	18
Tabel 2.1.2	Pertumbuhan Pembiayaan oleh IKNB	22
Tabel 2.2.1	Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. menurut Sektor	22

Bab 3 Ketahanan Sistem Keuangan

Tabel 3.1.1	Kualitas Kredit Korporasi Tanpa Ekspor/Ekspor Rendah dan Impor Rendah Berdasarkan <i>Size</i> Kredit	31
Tabel 3.3.1	Perkembangan NPL per Sektor Ekonomi	36
Tabel 3.3.2	NPL dan LaR per Kelompok Bank	37

Bab 4 Keuangan Inklusif dan Hijau Turut Mendukung Ketahanan

Tabel 4.1.1	Tabel Kredit UMKM per 9 Sektor Ekonomi	50
Tabel B4.1.1	Pertumbuhan Pembiayaan UMKM dan NPF per Sektor Ekonomi	55

Daftar Grafik

Bab 1

Kondisi Makrofinansial Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Grafik 1.2.1	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	11
---------------------	-----------------------------------	-----------

Bab 2

Intermediasi Keuangan Didukung *Appetite* Perbankan dan Permintaan yang Masih Kuat

Grafik 2.1.1	Tren Jangka Panjang Pertumbuhan Kredit	19
Grafik 2.1.2	Sensitivitas Suku Bunga DPK (a) dan Suku Bunga Kredit (b) terhadap Peningkatan Suku Bunga Kebijakan	19
Grafik 2.1.3	Perkembangan Rasio Alat Likuid dan <i>Lending Capacity</i> Perbankan	20
Grafik 2.1.4	Perbandingan Kredit dan SRBI terhadap Total Aset Bank	20
Grafik 2.1.5	Indeks <i>Lending Requirement</i> per KBMI	20
Grafik 2.1.6	Dinamika Sensitivitas Kredit terhadap PDB (<i>Rolling Elasticity</i>)	21
Grafik 2.1.7	<i>Threshold</i> Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Kredit	21
Grafik 2.2.1	Perbandingan Rasio Investasi dan Rasio Kredit terhadap PDB	23
Grafik 2.2.2	Rasio Penggunaan Faktor Produksi per Sektor	23
Grafik 2.2.3	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Sektor	23
Grafik 2.2.4	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen	23

Grafik 2.2.5	Pertumbuhan KK Rumah Tangga menurut Jenis Kredit	24
Grafik 2.2.6	Pertumbuhan KPR Rumah Tangga Berdasarkan Andil Kelompok Pendapatan	24
Grafik B2.1.1	Analisis <i>Disequilibrium</i> Penawaran dan Permintaan Kredit	25
Grafik B2.1.2	Ekses Permintaan Kredit	26

Bab 3

Ketahanan Sistem Keuangan

Grafik 3.1.1	Penjualan dan Capex Korporasi Tahun 2010 s.d. 2024	30
Grafik 3.1.2	Kemampuan Bayar Korporasi Tahun 2010 s.d. 2024	30
Grafik 3.1.3	Dampak Pelemahan Nilai Tukar Terhadap Perubahan NPM	31
Grafik 3.1.4	Dampak Kenaikan Suku Bunga Terhadap Perubahan NPM	31
Grafik 3.1.5	Kinerja Sales dan Profitabilitas Korporasi Tanpa Ekspor atau Ekspor Rendah dan Impor Tinggi	31
Grafik 3.1.6	Identifikasi Subsektor yang Rentan Terdampak Pelemahan Nilai Tukar dan Kenaikan Suku Bunga	32
Grafik 3.1.7	Perkembangan ULN dan Suku Bunga pada Periode Tekanan	32
Grafik 3.2.1	Perkembangan DSR Rumah Tangga dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	33
Grafik 3.2.2	Determinan Harga Properti Residensial	33

Grafik 3.2.3	Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini	34
Grafik 3.2.4	Perkembangan Jumlah TK Formal dan Informal	34
Grafik 3.2.5	Perkembangan Upah TK Formal dan Informal	34
Grafik 3.2.6	Perkembangan Realisasi Bantuan Sosial	34
Grafik 3.2.7	DSR Rumah Tangga menurut Tingkat Pengeluaran	34
Grafik 3.2.8	Perkembangan LaR Kredit Rumah Tangga	35
Grafik 3.2.9	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	35
Grafik 3.3.1	Perkembangan NPL per Segmen	35
Grafik 3.3.2	Perkembangan NPL per Jenis Penggunaan	36
Grafik 3.3.3	Perkembangan Rasio CKPN terhadap NPL dan Total Kredit	36
Grafik 3.3.4	Kepemilikan SBN Pada Perbankan	37
Grafik 3.3.5	AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank	37
Grafik 3.3.6	Perkembangan LCR dan NSFR	38
Grafik 3.3.7	ROA, NIM dan BOPO Perbankan	38
Grafik 3.3.8	Perkembangan ULN Perbankan	38
Grafik 3.3.9	Perkembangan Suku Bunga Valas	39
Grafik 3.3.10	Perkembangan NPF dan GR PP	39
Grafik 3.3.11	Perkembangan TWP 90 Pembiayaan <i>Fintech Lending</i>	39
Grafik 3.3.12	Perkembangan TWP 90 Pembiayaan Perseorangan dan Badan Usaha <i>Fintech Lending</i>	40
Grafik 3.3.13	Perkembangan Jatuh Tempo ULN IKNB	40
Grafik B3.2.1	Skenario Makroekonomi pada <i>Solvency Stress Test</i> (SST)	43

Bab 4

Keuangan Inklusif dan Hijau Turut Mendukung Ketahanan

Grafik 4.1.1	Pertumbuhan Kredit UMKM per Segmen	50
Grafik 4.1.2	Indeks Kinerja UMKM	51
Grafik 4.1.3	Kebutuhan Kredit UMKM	51
Grafik 4.1.4	NPL Kredit UMKM per Segmen	51
Grafik 4.1.5	Pertumbuhan dan NPF Pembiayaan Syariah	51
Grafik 4.1.6	Indeks <i>Lending Requirement</i> UMKM	52
Grafik 4.1.7	Perkembangan Kredit UMKM dan KUR	52
Grafik 4.1.8	Perkembangan Penyaluran Kredit Ultra Mikro	53
Grafik 4.1.9	Pangsa Pembiayaan Ultra Mikro	53
Grafik B4.1.1	Pembiayaan Perbankan Syariah	54
Grafik B4.1.2	Pangsa Pembiayaan Ultra Mikro	54
Grafik B4.1.3	NPF Gross per Kelompok Bank	55
Grafik B4.1.4	Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS-DSKL	56
Grafik B4.1.5	Pangsa Penyaluran Dana ZIS-DSKL	56
Grafik 4.2.1	Perkembangan KKB Hijau Menurut Jenis KKB	57
Grafik 4.2.2	Pertumbuhan KPR Hijau Menurut Jenis KPR	57
Grafik 4.2.3	NPL KKB dan KPR Hijau	58
Grafik 4.2.4	Nominal Baki Debet KKB dan KPR Hijau	58

Bab 5
**Respons Kebijakan
Makroprudensial dalam
Menjaga Resiliensi**

Grafik 5.1.1	<i>Credit/GDP Gap</i>	66
Grafik 5.1.2	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	66
Grafik 5.1.3	Perkembangan Suku Bunga Kredit pada Sektor Prioritas KLM	67
Grafik 5.1.4	Pemetaan Kuadran Suku Bunga dan NPL Sektor Prioritas KLM	67
Grafik B5.1.1	Capaian Insentif KLM Berdasarkan KBMI	70

Bab 6
**Outlook Intermediasi dan Arah
Kebijakan Makroprudensial**

Grafik 6.3.1	Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia	76
-------------------------	--	-----------

Daftar Gambar

Bab 1

Kondisi Makrofinansial Tetap Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global

Gambar B1.1.1	Kerangka Bauran Kebijakan Makroprudensial	14
----------------------	---	-----------

Bab 3

Ketahanan Sistem Keuangan

Gambar B3.3.1	Kerangka Pengaturan PBI KKS	46
----------------------	-----------------------------	-----------

Bab 4

Keuangan Inklusif dan Hijau Turut Mendukung Ketahanan

Gambar B4.2.1	Kerangka Kerja Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Bank Sentral	60
----------------------	--	-----------

Bab 6

Outlook Intermediasi dan Arah Kebijakan Makroprudensial

Gambar B6.1.1	Asesmen Parameter Kontrasiklikal RPLN	79
----------------------	---------------------------------------	-----------

Daftar Singkatan

AES	<i>Advanced Countries</i>	FFR	<i>Fed Fund Rate</i>
AL	Alat Likuid	<i>fintech</i>	<i>financial technology</i>
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga	GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
AS	Amerika Serikat	GR	<i>Gearing Ratio</i>
ATMR	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	GWM	Giro Wajib Minimum
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia	IFRS	International Financial Reporting Standards
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia	IHK	Indeks Harga Konsumen
BPD	Bank Pembangunan Daerah	IKNB	Industri Keuangan Nonbank
bps	<i>basis points</i>	ILR	Indeks <i>Lending Requirement</i>
BUK	Bank Umum Konvensional	IMF	International Monetary Fund
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
BUS	Bank Umum Syariah	ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional	KBMI	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti
Capex	<i>capital expenditure</i>	KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
CASA	<i>Current Account/Giro dan Saving Account/Tabungan</i>	KI	Kredit Investasi
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	KK	Kredit Konsumsi
CET1	<i>Common Equity Tier 1</i>	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	KKS	Ketahanan dan Keamanan Siber
Covid-19	<i>Corona Virus Desease 2019</i>	KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
DaR	<i>Debt at Risk</i>	KMK	Kredit Modal Kerja
DAR	<i>Debt to Asset Ratio</i>	KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
DHE	Devisa Hasil Ekspor	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
DPK	Dana Pihak Ketiga	KUR	Kredit Usaha Rakyat
DSKL	Dana Sosial Keagamaan lainnya	LaR	<i>Loan at Risk</i>
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>	LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
EMDEs	<i>Emerging Market and Developing Economies</i>		
ESG	<i>Environmental, Social, Governance</i>		

LGA	Listrik, Gas, dan Air
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
Minerba	Mineral dan batu bara
mtm	<i>month to month</i>
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non-performing Financing</i>
NPL	<i>Non-performing Loan</i>
NPM	<i>Net Profit Margin</i>
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDN	Posisi Devisa Neto
Pemilu	Pemilihan Umum
PIP	Pusat Investasi Pemerintah
PK	Parameter Kontrasiklikal
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah
PLM	P e n y a n g g a L i k u i d i t a s Makroprudensial
PNM	PT Permodalan Nasional Madani
PP	Perusahaan Pembiayaan
PSN	Proyek Strategis Nasional
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
ROA	<i>Return on Asset</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPOJK	Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

RT	Rumah Tangga
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBN	Surat Berharga Negara
SDA	Sumber Daya Alam
SIKP	Sistem Informasi Kredit Program
SMF	PT Sarana Multigriya Finansial
SP	Sistem Pembayaran
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRO	<i>Self-Regulatory Organization</i>
SSB	Surat-Surat Berharga
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SST	<i>Solvency Stress Test</i>
SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
TK	Tenaga Kerja
TTIS-SK	Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendali Inflasi Pusat
TWP 90	Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU P2SK	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
yoy	<i>year on year</i>
ytd	<i>year to date</i>
ZIS	Zakat, Infak, Sedekah



BANK INDONESIA

Prakata



Perry Warjiyo
Gubernur Bank Indonesia

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 43, Edisi September 2024 dengan tema “Menjaga Resiliensi, Melanjutkan Momentum Pertumbuhan” ini dapat kami sampaikan sebagai bagian dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Kajian Stabilitas Keuangan merupakan kajian yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek sistem keuangan Indonesia berdasarkan hasil asesmen tiga pilar kebijakan makroprudensial, yaitu intermediasi, ketahanan, serta keuangan inklusif dan hijau.

Pertumbuhan ekonomi domestik sepanjang Semester I 2024 tetap kuat di tengah gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Ketegangan geopolitik yang belum mereda serta suku bunga

global yang masih tinggi, dibarengi dengan peningkatan tekanan nilai tukar menjadi tantangan utama selama paruh pertama 2024. Namun demikian, perekonomian domestik tetap menunjukkan kinerja yang baik dengan stabilitas Rupiah yang terjaga dan inflasi domestik yang masih dalam kisaran target.

Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia juga tetap terjaga. Intermediasi sistem keuangan menunjukkan kredit perbankan yang tumbuh kuat dengan tingkat risiko kredit terkendali, didukung ketahanan permodalan bank yang kuat dan likuiditas bank yang memadai. Sementara itu, intermediasi Industri Keuangan Nonbank (IKNB) juga menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari Perusahaan Pembiayaan (PP) maupun *fintech lending*. Peran sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi masih kuat dalam mendukung permintaan kredit dunia usaha serta rumah tangga.

Sepanjang Semester I 2024, Bank Indonesia secara konsisten menerapkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta program keuangan inklusif dan hijau. Resiliensi sistem keuangan juga terus diperkuat, antara lain melalui implementasi inovasi kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung intermediasi yang optimal. Kebijakan yang ditempuh meliputi penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan optimalisasi pinjaman luar negeri bank yang berbasis risiko melalui Kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). Penguatan KLM dalam hal ini mencakup perluasan dan peningkatan insentif KLM, penambahan sektor baru yang mendukung program Pemerintah atau memiliki daya ungkit

tinggi terhadap perekonomian, dan redistribusi alokasi KLM serta tambahan alokasi KLM bagi bank dengan kontribusi pertumbuhan kredit/pembiayaan yang tergolong tinggi. Sementara itu, kebijakan RPLN bertujuan memberikan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan pendanaan luar negeri jangka pendek bank yang berbasis risiko dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (*risk-based*), dengan turut mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi. Selain kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial lainnya, seperti *Loan to Value / Down Payment Ratio*, *Countercyclical Capital Buffer*, Posisi Devisa Neto, Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial, serta Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial dan kebijakan makroprudensial hijau.

Ke depan, prospek intermediasi perbankan diperkirakan tetap kuat didukung resiliensi sistem keuangan dan penurunan suku bunga global pada Semester II 2024. Dalam kerangka bauran

kebijakan Bank Indonesia 2024, arah kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

Kami berharap Kajian Stabilitas Keuangan No. 43 selain memberikan gambaran kondisi terkini dan prospek sistem keuangan, juga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambilan keputusan sehingga bersama-sama dapat menjaga resiliensi, melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta, September 2024



Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

MENJAGA RESILIENSI, MELANJUTKAN MOMENTUM PERTUMBUHAN



Stabilitas sistem keuangan (SSK) terjaga di tengah peningkatan tekanan eksternal seiring berlanjutnya ketidakpastian global.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan sebagai indikator ketahanan sistem keuangan berada pada zona Normal didukung ketahanan perbankan dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB), serta terjaganya kinerja korporasi dan Rumah Tangga (RT). Peningkatan tekanan eksternal berdampak terbatas pada sektor keuangan, sebagaimana tecermin pada akselerasi pertumbuhan intermediasi dan permodalan, baik pada industri perbankan maupun IKNB. Pada 2024, bauran kebijakan Bank Indonesia tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter, serta kebijakan makroprudensial akomodatif yang memberikan ruang bagi pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bauran kebijakan Bank Indonesia juga ditempuh melalui kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta keuangan inklusif dan hijau, dengan penguatan inovasi, sinergi, dan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah, otoritas terkait, dan mitra strategis lainnya.

Ketidakpastian pasar keuangan global dan persistensi suku bunga yang masih tinggi berdampak pada aliran modal asing ke negara berkembang dan berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan domestik. Proses penurunan inflasi di negara maju cenderung lebih lambat dengan perbaikan ekonomi yang diperkirakan tertahan. Ketegangan geopolitik yang belum mereda turut mendorong pergeseran

sumber pertumbuhan ekonomi global dan divergensi pertumbuhan antarnegara. Kondisi tingginya ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan aliran modal lebih selektif ke negara berkembang sehingga menambah tekanan nilai tukar. Persistensi suku bunga tinggi yang dibarengi dengan peningkatan tekanan nilai tukar berpotensi memengaruhi kerentanan dan risiko di sistem keuangan sebagaimana terindikasi pada *risk assessment matrix*. Namun, pertumbuhan ekonomi domestik yang masih kuat memberikan dampak positif terhadap kinerja sistem keuangan.

Momentum pertumbuhan ekonomi berlanjut di tengah inflasi yang terjaga dan nilai tukar yang terkendali sehingga mendukung akselerasi intermediasi perbankan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi, serta peningkatan kinerja ekspor. Inflasi terjaga rendah dalam koridor target, baik inflasi inti maupun inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*), dengan inflasi Komponen Bergejolak (*volatile food*) yang turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, nilai tukar terkendali dengan volatilitas yang terjaga. Optimisme kondisi makroekonomi turut mendukung kinerja intermediasi perbankan dan terjaganya risiko SSK. Akselerasi intermediasi perbankan didukung oleh risiko kredit yang terjaga rendah, di tengah upaya konsolidasi yang dilakukan bank menyusul penghentian relaksasi kebijakan restrukturisasi Covid-19 pada Maret 2024.

Intermediasi perbankan tumbuh tinggi didukung pertumbuhan DPK dan likuiditas yang memadai.

Hingga Juni 2024, kredit perbankan tumbuh mencapai 12,36% (yoy) terutama ditopang oleh kredit produktif, yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK), khususnya segmen Korporasi. Kredit Konsumsi (KK) juga tumbuh tinggi ditopang oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan multiguna, meskipun tidak setinggi KI dan KMK. Pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh KBMI, terutama di bank besar (KBMI 3 dan 4) yang pangsa kreditnya mencapai 80% dari total perbankan. Sementara itu, pertumbuhan kredit KBMI 1 dan 2 cenderung bervariasi sejalan dengan perbedaan model bisnis kelompok bank di dalamnya, yaitu BPD, KCBA, dan BUSN. *Risk appetite* bank, yang tercermin pada Indeks *Lending Requirement* (ILR), masih longgar di seluruh KBMI. Dampak kenaikan suku bunga kebijakan pada suku bunga kredit dan DPK yang relatif terbatas turut mendukung akselerasi pertumbuhan kredit.

Dari sisi permintaan, korporasi di sektor yang padat modal menjadi penopang akselerasi pertumbuhan kredit produktif.

Kredit tumbuh tinggi pada mayoritas sektor ekonomi terutama pada sektor padat modal. Pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) Korporasi terutama dikontribusikan oleh sektor berorientasi ekspor antara lain sub-sektor perdagangan, khususnya produk-produk premium. Sementara itu, Kredit Investasi (KI) Korporasi dikontribusikan oleh sektor berorientasi domestik. Di tengah *appetite* kredit bank yang positif, rasio investasi yang relatif berada di bawah rasio kredit mencerminkan masih besarnya potensi peningkatan pembiayaan terutama pada sektor padat modal seperti sektor industri, jasa dunia usaha, pengangkutan, pertambangan, dan listrik, gas, dan air. Sejalan dengan perbankan, intermediasi IKNB juga menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari perusahaan pembiayaan (PP) maupun *fintech lending*.

Pertumbuhan DPK dan likuiditas perbankan masih memadai untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan kredit. Hingga Juni 2024, DPK perbankan tumbuh sebesar 8,45% (yoy)

dengan berbagai rasio kecukupan likuiditas, seperti rasio AL/DPK, LCR, dan NSFR, yang terjaga di atas *threshold*. Berdasarkan alat likuid yang dimiliki, bank KBMI 1 dan 2 masih memiliki likuiditas yang jauh di atas level industri, sementara likuiditas KBMI 3 relatif memadai untuk kebutuhan ekspansi kredit. Adapun pada KBMI 4, likuiditas telah kembali pada level prapandemi, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang lebih agresif. Perbankan juga mengoptimalkan sumber dana non-DPK, termasuk ULN yang relatif lebih murah, untuk mendukung peningkatan intermediasi. Setelah penerbitan SRBI, perbankan melakukan realokasi portofolio alat likuid untuk memperoleh *yield enhancement* menggunakan *idle funds*, sehingga tidak mengurangi alokasi dana untuk kredit. Sementara itu, pembelian SRBI oleh IKNB dan RT masih terbatas sehingga tidak signifikan memengaruhi alokasi DPK IKNB dan perorangan di perbankan.

Kenaikan suku bunga dan tekanan nilai tukar berdampak terbatas pada penurunan kemampuan membayar didukung masih tingginya profitabilitas korporasi di mayoritas sektor ekonomi.

Pelemahan nilai tukar berdampak negatif terhadap *net profit margin* korporasi yang berorientasi impor. Namun, tingkat profitabilitas yang masih tinggi pada korporasi tersebut menjadi *buffer* sehingga kemampuan membayar kredit korporasi dapat terjaga. Sementara itu, kenaikan suku bunga juga berdampak terbatas pada penurunan kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi di mayoritas sektor ekonomi. Ketahanan korporasi didukung oleh likuiditas yang memadai dan strategi korporasi mengurangi utang luar negeri (ULN). Adapun sektor yang terdampak paling signifikan dari pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga, yaitu sektor konstruksi, industri tekstil, dan *real estate*.

Kemampuan membayar RT terjaga dan berkontribusi terhadap relatif stabilnya risiko kredit perbankan dan IKNB. Penghasilan RT berlanjut meningkat dengan tren pemulihan yang berbeda antar kelas penghasilan. Penghasilan RT kelas menengah dan atas berada di atas level prapandemi, sementara penghasilan RT kelas

bawah belum kembali pada level prapandemi. Hal ini antara lain disebabkan oleh dominasi tenaga kerja informal (59%) dengan *path* pemulihan yang belum kembali seperti kondisi prapandemi. Kemampuan membayar RT terjaga dengan *Debt Service Ratio* (DSR) RT yang meningkat terbatas terutama pada segmen KPR yang dimiliki RT kelas atas, dengan LaR dan NPL RT yang masih relatif rendah.

Rasio permodalan bank dan IKNB yang relatif tinggi mampu menyerap peningkatan risiko kredit dan pasar sehingga kinerja intermediasi dan profitabilitas tetap terjaga. Hasil *stress test* mengindikasikan kecukupan modal dan likuiditas perbankan yang memadai dapat menyerap potensi kerugian apabila kondisi makroekonomi memburuk. *Stress test* yang dilakukan terhadap IKNB juga mengindikasikan ketahanan permodalan IKNB yang baik. Risiko *interconnectedness* IKNB dan perbankan juga terbatas karena eksposur IKNB ke perbankan yang sangat rendah. Secara keseluruhan, sistem keuangan Indonesia berdaya tahan terhadap peningkatan risiko ketidakpastian global. Hal ini terkonfirmasi pada hasil laporan asesmen FSAP 2023 yang menunjukkan resiliensi sistem perbankan Indonesia, kendati diperlukan penguatan ketahanan pada bank kecil dengan pangsa total aset terhadap industri yang tidak signifikan.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terus didorong melalui kebijakan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Penyaluran kredit UMKM maupun pembiayaan UMKM (Syariah) tumbuh positif meskipun terbatas, terutama ditopang oleh segmen Menengah dan Kecil serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Strategi perbankan melakukan *selective lending* pada kredit UMKM terutama segmen usaha mikro merupakan upaya konsolidasi untuk menahan peningkatan risiko kredit. PP dan *fintech* juga melakukan *selective lending* yang tercermin pada perlambatan pertumbuhan pembiayaan, terutama pada segmen usaha mikro. Penyaluran kredit UMKM diperkirakan kembali meningkat pada semester II

2024, seiring dengan optimisme perbaikan kinerja UMKM dengan peluang pembiayaan yang masih cukup besar pada segmen ultra mikro. Sementara itu, penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Hijau (KKB Hijau) dan Kredit Perumahan Hijau (KPR hijau) semakin akseleratif, jauh lebih tinggi dari industri dengan risiko kredit yang sangat rendah pada kedua segmen tersebut.

Dalam rangka memperkuat ketahanan SSK melalui terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inovasi kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi intermediasi dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar terus dilanjutkan untuk mendukung intermediasi sesuai siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan optimalisasi pinjaman luar negeri bank yang berbasis risiko melalui kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). Penguatan KLM yang efektif diimplementasikan per 1 Juni 2024 mencakup perluasan cakupan sektor serta redistribusi besaran insentif dengan tambahan insentif KLM apabila pertumbuhan kredit bank pada sektor prioritas melebihi median industri. Sementara itu, kebijakan RPLN yang diimplementasikan pada 1 Agustus 2024 bertujuan memberikan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan pendanaan luar negeri jangka pendek bank yang berbasis risiko dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (*risk-based*), dengan turut mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi.

Selain KLM, sejumlah kebijakan makroprudensial lainnya masih dipertahankan longgar. Kebijakan makroprudensial longgar yang diterapkan mencakup kebijakan Rasio *Loan to Value* atau *Financing to Value* (LTV/FTV), Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CcyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta kebijakan pendalaman transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia

mempertahankan kebijakan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), termasuk ruang fleksibilitas repo yang diberikan dalam PLM. Sinergi dan koordinasi kebijakan antara BI dengan Pemerintah, otoritas terkait, maupun mitra strategis lainnya secara konsisten terus diperkuat, termasuk koordinasi kebijakan nasional melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun koordinasi secara bilateral dengan anggota KSSK dalam rangka menjaga SSK.

Prospek intermediasi perbankan tetap kuat didukung ketahanan sistem keuangan dan optimisme pertumbuhan ekonomi sehingga stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga. *Outlook* pertumbuhan kredit pada akhir tahun 2024 diperkirakan terjaga dalam sasaran 10-12% dan terus meningkat pada tahun 2025 dalam kisaran 11-13%. Optimisme pertumbuhan kredit turut didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga global pada semester II, yang diperkirakan berdampak positif pada prospek perekonomian global dan domestik, di tengah inflasi dan nilai tukar yang tetap terjaga. Perbankan juga memiliki kapasitas pembiayaan yang besar, risiko kredit yang rendah, dan permodalan yang kuat untuk menopang kinerja intermediasi. Permintaan kredit terutama dari korporasi berpotensi semakin kuat di tengah optimisme peningkatan aktivitas ekonomi dan suku bunga yang lebih kondusif. Sementara itu, permintaan kredit konsumsi diperkirakan kembali meningkat seiring membaiknya kemampuan

membayar rumah tangga. Dari sisi inklusi, kredit UMKM diperkirakan tumbuh moderat dengan tren yang membaik, sejalan dengan perbaikan kinerja UMKM dan program KUR yang diperkirakan berlanjut di paruh kedua 2024.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dan memberikan ruang bagi pembiayaan, serta penguatan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.

Kebijakan makroprudensial longgar masih akan ditempuh untuk mendukung akselerasi kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan rumah tangga dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Bauran kebijakan makroprudensial dilanjutkan melalui berbagai instrumen sesuai dengan sasaran kredit/pembiayaan yang optimal, ketahanan sistem keuangan, serta keuangan yang inklusif dan hijau. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bauran kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga melanjutkan pengawasan secara tidak langsung (*surveilans*) dan pengawasan langsung (pemeriksaan) secara tematik untuk memastikan pelaksanaan dan implementasi kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan otoritas di sektor keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan guna mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.



BANK INDONESIA



BAB 1

PEREKONOMIAN DAN SISTEM KEUANGAN DOMESTIK TETAP BERDAYA TAHAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL



Prospek pertumbuhan ekonomi global tetap kuat meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

Kinerja ekonomi global pada 2024 ditopang ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang lebih baik, sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara Emerging and Developing Countries (EMDEs) khususnya Tiongkok belum kuat. Penurunan inflasi Advanced Countries (AEs) berlanjut seiring dengan meredanya inflasi jasa dan pangan, meski masih di atas target sasaran bank sentral. Di sisi lain, penurunan inflasi EMDEs terhambat oleh harga pangan yang masih tinggi dan nilai tukar yang melemah. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi dan ketegangan geopolitik yang belum mereda meningkatkan tekanan capital outflows dari EMDEs, termasuk Indonesia. Namun demikian, upaya stabilisasi dan pendalaman pasar keuangan yang ditempuh Bank Indonesia serta koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mampu menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah.

Perekonomian domestik tetap baik dan terus tumbuh di atas 5% (yoy) pada paruh pertama 2024. PDB pada triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang

kuat. Aktivitas lapangan usaha tumbuh lebih tinggi khususnya sektor akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah. Sementara itu, inflasi IHK terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ dan khusus inflasi volatile food turun lebih cepat didukung antara lain oleh sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Pertumbuhan kredit tetap kuat dengan ketahanan sistem keuangan yang terjaga.

Pencapaian ini didukung oleh minat penyaluran kredit perbankan yang tetap baik, likuiditas perbankan yang memadai, dan risiko kredit yang rendah. Permintaan kredit tetap kuat ditopang oleh korporasi khususnya di sektor padat modal dan rumah tangga kelas menengah ke atas. Selain itu, risiko kredit terjaga rendah meskipun stimulus restrukturisasi kredit dari OJK telah berakhir. Hal tersebut juga menopang terjaganya ketahanan sistem keuangan, tecermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang berada pada zona Normal sepanjang paruh pertama 2024.

Perkembangan Ekonomi Keuangan Global Memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global tetap kuat.

Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sesuai prakiraan, sebesar 3,2% (yoy), didorong oleh pertumbuhan ekonomi AS dan Eropa. Kinerja ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal, sementara ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi didukung oleh perbaikan ekspor dan investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara EMDEs, khususnya Tiongkok, belum kuat dipengaruhi oleh lemahnya permintaan domestik. Proses penurunan inflasi global berlanjut terutama di negara maju. Inflasi dunia pada Juni 2024 turun menjadi 6,5% (yoy) dari level tertinggi pada Mei 2024 sebesar 6,8% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan mulai meredanya inflasi jasa dan pangan di AEs, meskipun masih dalam level tinggi dan di atas target bank sentral. Sementara itu,

penurunan inflasi EMDEs terhambat akibat antara lain harga pangan yang masih tinggi dan nilai tukar yang melemah.

Ketidakpastian pasar keuangan global dan ketegangan geopolitik belum mereda sehingga mengakibatkan aliran modal ke EMDEs relatif terbatas.

Imbal hasil obligasi global tenor jangka panjang, terutama US Treasury, masih tinggi akibat kebutuhan defisit anggaran Pemerintah AS. Sementara itu, suku bunga kebijakan AEs masih *high for longer* pada paruh pertama tahun 2024. Berbagai kondisi tersebut selanjutnya memicu berlanjutnya tekanan *capital outflows* dari EMDEs termasuk Indonesia dan mendorong pelemahan nilai tukar Rupiah.

Sistem Keuangan Domestik Tetap Kuat dan Mendorong Intermediasi Perbankan

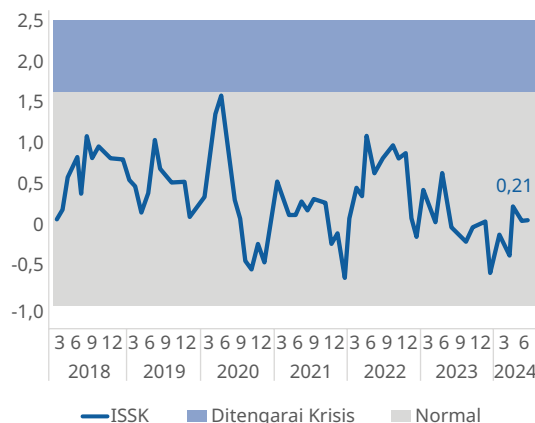
Perekonomian domestik yang kuat menopang kinerja sistem keuangan dan mendukung terjaganya SSK.

Terjaganya SSK tecermin dari ISSK yang berada pada zona Normal sepanjang semester I 2024 (Grafik 1.2.1). Momentum pertumbuhan ekonomi sejak akhir 2023 hingga semester I 2024 yang terjaga di atas 5% mendukung pertumbuhan kredit tetap kuat dalam kisaran target 10-12%. Nilai tukar Rupiah terjaga, namun masih tingginya ketidakpastian global dan dampak rambatannya terhadap nilai tukar, berpotensi memengaruhi kinerja dan *repayment capacity* korporasi khususnya yang memiliki pinjaman luar negeri dan konten impor yang tinggi. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada semester I 2024 terjaga rendah dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Selanjutnya, masih terdapat potensi risiko dari suku bunga global dan domestik yang tinggi terhadap kinerja korporasi dan dampak

rambatannya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 tetap baik sebesar 5,05% yoy, setelah tumbuh sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi menjadi 4,93% (yoy) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan terjaganya daya beli. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4,43% (yoy) seiring dengan peningkatan kinerja ekspor dan belanja modal Pemerintah. Ekspor tumbuh sebesar 8,28% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama dan kunjungan wisatawan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

mananegara yang meningkat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) dan konsumsi Pemerintah tumbuh melambat, masing-masing menjadi 9,98% (yoy) dan 1,42% (yoy) seiring dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik juga tecermin dari sisi lapangan usaha dan spasial.

Dari sisi lapangan usaha (LU), seluruh LU pada triwulan II 2024 menunjukkan kinerja positif. LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh paling tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat khususnya selama libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama juga tumbuh positif seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 tertinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.

Stabilisasi nilai tukar Rupiah terjaga ditopang oleh bauran kebijakan moneter Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan global.

Nilai tukar Rupiah pada Juni 2024 melemah 5,97% (ytd) dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan masih tingginya ketegangan geopolitik, namun tetap lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan, misalnya Won Korea, Baht Thailand, dan Yen Jepang. Selain faktor global, pelemahan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh faktor domestik, antara lain kenaikan

permintaan valas oleh korporasi dan persepsi terhadap kesinambungan kebijakan fiskal ke depan. Upaya stabilisasi dan pendalaman pasar keuangan oleh Bank Indonesia serta koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas implementasi instrumen penempatan valas DHE SDA mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi semester I 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran inflasi.

Inflasi IHK Juni 2024 tercatat sebesar 2,51% (yoy), dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi *administered prices* yang masing-masing sebesar 1,90% (yoy) dan 1,68% (yoy). Inflasi inti terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali, serta dampak positif digitalisasi. Inflasi *volatile food* turun di mayoritas wilayah Indonesia dan tercatat sebesar 5,96% (yoy) didukung peningkatan pasokan pangan serta dampak positif sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP di berbagai daerah.

Fundamental makroekonomi yang baik menopang kinerja intermediasi perbankan.

Pertumbuhan kredit industri perbankan hingga Juni 2024 mencapai sebesar 12,36% (yoy), lebih tinggi dari rentang target akhir tahun dalam kisaran 10-12%. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit terjaga terutama ditopang oleh DPK dan likuiditas perbankan yang memadai, serta risiko kredit yang terjaga rendah. Perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan SSB dan pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit bersumber dari tingginya permintaan korporasi khususnya di sektor padat modal serta dari permintaan RT khususnya kelas menengah atas. Pertumbuhan kredit yang tinggi terjadi di mayoritas sektor ekonomi, terutama pada segmen kredit investasi dan modal kerja.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung risiko kredit perbankan yang rendah.

Perbankan tetap pruden dalam menyalurkan kredit/pembiayaan dan memitigasi risiko kredit sebagaimana tecermin pada rasio *Non-performing Loan* (NPL) sebesar 2,26% (bruto) dan 0,78%

(neto) di Juni 2024. Sementara itu, ketahanan likuiditas perbankan tecermin pada rasio Alat Likuid terhadap DPK dan rasio kecukupan modal minimum yang tetap tinggi (*Capital Adequacy Ratio* - CAR), masing-masing sebesar 25,36% dan 26,09%. Tingginya permodalan perbankan yang mencapai 26,09% pada Juni 2024 mampu menyerap potensi peningkatan risiko. Kuatnya permodalan dan likuiditas perbankan tersebut turut ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas

korporasi yang terjaga yang tecermin dari *interest coverage ratio* (ICR) korporasi yang masih tinggi. Beberapa risiko dinamika global yang masih perlu diwaspadai, antara lain suku bunga yang persisten tinggi, pelemahan nilai tukar, dan masih rendahnya harga komoditas khususnya batubara. Adapun saat ini, dampak rambatan risiko global terhadap kinerja korporasi dan perbankan di Indonesia masih terbatas.

1.3

Persepsi Sumber-sumber Kerentanan dan Guncangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Semester I 2024¹

Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah berbagai kerentanan (*vulnerabilities*)² dan guncangan (*shocks*)³ dari domestik maupun global. Hasil survei persepsi masyarakat atas sumber risiko sistemik pada semester I 2024 memperlihatkan lima hal yang dinilai menjadi sumber kerentanan utama. Pertama, *mismatch* pendanaan bank yang mayoritas bersumber dari dana jangka pendek. Pada sebagian bank, sumber pendanaan terkonsentrasi pada nasabah besar yang sensitif terhadap perubahan suku bunga sehingga rentan terhadap pergeseran preferensi investasi pada instrumen lain dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, persaingan dana murah juga cukup ketat sehingga terdapat kebutuhan pendanaan selain dari DPK untuk memenuhi kebutuhan intermediasi. Beberapa sumber dana yang menjadi opsi perbankan adalah penerbitan SSB, pinjaman, dan ULN, terutama di bank besar. Kerentanan kedua adalah kredit yang terkonsentrasi pada sektor tertentu serta pada

debitur besar. Hal ini tecermin pada pangsa dan pertumbuhan kredit yang saat ini ditopang oleh korporasi di sektor padat modal. Kerentanan ketiga bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang dinilai bergantung pada sektor tertentu seperti manufaktur dan sektor berbasis komoditas. Ketimpangan pemulihan pertumbuhan ekonomi antarsektor berpotensi menahan pemulihan ekonomi agregat. Kerentanan keempat adalah dominasi bank besar dalam sistem keuangan, sejalan dengan meningkatnya kontribusi kredit dari KBMI 3 dan 4. Sementara itu, pada KBMI 1 dan 2, pertumbuhan kredit cenderung heterogen dipengaruhi oleh perbedaan model bisnis. Faktor kebijakan internal di beberapa bank yang terafiliasi asing terkait implementasi *Environmental, Social, Governance* (ESG), berpotensi membatasi eksposur pada kredit nonhijau. Kerentanan selanjutnya adalah perbedaan pemulihan konsumsi rumah tangga antara kelas menengah-bawah dan kelas atas, yang berpotensi meningkatkan kesenjangan di tengah kondisi suku bunga yang persisten tinggi.

Hasil survei juga menunjukkan setidaknya lima sumber guncangan (*shock*) yang dipersepsikan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pertama, volatilitas harga komoditas ekspor yang dipengaruhi oleh dinamika permintaan global serta disrupsi *supply chain*. Hal ini dapat memengaruhi kinerja kredit korporasi, khususnya di sektor komoditas yang memiliki andil

1 Berdasarkan *Risk Assessment Matrix* (RAM) yang disusun dari hasil Survei Risiko Sistemik Semester I 2024 (129 responden dari institusi keuangan, korporasi, pengamat ekonomi, dan akademisi, data per 18 April 2024).

2 Kerentanan atau *vulnerabilities* adalah kondisi (*pre-existing features*) sistem keuangan yang dapat memperkuat (*amplify*) dan mempercepat penyebaran *shock*.

3 Guncangan atau *Shocks* adalah peristiwa tertentu yang memicu (membarengi) terjadinya krisis (*the proximate cause*). Risiko termaterialisasi ketika *shock* berinteraksi dengan *vulnerability* dan akan memiliki dampak sistemik apabila tidak diimbangi dengan tingkat ketahanan (*resilience*) yang memadai.

besar pada perekonomian dan kredit. Salah satu sektor yang berpotensi terganggu adalah sektor pertambangan batubara seiring dengan harga batubara di pasar global yang masih rendah. Kedua, konflik geopolitik yang berlanjut dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan global dan aliran dana asing keluar. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pelemahan nilai tukar dan meningkatkan risiko kredit dan pasar, serta memengaruhi kinerja korporasi khususnya dengan konten impor tinggi. Ketiga, inflasi *volatile food* yang relatif tinggi pada triwulan I 2024 dikhawatirkan terjadi secara persisten sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah bawah dan menekan kredit konsumsi. Keempat, pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok yang melambat antara lain akibat permasalahan struktural, dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja korporasi eksportir. Kelima, sumber guncangan dari risiko siber, yaitu gangguan operasional sistem keuangan,

layanan perbankan, sistem pembayaran, maupun operasional pendukung, serta serangan siber.

Di tengah berbagai potensi risiko tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan sektor keuangan Indonesia masih tinggi. Mayoritas responden survei percaya bahwa ketahanan sektor keuangan hingga enam bulan ke depan masih akan terjaga. Risiko sistemik diyakini belum akan termaterialisasi seiring dengan ketahanan sistem keuangan domestik yang kuat. Hal ini didukung oleh respons bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, serta memitigasi dampak dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik yang kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan termasuk memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Boks 1.1

Prinsip Bauran Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkuat transformasi kebijakan dalam Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) sebagai wujud dukungan terhadap implementasi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penerapan BKBI dilakukan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BKBI merupakan integrasi kebijakan yang saling melengkapi dan memperkuat antar kebijakan utama dengan ditopang oleh kebijakan pendukung, yang koheren dan konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia. Kebijakan utama mencakup kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pendukung meliputi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah (EKDA),

kebijakan pengembangan pasar uang dan pasar valas, kebijakan inklusi dan hijau, kebijakan internasional, serta kebijakan perlindungan konsumen. Selanjutnya, pelaksanaan BKBI berlandaskan prinsip dasar IKKAT, yaitu independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi.

Sebagai bagian dari BKBI, bauran kebijakan makroprudensial diarahkan untuk turut menjaga SSK melalui pengelolaan dan optimalisasi berbagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran kebijakan makroprudensial. Terdapat tiga sasaran kebijakan makroprudensial, yaitu kredit/pembiayaan yang optimal, ketahanan sistem keuangan, dan keuangan yang inklusif dan hijau (Gambar B1.1.1). Setiap sasaran dicapai melalui implementasi instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan terhadap perbankan. Selanjutnya, pilihan instrumen bauran kebijakan makroprudensial mempertimbangkan antara lain siklus



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar B1.1.1. Kerangka Bauran Kebijakan Makroprudensial

keuangan, indikator-indikator, dan/atau indeks yang menggambarkan stabilitas serta kerentanan sistem keuangan.

Alokasi sumber kredit atau pembiayaan yang optimal adalah pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang berkualitas atau seimbang tanpa memberikan tekanan instabilitas sistem keuangan sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Instrumen kebijakan yang digunakan meliputi antara lain rasio CCyB, KLM, RIM, rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Perumahan (KP/PP), Uang Muka (UM) Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB), dan RPLN.

Ketahanan sistem keuangan adalah SSK yang berdaya tahan terhadap gejolak internal dan eksternal, dengan risiko sistemik yang terkelola baik. Sistem keuangan yang berdaya tahan mendukung berjalannya fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya secara efektif untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen untuk mencapai sasaran ini mencakup PLM, Posisi Devisa Neto (PDN), Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek termasuk yang berdasarkan prinsip syariah (PLJP/PLJPS), protokol manajemen krisis (PMK), *stress test*, serta penerapan prinsip kehati-hatian untuk transaksi devisa.

Keuangan yang inklusif dan hijau merupakan ekosistem keuangan yang mampu mendorong perluasan akses ekonomi dan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat, serta menyelaraskan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan dan pencapaian SSK, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia. Instrumen kebijakan untuk memperdalam keuangan yang inklusif dan hijau mencakup Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), rasio LTV/FTV dan UM untuk kredit/pembiayaan hijau, serta KLM untuk inklusi dan hijau.

Upaya menjaga SSK menjadi prioritas utama apabila terdapat dampak yang saling berkaitan dari pencapaian ketiga sasaran yang berpotensi mengganggu sistem keuangan. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial untuk mengelola kredit/pembiayaan optimal ditujukan untuk memitigasi efek negatif dari *boom-bust* siklus bisnis dan keuangan yang dapat berdampak pada risiko terhadap SSK. Sementara itu, kebijakan keuangan inklusif dan hijau ditujukan untuk memperkuat SSK melalui peningkatan diversifikasi portofolio bank, penurunan risiko *shadow banking* dan pengelolaan atas risiko perubahan iklim.



BAB 2

INTERMEDIASI KEUANGAN DIDUKUNG *APPETITE* PERBANKAN DAN PERMINTAAN YANG MASIH KUAT



Pada sisi penawaran, penyaluran kredit bank meningkat didukung oleh ketersediaan likuiditas dan appetite yang baik. Kredit bank pada semester I 2024 tumbuh tinggi mencapai 12,36% (yoy). Kredit terutama disalurkan kepada segmen korporasi dalam bentuk KI dan KMK. Penyaluran kredit bank kepada UMKM tumbuh melambat, terpengaruh dampak El Nino terhadap produksi pertanian sehingga bank cenderung selektif dalam melakukan pembiayaan untuk menjaga risiko kreditnya. Bank menengah dan besar (KBMI 3 dan 4) berperan sebagai pendorong utama penyaluran kredit. Sementara itu, penyaluran kredit KBMI 1 dan 2 relatif beragam tergantung model bisnis masing-masing yang umumnya menyasar segmen nasabah nonkorporasi. Bank diperkirakan memiliki appetite penyaluran kredit yang positif di tengah gejolak ketidakpastian global didukung likuiditas yang memadai serta kenaikan suku bunga DPK dan kredit yang terbatas. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh dominasi porsi dana murah (CASA) dan persaingan di pasar kredit. Appetite bank juga terkonfirmasi oleh indikator (ILR) yang menunjukkan persyaratan kredit yang relatif longgar. Sebagai upaya

yield enhancement, bank melakukan realokasi alat likuid pada instrumen dengan imbal hasil lebih tinggi, namun tidak mengurangi alokasi dana untuk kredit.

Pada sisi permintaan, pengaruh tekanan global menahan kinerja korporasi dan rumah tangga. Kinerja korporasi tertahan di tengah pelemahan permintaan global dan tekanan nilai tukar sehingga diperkirakan menghambat realisasi investasi korporasi. Namun demikian, sejumlah sektor padat modal (capital intensive) mencatatkan pertumbuhan belanja modal positif pada semester I 2024, diantaranya sektor pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air (LGA), serta perdagangan, dan jasa dunia usaha. Sektor-sektor tersebut juga terkonfirmasi mengalami peningkatan pertumbuhan kredit bank pada semester I 2024. Sementara itu, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan moderat, yang terutama didorong oleh segmen KPR (43% dari total kredit konsumsi). Berdasarkan kelas pendapatan, kelas atas merupakan kontributor utama pertumbuhan kredit konsumsi (74% dari total kredit).

Appetite penyaluran kredit perbankan tetap baik didukung DPK dan likuiditas yang masih memadai. Sumber pendanaan utama bank berasal dari DPK, didukung realokasi aset likuid bank menjadi kredit sebagai langkah normalisasi likuiditas bank yang sempat tinggi pada saat pandemi. Pada Juni 2024, pertumbuhan DPK mencapai sebesar 8,45% (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) termoderasi menjadi 25,56%, menurun signifikan dari 35,12% pada periode pandemi (2021). Untuk penghimpunan dana, perbankan mengoptimalkan perolehan dana murah dari tabungan dan giro (*current account* dan *saving account*, CASA) yang mencapai 63% terhadap total DPK.

Kredit tumbuh meningkat mencapai 12,36% (yoy) didorong oleh segmen kredit produktif. KI dan KMK masing-masing tumbuh sebesar 15,09% dan 11,68% (yoy). Sektor KI yang tumbuh meningkat mencakup industri pengolahan, pengangkutan, LGA, dan perdagangan. Sektor KMK meliputi sektor jasa dunia usaha, perdagangan, pertambangan, dan industri pengolahan (Tabel 2.1.1). Sementara itu, KK juga tumbuh tinggi sebesar 10,8% (yoy), kendati tidak setinggi kredit

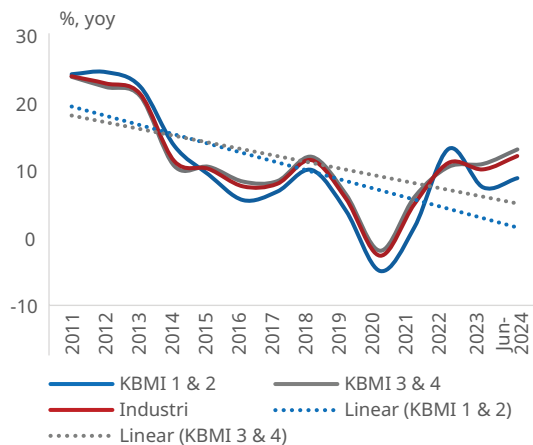
produktif. Pertumbuhan KK meningkat terutama pada jenis KPR. Sementara itu, KKB tumbuh 6,33% (yoy), melambat signifikan dari 17,48% (yoy) akibat peningkatan suku bunga sebesar 51 bps dalam setahun terakhir.

Pertumbuhan kredit terakselerasi pada segmen korporasi yang terutama disalurkan oleh bank KBMI 3 dan 4. Pertumbuhan kredit korporasi mencapai sebesar 19,08% (yoy) pada Juni 2024. Sementara itu, penyaluran kredit ke UMKM tumbuh melambat seiring dengan peningkatan risiko kredit dan perlambatan produksi komoditas pertanian akibat pengaruh El Nino. Bank cenderung melakukan *selective lending* untuk memperbaiki kualitas kredit UMKM setelah berakhirnya kebijakan relaksasi restrukturisasi Covid -19 pada Maret 2024. Pertumbuhan kredit seluruh KBMI di atas tren jangka panjang dengan penyaluran kredit terutama didorong oleh bank KBMI 3 dan 4 (Grafik 2.1.1). Kondisi tersebut mengindikasikan *appetite* intermediasi yang secara umum positif pada seluruh kelompok bank. Pertumbuhan kredit KBMI 1 dan 2 tidak setinggi KBMI 3 dan 4 yang disebabkan oleh variasi model bisnisnya yang didominasi segmen nasabah nonkorporasi. KBMI

Tabel 2.1.1. Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi dan Jenis Penggunaan

Sektor Ekonomi	KMK					KI				
	Growth (%yoy)		Kontribusi (yoy)		Pangsa (%)	Growth (%yoy)		Kontribusi (yoy)		Pangsa (%)
	Jun-23	Jun-24	Jun-23	Jun-24	Jun-24	Jun-23	Jun-24	Jun-23	Jun-24	Jun-24
A. Pertanian	8,63	9,98	0,64	0,76	7,51	6,37	6,85	0,96	1,00	13,59
B. Pertambangan	14,38	42,46	0,55	1,75	5,25	26,08	15,76	1,62	1,13	7,19
C. Industri Pengolahan	-0,30	6,54	-0,08	1,63	23,83	7,08	18,47	1,22	3,11	17,35
D. Listrik, Gas, Air	-30,04	5,44	-0,37	0,04	0,78	-1,91	32,56	-0,16	2,40	8,50
E. Konstruksi	8,32	-2,40	0,64	-0,19	6,87	2,19	-2,39	0,22	-0,22	7,78
F. Perdagangan	2,80	8,53	0,91	2,68	30,59	6,85	15,28	0,98	2,14	14,02
G. Pengangkutan	-6,07	19,24	-0,28	0,79	4,39	12,79	20,52	1,51	2,50	12,75
H. Jasa Dunia Usaha	23,43	23,12	2,97	3,42	16,29	14,69	11,37	1,72	1,40	11,89
I. Jasa Sosial	28,05	18,66	0,98	0,79	4,48	27,93	25,61	1,52	1,63	6,93
Total	5,96	11,68	5,96	11,68	100,00	9,60	15,09	9,60	15,09	100,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

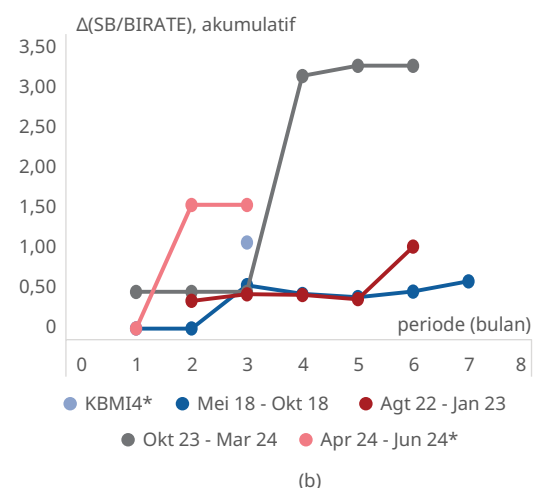
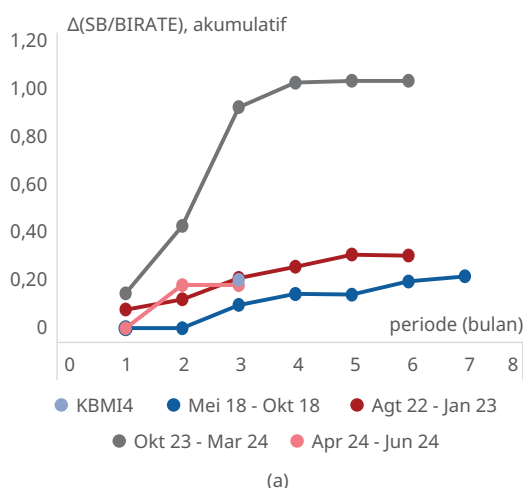
Grafik 2.1.1. Tren Jangka Panjang Pertumbuhan Kredit

1 dan 2 umumnya terdiri dari kelompok BPD, BUSN domestik, BUSN yang terafiliasi asing, dan KCBA. Kredit BPD di beberapa daerah terkendala tingginya risiko kredit, terutama pada sektor konstruksi. Sementara itu, KCBA cenderung melakukan intermediasi secara tidak langsung melalui bank lain serta melakukan pembiayaan spesifik misalnya terkait ESG, atau berperan sebagai perantara keuangan, dan fasilitator transaksi perdagangan internasional.

Pertumbuhan kredit tetap tinggi di tengah gejolak ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian *timing* penurunan suku bunga bank sentral negara-negara utama

terlihat pada tekanan nilai tukar dan suku bunga pada sistem keuangan. Berdasarkan analisis sensitivitas, kenaikan BI Rate direspons bank dengan kenaikan suku bunga DPK dan kredit secara terbatas (Grafik 2.1.2). Hal tersebut ditengarai antara lain oleh dominasi porsi dana murah (CASA) dan persaingan di pasar kredit. Sementara itu, tekanan nilai tukar tidak terlalu berdampak pada perbankan karena posisi kewajiban valuta asing yang relatif rendah dibandingkan instrumen kewajiban lainnya.

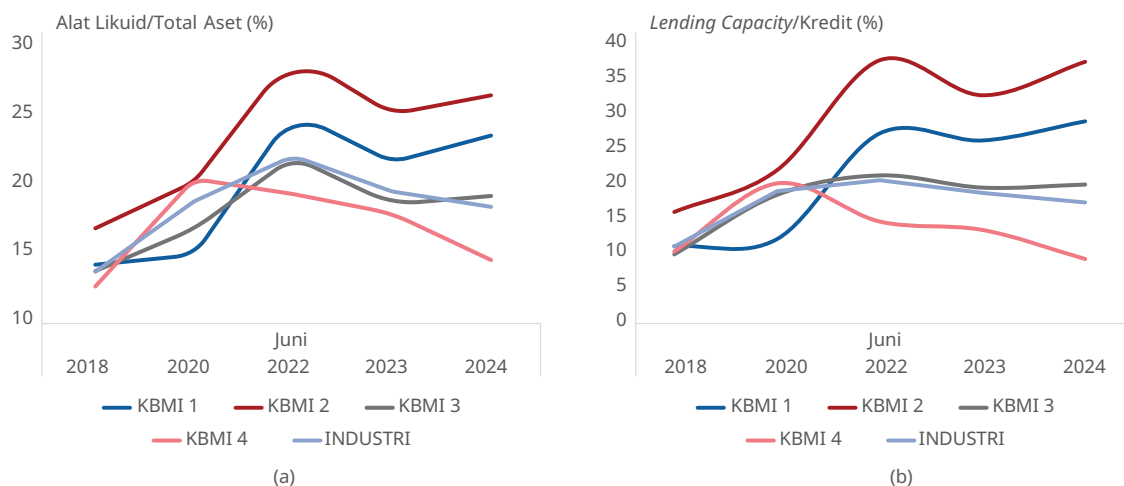
Kondisi likuiditas perbankan memadai untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan kredit (*lending capacity*). KBMI 1 dan 2 memiliki likuiditas di atas level industri, sementara itu likuiditas KBMI 3 memadai untuk kebutuhan ekspansi kredit (Grafik 2.1.3). Pada KBMI 4, likuiditas telah mengalami normalisasi kepada level prapandemi, sejalan dengan pertumbuhan kreditnya yang lebih agresif. KBMI 4 juga mengandalkan dana non-DPK untuk mendukung akselerasi kredit. Bank berupaya mengoptimalkan komposisi alat likuidnya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi likuiditas dengan imbal hasil rendah (*idle funds*). Bank merelokasi instrumen moneter seperti *reverse repo* SBN dan *term deposit*, serta SBN yang jatuh tempo ke instrumen SRBI, untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Peningkatan penempatan pada SRBI bergerak sejalan dengan pertumbuhan



Keterangan: Grafik di atas menggambarkan akumulasi perubahan 1 unit peningkatan suku bunga kebijakan terhadap unit perubahan suku bunga DPK dan kredit. Akumulasi sensitivitas suku bunga DPK dan kredit bergerak sejalan dengan lamanya peningkatan suku bunga kebijakan.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.2. Sensitivitas Suku Bunga DPK (a) dan Suku Bunga Kredit (b) terhadap Peningkatan Suku Bunga Kebijakan



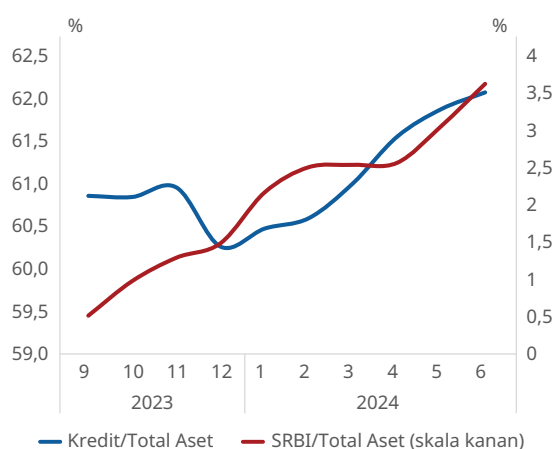
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.3. Perkembangan Rasio Alat Likuid dan *Lending Capacity* Perbankan

kredit sehingga tidak menunjukkan adanya gejala pengalihan dana (*crowding-out*) dari alokasi untuk kredit menjadi alokasi untuk SRBI (Grafik 2.1.4).

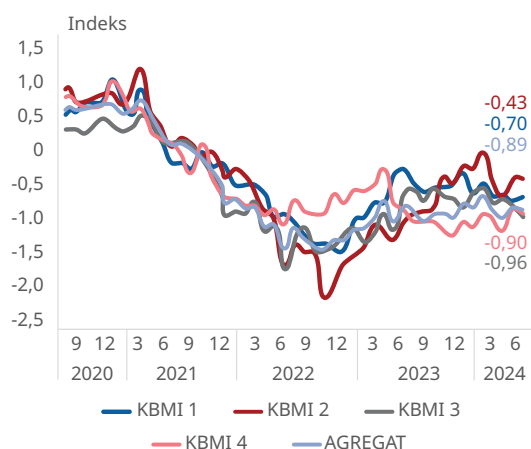
Perbankan terindikasi memiliki *appetite* yang baik untuk menyalurkan pembiayaan. Hal ini tecermin dari ILR yang masih longgar di seluruh KBMI dan mayoritas kelompok bank (Grafik 2.1.5). ILR terindikasi paling longgar pada KBMI 3 dan 4 terutama dari faktor meningkatnya pertumbuhan plafon kredit. Sementara itu, ILR KBMI 1 dan 2 terutama pada kelompok KCBA masih cenderung ketat, sejalan dengan model bisnis KCBA yang lebih fokus pada pembiayaan tidak langsung (*indirect intermediary*).

Perbankan cenderung meningkatkan penyaluran kredit saat ekonomi berada dalam periode akselerasi. Berdasarkan estimasi, sensitivitas kredit perbankan terhadap perbaikan ekonomi (peningkatan PDB) relatif tinggi dengan nilai elastisitas lebih dari 1 (*unitary elastic*). Ketika PDB meningkat maka penyaluran kredit perbankan berpotensi menjadi lebih prosiklikal. Dari estimasi elastisitas berjalan (*rolling elasticity*), sensitivitas intermediasi bank terhadap kenaikan PDB cenderung lebih tinggi pada periode *recovery* pascapandemi. Hal tersebut menunjukkan peningkatan *appetite* yang positif terhadap penyaluran kredit. Meskipun sempat terjadi penurunan elastisitas pada paruh pertama 2024, sensitivitas intermediasi pada masing-masing KBMI masih relatif tinggi (Grafik 2.1.6)



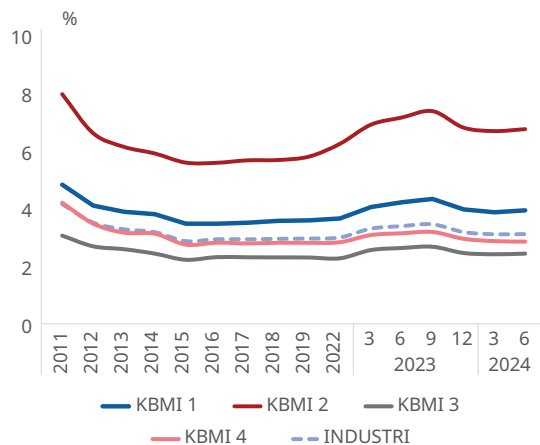
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.4. Perbandingan Kredit dan SRBI terhadap Total Aset Bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.5. Indeks *Lending Requirement* per KBMI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

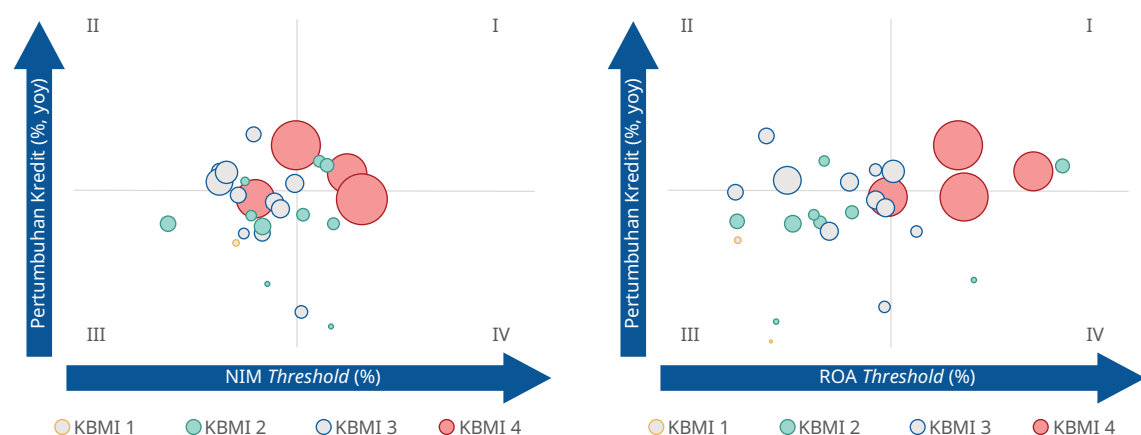
Grafik 2.1.6. Dinamika Sensitivitas Kredit terhadap PDB (Rolling Elasticity)

Appetite bank KBMI 4 terhadap penyaluran kredit diperkirakan akan terus berlanjut, didukung optimisme penurunan suku bunga global pada semester II 2024. Ekspektasi membaiknya kondisi suku bunga ke depan berpotensi mengurangi tekanan profitabilitas perbankan sebagaimana terindikasi pada ROA yang turun dari 2,73% pada Juni 2023 menjadi 2,66% pada Juni 2024. Penurunan profitabilitas antara lain disebabkan oleh strategi bank untuk tetap menjaga daya saing kredit dengan melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara perlahan dan gradual di tengah kenaikan suku bunga dana. Berdasarkan estimasi, beberapa bank terutama

KBMI 4 masih memiliki penyangga (*buffer*) profitabilitas yang memadai untuk menjaga daya saing dan mempertahankan pertumbuhan kredit. Sebagian besar bank KBMI 4 berada pada kuadran I (Grafik 2.1.7), yang mengindikasikan profitabilitas yang tinggi (NIM dan ROA di atas ambang batas) dan pertumbuhan kredit yang tinggi.⁴

Sebagai alternatif kredit bank, pembiayaan IKNB tumbuh positif meskipun relatif melambat. Pembiayaan tumbuh sebesar 9,96% (yoy) pada Mei 2024, turun dari 13,74% (yoy) pada Mei 2023 (Tabel 2.1.2). Sumber pertumbuhan pembiayaan terutama berasal dari PP. Sejalan dengan perkembangan KK bank untuk KKB, pembiayaan PP pada kendaraan bermotor mengalami pelemahan. Perlambatan pembiayaan juga terjadi pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sedangkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PP Infrastruktur), dan modal ventura (MV) mengalami penurunan pembiayaan. Di sisi lain, pembiayaan oleh pegadaian, *fintech lending*, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menunjukkan peningkatan pertumbuhan.

⁴ *Threshold* profitabilitas mencerminkan estimasi ambang batas preferensi NIM atau ROA perlu dipenuhi bank. Apabila realisasi NIM dan ROA berada di bawah ambang batas tersebut maka bank diperkirakan akan meningkatkan suku bunga kreditnya (untuk meningkatkan NIM dan ROA) yang kemudian dapat berimbas pada penurunan kredit.



Keterangan: Plot di atas menunjukkan estimasi level profitabilitas minimal yang dijaga bank untuk tetap menyalurkan kredit. Ukuran lingkaran menunjukkan besaran pertumbuhan kredit Juni 2024. Semakin ke kanan maka semakin besar *threshold* NIM atau *threshold* ROA-nya, sementara itu, semakin ke atas semakin besar pertumbuhan kreditnya.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.7. Threshold Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Kredit

Tabel 2.1.2. Pertumbuhan Pembiayaan oleh IKNB

Pertumbuhan (%,yoy)	2020	2021	2022	2023	2024				
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
PP (Neto)	-18,23	-1,49	14,18	13,23	13,07	11,73	12,17	10,82	11,21
PP Infra	17,27	13,80	12,57	-5,86	-2,66	-1,51	-2,08	-0,66	-1,85
MV (Neto)	5,69	19,58	12,04	-3,74	-8,50	-9,35	-10,18	-12,61	-11,96
LPEI	-7,63	-7,10	-0,39	-11,74	-11,00	-10,94	-9,54	-8,68	-6,21
PNM	24,32	46,62	18,73	9,31	9,44	7,65	7,87	3,91	6,06
Pergadaian	13,10	-7,59	13,56	14,56	17,48	17,03	16,74	20,45	21,33
SMF	11,95	-9,20	20,23	32,58	39,24	41,10	36,16	41,54	39,00
Fintech	16,43	95,05	71,09	16,67	18,40	21,98	21,85	24,16	25,44
IKNB	-8,50	2,89	14,98	8,66	9,59	9,22	9,48	9,37	9,96

Sumber: OJK, diolah

2.2

Permintaan Kredit Tetap Terjaga di Tengah Pengaruh Tekanan Global

Permintaan kredit korporasi terpengaruh kondisi ekonomi global. Penjualan korporasi mengalami kontraksi sebesar 2,34% (yoy) pada Juni 2024, terutama pada sektor pertanian dan pertambangan (Tabel 2.2.1). Penurunan ditengarai terkait dengan pelemahan permintaan eksternal yang tecermin pada penurunan harga-harga komoditas global. Profitabilitas sektoral mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan pelemahan *return on equity* (ROE). Investasi korporasi masih tumbuh positif, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal (*capital expenditure*, capex) korporasi tumbuh 7,02% (yoy) pada Juni 2024, melambat dari 16,46% (yoy) pada Juni 2023. Sejumlah sektor yang mengalami

peningkatan capex, yaitu sektor pertambangan, industri pengolahan, LGA, perdagangan, dan jasa dunia usaha, juga mengalami peningkatan realisasi kredit.

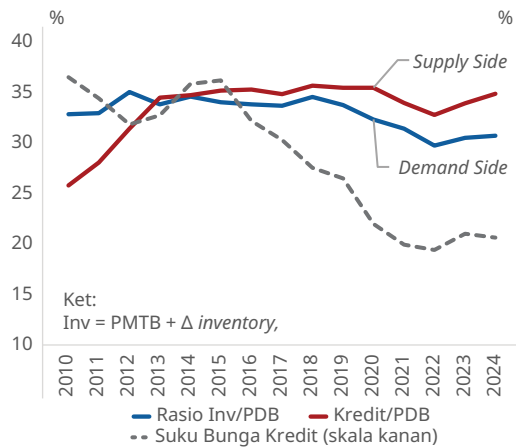
Permintaan intermediasi dari sektor korporasi didukung oleh penawaran kredit yang memadai dari sistem perbankan (Grafik 2.2.1).⁵ Di tengah *appetite* kredit bank yang positif, rasio investasi yang

⁵ Rasio kredit merupakan rasio kredit tahun berjalan terhadap PDB berdasarkan harga berlaku (PDB nominal). Untuk tahun 2024, rasio kredit dihitung dari posisi Juni 2024 dan PDB disetahunkan dengan menjumlahkan PDB nominal Triwulan III 2023 s.d. Triwulan II 2024. Rasio investasi dihitung dengan menjumlahkan nominal pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perubahan modal (*change in inventory*) terhadap PDB.

Tabel 2.2.1. Kinerja Penjualan, Profitabilitas, dan Capex Korporasi Tbk. menurut Sektor

Sektor	Pertumbuhan Penjualan (%, yoy)					Tren 2021 - 2024	Kontribusi Penjualan (%)	Return on Equity (%)					Tren 2021 - 2024	Pertumbuhan Capex (%, yoy)					Tren 2021 - 2024
	2021	2022	2023		2024			2021	2022	2023		2024		2021	2022	2023		2024	
	Des	Des	Jun	Des	Jun			Des	Des	Jun	Des	Jun		Des	Des	Jun	Des	Jun	
Pertanian	37,87	16,84	-0,51	-8,99	-4,89		-0,18	11,18	14,76	8,29	3,93	7,02		-9,08	31,72	20,89	10,08	0,01	
Pertambangan	44,96	67,53	32,39	-9,00	-19,92		-3,66	22,67	36,84	30,14	19,72	15,84		30,24	57,69	43,93	21,44	11,15	
Industri Pengolahan	18,31	11,99	4,42	-0,32	-0,46		-0,08	8,65	9,41	9,25	9,14	9,23		2,55	15,78	19,94	23,37	20,92	
LGA	4,47	19,32	16,42	6,98	3,61		0,06	9,40	9,49	8,47	8,69	9,24		7,23	-39,54	-24,64	1,13	15,57	
Konstruksi	8,94	14,74	11,26	11,24	10,73		0,27	1,97	1,98	2,15	1,48	1,19		59,19	-26,27	-18,27	15,15	3,35	
Perdagangan	17,71	26,37	16,15	5,34	4,20		0,88	10,89	18,66	18,75	15,37	15,25		-11,26	57,33	72,18	67,60	17,76	
Pengangkutan	5,25	20,04	16,88	7,90	6,77		0,93	-14,93	37,76	13,32	14,94	15,38		-3,95	-1,64	5,49	-0,88	-8,36	
Jasa Dunia Usaha	19,67	17,94	5,34	0,94	2,09		0,00	0,87	6,90	-6,06	1,63	4,02		-5,14	30,00	10,75	31,11	23,26	
Jasa Sosial	19,31	-2,48	-5,28	-6,26	0,90		-0,09	9,14	5,75	3,36	1,86	2,24		-12,22	11,82	5,15	4,04	3,88	
Agregat	20,00	22,68	11,88	-0,17	-2,34		1,74	7,81	15,59	11,93	10,06	9,63		5,65	10,15	16,46	16,52	7,02	

Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

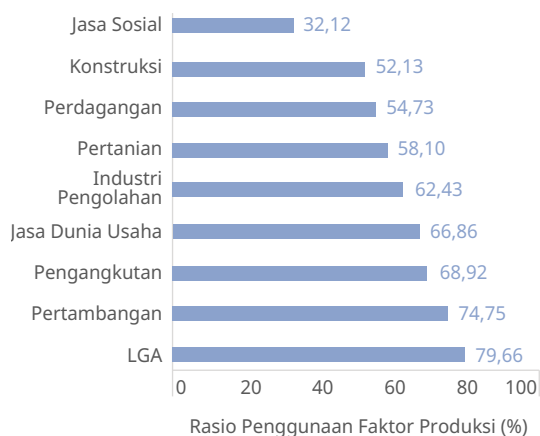


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.1. Perbandingan Rasio Investasi dan Rasio Kredit terhadap PDB

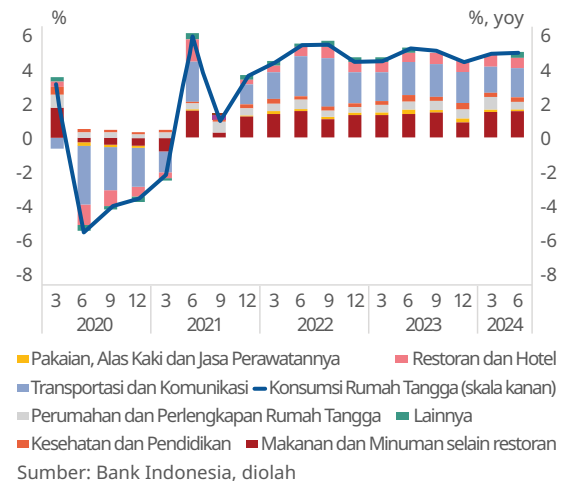
relatif berada di bawah rasio kredit mencerminkan potensi peningkatan pembiayaan ke depan. Pembiayaan diperkirakan akan meningkat jika terdapat faktor-faktor yang mendorong sisi permintaan, diantaranya potensi penurunan suku bunga. Sektor-sektor yang berpotensi mengalami akselerasi terutama sektor padat modal seperti sektor industri pengolahan, jasa dunia usaha, pengangkutan, pertambangan, dan LGA (Grafik 2.2.2).

Sementara itu, sisi permintaan kredit dari RT relatif terjaga didukung oleh optimisme konsumsi masyarakat. Konsumsi RT tumbuh 4,92% (yoy) pada Juni 2024 berkontribusi terutama oleh kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi, serta makanan dan minuman selain restoran (Grafik 2.2.3). Indeks ekspektasi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2.2. Rasio Penggunaan Faktor Produksi per Sektor

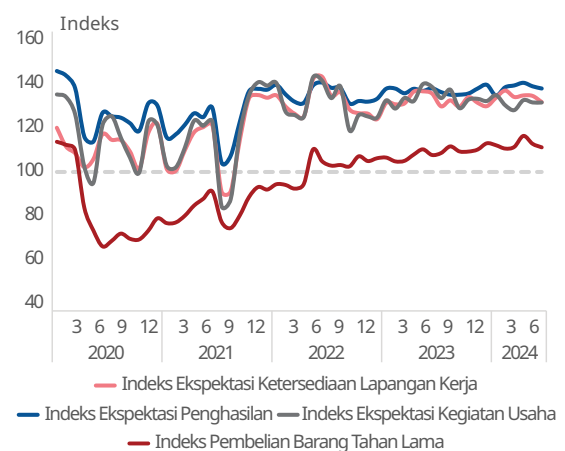


Grafik 2.2.3. Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Sektor

konsumen secara umum relatif berada dalam tren peningkatan pada Juni 2024, dibandingkan Juni 2023 (Grafik 2.2.4).

Sejalan dengan terjaganya konsumsi RT dan optimisme konsumen, permintaan KK RT mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan KK RT terlihat dari pertumbuhan KK RT yang tumbuh sebesar 10,72% (yoy) pada Juni 2024, meningkat dibandingkan 9,45% (yoy) pada Juni 2023 (Grafik 2.2.5). KK tumbuh 4,74% (ytd) pada Juni 2024 sehingga kinerja KK RT pada akhir 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan pada akhir 2023.

Pemintaan KK RT yang meningkat terutama terjadi pada segmen KPR. Hal ini tergambar dari kontribusi pertumbuhan KPR yang lebih

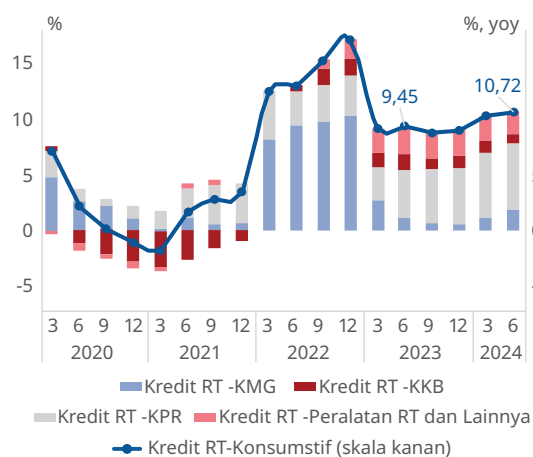


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.4. Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen

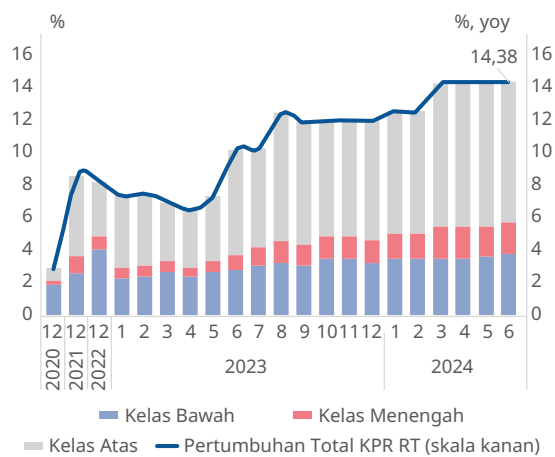
tinggi dibandingkan KK RT lainnya (43% dari total kredit konsumsi RT) (Grafik 2.2.5). Pertumbuhan KPR RT mencapai 14,38% (yoy) atau 6,20% (ytd), terakselerasi dibandingkan Juni 2023 sebesar 10,16% (yoy). Peningkatan KPR sejalan dengan tren penurunan suku bunga KPR RT akibat ketatnya persaingan suku bunga antar bank. Beberapa

bank juga menerapkan strategi promosi, seperti perpanjangan tenor KPR RT hingga 25 tahun, serta sistem *one day service* untuk mempercepat proses penyaluran KPR RT. RT kelas atas juga menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan KPR RT dengan kontribusi tertinggi dibandingkan kelas pendapatan lainnya (Grafik 2.2.6).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.5. Perkembangan KK Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit



Keterangan: Masyarakat Kelas Bawah = Penghasilan <Rp50jt/tahun; Menengah = Penghasilan Rp50 s.d. 100jt/tahun; Atas = Penghasilan >Rp100jt/tahun

Sumber: Bank Indonesia, diolah

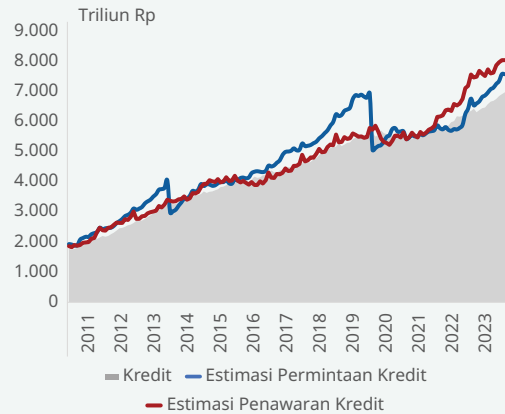
Grafik 2.2.6. Perkembangan KPR Rumah Tangga Berdasarkan Andil Kelompok Pendapatan

Boks 2.1

Kinerja Kredit Cenderung Ditentukan Sisi Permintaan

Realisasi intermediasi perbankan ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran kredit. Sisi permintaan dibentuk oleh kinerja nasabah-nasabah kredit. Pada umumnya permintaan kredit dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan dan rumah tangga. Sementara itu, sisi penawaran dipengaruhi oleh kapasitas bank dalam mengucurkan kredit. Bagi otoritas, identifikasi terhadap sisi pendorong kredit (permintaan atau penawaran) merupakan hal yang penting guna memberikan respons kebijakan yang tepat dan terukur. Salah satu cara untuk mengidentifikasi faktor penentu kredit apakah permintaan atau penawaran adalah dengan menggunakan analisis model *disequilibrium* kredit sebagaimana yang dikembangkan oleh Agung *et al.* (2001)⁶ serta Gosh dan Gosh (1998)⁷.

Berdasarkan pendekatan *disequilibrium*, realisasi kredit (L_t) ditentukan oleh permintaan kredit (L_t^D) atau penawaran kredit (L_t^S) terendah. Apabila $L_t^D > L_t^S$ maka realisasi kredit (L_t) lebih didorong oleh penawaran perbankan. Sebaliknya, apabila $L_t^S > L_t^D$ maka realisasi kredit lebih ditentukan oleh permintaan korporasi dan rumah tangga. Faktor-faktor penawaran kredit yang digunakan dalam analisis mencakup



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.1. Analisis *Disequilibrium* Penawaran dan Permintaan Kredit

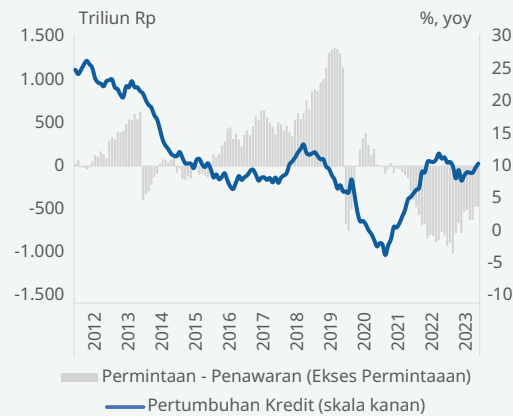
pembiayaan perbankan, suku bunga, dan risiko kredit. Sementara itu, faktor-faktor permintaan meliputi kinerja ekonomi (PDB), suku bunga, nilai tukar, dan tingkat harga. Kedua set persamaan diselesaikan menggunakan *maximum likelihood estimation* untuk menentukan kondisi *disequilibrium* kreditnya.

Berdasarkan hasil estimasi, sejak tahun 2022 realisasi kredit perbankan lebih ditentukan oleh sisi permintaan (Grafik B2.1.1 dan Grafik B2.1.2). Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari sisi penawaran, kredit bank relatif tersedia untuk mendukung kebutuhan dunia usaha. Sebagaimana diuraikan pada Bab 2, sisi penawaran kredit perbankan terjaga dengan baik. Bank memiliki likuiditas yang memadai untuk mendukung kapasitas intermediasi. Selain itu, kredit merupakan sumber laba utama dalam alokasi portofolio bank. Bank juga tidak semakin ketat dalam mengajukan

6 Agung, J., Kusmiarso, B., Pramono, B., Hutapea, E.G., Prasmuko, A., & Prastowo, N.J., (2001) *Credit Crunch in Indonesia in the Aftermath of the Crisis: Facts, Causes, and Policy Implications*, Financial Market Structure and Development Studies Division, Directorate Economic Research and Monetary Policy Bank Indonesia. ISBN 979-966800-X.

7 Gosh, A. and Gosh, S. (1998). East Asia in the Aftermath: Was there a crunch? *IMF Working Paper 1999/38*.

syarat kredit yang terindikasi pada ILR yang masih bergerak ke arah longgar. Realisasi kredit yang lebih ditentukan oleh sisi permintaan juga tidak menandakan permintaan kredit yang lemah. Melainkan, dengan ketersediaan dukungan kapasitas intermediasi perbankan, realisasi kredit perbankan akan meningkat apabila terjadi peningkatan sisi permintaan. Dengan kata lain, sejalan dengan prospek perekonomian yang lebih cerah ke depan, realisasi kredit perbankan diperkirakan akan meningkat.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.2. Ekses Permintaan Kredit



BANK INDONESIA



BAB 3

KETAHANAN SISTEM KEUANGAN



Peningkatan intermediasi keuangan didukung oleh terjaganya kemampuan bayar korporasi dan RT di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi. Pelemahan nilai tukar berdampak terbatas pada kinerja profitabilitas dan kemampuan membayar korporasi. Tingkat profitabilitas yang masih tinggi menjadi buffer penurunan net profit margin pada korporasi berorientasi impor sehingga kemampuan membayarnya dapat terjaga di tengah pelemahan nilai tukar. Kenaikan suku bunga juga berdampak terbatas pada profitabilitas dan penurunan kemampuan membayar korporasi di mayoritas sektor didukung strategi korporasi mengurangi pinjaman luar negeri. Di sisi RT, kenaikan suku bunga berdampak terbatas pada penurunan repayment capacity RT di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif masih stabil. Namun perlu dicermati keberlanjutan kemampuan membayar utang RT kelas bawah di tengah tingkat penghasilan yang belum pulih ke kondisi prapandemi. Secara keseluruhan, kemampuan membayar korporasi dan RT yang masih terjaga berkontribusi positif terhadap risiko kredit perbankan dan risiko pembiayaan IKNB di semester I 2024.

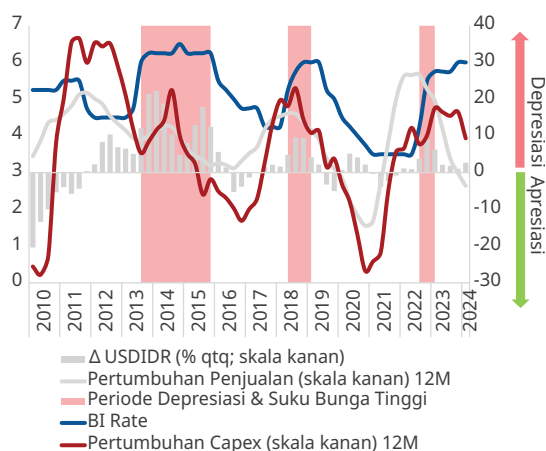
Ketahanan perbankan dan IKNB secara umum terjaga dan menopang stabilitas sistem keuangan.

Perbankan dan IKNB berdaya tahan menghadapi peningkatan potensi risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas akibat meningkatnya tekanan nilai tukar dan kondisi suku bunga tinggi yang persisten. Hasil stress test mengindikasikan kecukupan modal dan likuiditas perbankan Indonesia yang tinggi mampu menyerap kerugian yang berpotensi timbul jika kondisi makroekonomi mengalami pemburukan yang dalam (adverse macro scenario). Stress test terhadap IKNB juga mengindikasikan ketahanan permodalan IKNB yang baik. Risiko interconnectedness IKNB dan perbankan masih terbatas dikarenakan eksposur ke perbankan yang masih rendah. Secara umum ketahanan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kemampuan Membayar Utang Korporasi Terjaga Di Tengah Ketidakpastian Global

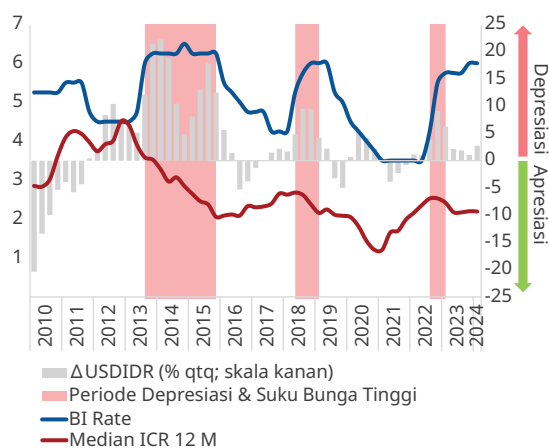
Depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga memengaruhi kinerja dan kemampuan bayar korporasi. Berdasarkan *event analysis* data 2010-2024, kinerja penjualan dan capex korporasi mengalami perlambatan pada periode terjadinya depresiasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga (Grafik 3.1.1). Perlambatan penjualan pada periode tersebut menyebabkan penurunan *profit margin* yang menurunkan kemampuan bayar korporasi, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator *interest coverage ratio* (ICR) yang menurun pada Grafik 3.1.2. Namun, kemampuan bayar korporasi di semester I 2024 relatif lebih kuat dibandingkan dengan periode pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga di periode 2013-2015 dan 2018-2019. Hal tersebut ditunjukkan oleh penurunan nilai ICR yang lebih landai dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan korporasi dalam memitigasi dampak pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga semakin baik dari waktu ke waktu.

Dampak pelemahan nilai tukar terhadap kinerja dan kemampuan bayar korporasi terutama ditransmisikan melalui *trade channel* dengan dampak berbeda pada korporasi yang orientasi bisnisnya berbasis impor dan yang



Sumber: Bloomberg, BEI, dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.1. Penjualan dan Capex Korporasi Tahun 2010 s.d. 2024

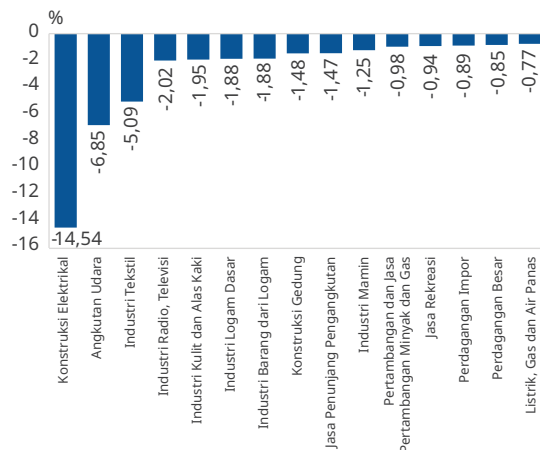


Sumber: Bloomberg, BEI, dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.2. Kemampuan Bayar Korporasi Tahun 2010 s.d. 2024

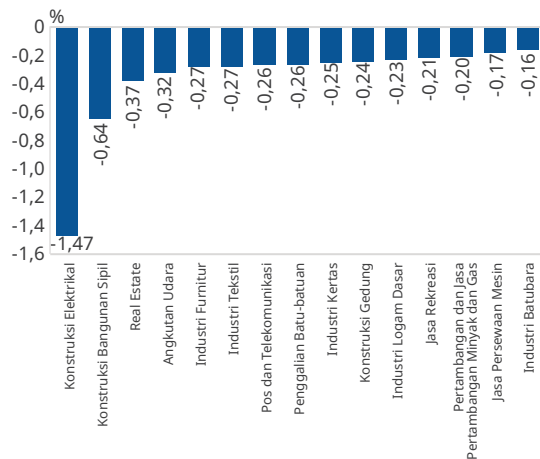
berbasis ekspor. Analisis empiris⁸ menunjukkan perbedaan dampak nilai tukar kepada korporasi dengan ekspor tinggi dan impor tinggi. Depresiasi nilai tukar cenderung menguntungkan korporasi eksportir karena meningkatkan nilai penjualan dan *net income* sehingga profitabilitas korporasi eksportir meningkat. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar cenderung meningkatkan *input cost* yang berdampak pada turunnya *net income* dan profitabilitas sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar korporasi importir. Secara sektoral, pelemahan nilai tukar berdampak paling signifikan pada penurunan *net profit margin* (NPM) korporasi di sektor konstruksi, angkutan udara, dan industri tekstil (Grafik 3.1.3). Sementara itu, kenaikan suku bunga berdampak pada NPM korporasi net eksportir maupun net importir. Hal ini dikarenakan kenaikan suku bunga akan meningkatkan *interest expenses* dari eksposur pembiayaan eksternal korporasi, yang pada gilirannya menurunkan profitabilitas korporasi. Dampak kenaikan suku bunga pada penurunan NPM korporasi paling besar terjadi di sektor konstruksi (Grafik 3.1.4).

⁸ Analisis agregat menggunakan data 628 korporasi terbuka pada triwulan I 2010 s.d triwulan I 2024 yang dibandingkan berdasarkan orientasi penjualannya (ekspor tinggi atau impor tinggi) menggunakan *Vector Error Correction Model* (VECM).



Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia, diolah

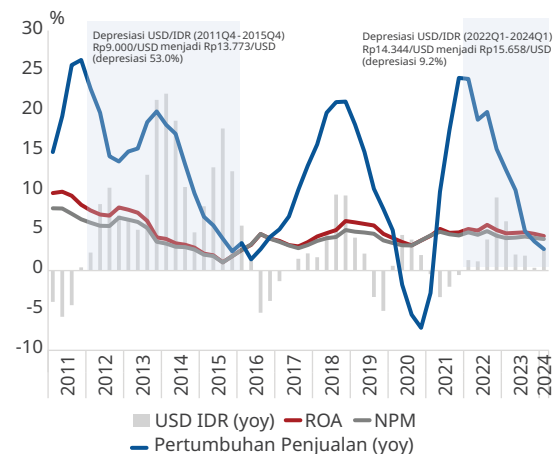
Grafik 3.1.3. Dampak Pelemahan Nilai Tukar Terhadap Perubahan NPM



Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.4. Dampak Kenaikan Suku Bunga Terhadap Perubahan NPM

Risiko kredit dari korporasi tanpa ekspor atau ekspor rendah dan impor tinggi masih terjaga di tengah pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada korporasi terbuka, korporasi dengan karakteristik tanpa ekspor atau ekspor rendah dan impor tinggi memiliki eksposur pada kredit yang relatif rendah (9,9%) dengan rata-rata risiko kredit yang juga rendah (LaR 5,4% dan NPL 0,12%). Selain itu, kelompok korporasi tersebut memiliki rasio profitabilitas (ROA) yang masih tinggi. Pelemahan nilai tukar terindikasi berdampak terbatas terhadap NPM yang selanjutnya membantu menjaga kemampuan bayar kelompok korporasi tersebut (Grafik 3.1.5). Secara umum, kualitas kredit terjaga terutama pada korporasi besar (kredit > USD 1 miliar) (Tabel 3.1.1)



Sumber: Bloomberg dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.1.5. Kinerja Sales dan Profitabilitas Korporasi Tanpa Ekspor atau Ekspor Rendah dan Impor Tinggi

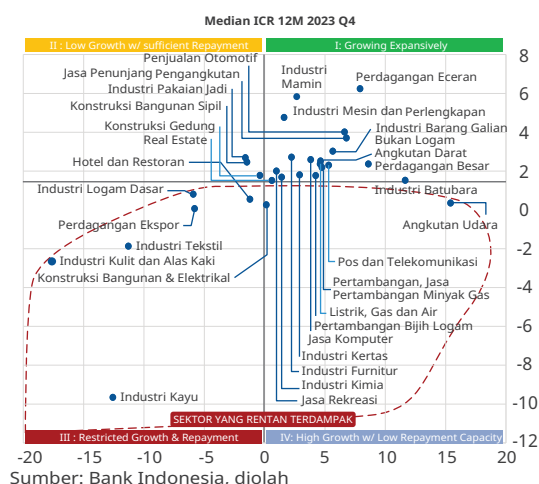
Tabel 3.1.1. Kualitas Kredit Korporasi Tanpa Ekspor/Ekspor Rendah dan Impor Rendah Berdasarkan Size Kredit

Klasifikasi Kredit	LaR (%)			NPL (%)		
	Des-19	Sep-21	Apr-24	Des-19	Sep-21	Apr-24
Kredit > USD 1 Milyar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredit USD 100jt - 1 Milyar	1,7	7,3	5,4	0,0	0,0	0,0
Kredit USD 10jt - 100jt	7,0	15,1	5,3	0,2	0,8	0,0
Kredit USD < 10jt	3,5	9,1	2,3	0,7	1,8	0,4
Total	3,9	9,9	3,9	0,3	0,9	0,1

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara sektoral, terdapat beberapa subsektor yang terindikasi rentan terhadap pelemahan nilai tukar dan peningkatan beban bunga seiring kenaikan suku bunga sebagaimana tecermin dari *debt repayment capacity*, yang diproksikan dengan *Interest Coverage Ratio* yang rendah. Sektor-sektor tersebut di antaranya mencakup subsektor konstruksi bangunan elektrik dan komunikasi, industri kulit dan alas kaki, industri tekstil, angkutan udara, dan industri kayu (kuadran 3 dan 4, Grafik 3.1.6). Secara umum, penurunan NPM korporasi yang rentan terhadap pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga, berdampak terbatas pada kenaikan NPL perbankan sebagaimana tecermin dari hasil *stress test* risiko kredit korporasi.

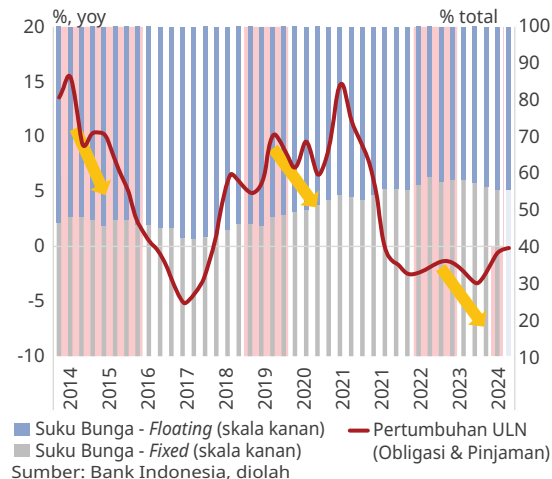
Dampak kenaikan *yield* surat-surat berharga diperkirakan relatif terbatas terhadap kinerja solvabilitas dan likuiditas korporasi. Hal ini dikarenakan korporasi pemegang surat berharga, terutama surat berharga negara (SBN), memiliki likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga tidak berpotensi menjual SBN ketika harga turun. Di samping itu, mayoritas korporasi menerbitkan obligasi dengan suku bunga *fixed rate* sehingga eksposur terhadap risiko kenaikan suku bunga relatif terbatas.



Grafik 3.1.6. Identifikasi Subsektor yang Rentan Terdampak Pelemahan Nilai Tukar dan Kenaikan Suku Bunga

Strategi korporasi yang mengurangi eksposur ULN ditengarai membatasi risiko *repricing* ULN korporasi pada kondisi pelemahan nilai tukar dan kenaikan suku bunga. ULN yang jatuh tempo pada tahun 2024 mayoritas merupakan ULN dengan suku bunga tetap (pangsa 66%). Hal tersebut memoderasi dampak dari kenaikan suku bunga. Korporasi cenderung mengurangi eksposur terhadap instrumen suku bunga mengambang terutama pada periode tekanan suku bunga dan nilai tukar sebagaimana tampak pada Grafik 3.1.7. Selain itu, korporasi juga menjaga level ULN sesuai dengan ketentuan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non Bank⁹.

9 Porsi korporasi yang memenuhi ketentuan KPPK tinggi, yaitu di atas 85% terhadap total keseluruhan korporasi yang wajib memenuhi ketentuan KPPK. Berdasarkan KPPK, rasio lindung nilai minimum adalah 25% dari selisih negatif antara aset valas dan kewajiban valas yang akan jatuh waktu (i) sampai dengan tiga bulan ke depan sejak akhir triwulan; (ii) lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan ke depan sejak akhir triwulan.



Grafik 3.1.7. Perkembangan ULN dan Suku Bunga pada Periode Tekanan

3.2

Kemampuan Membayar Utang Rumah Tangga Terjaga Di Tengah Ketidakpastian Global

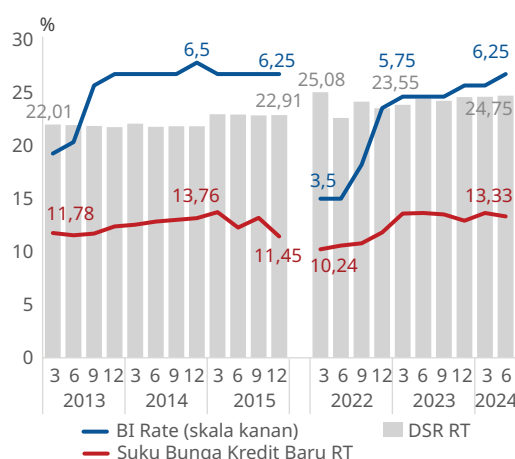
Secara agregat, dampak kenaikan suku bunga relatif terbatas terhadap kemampuan bayar RT. Berdasarkan analisis data historis, kenaikan BI Rate dari 4,50% menjadi 6,50% pada periode terjadinya Taper Tantrum, menyebabkan kenaikan suku bunga kredit baru RT serta peningkatan DSR RT. Peningkatan DSR terjadi terbatas dari 22,01% pada 2013 menjadi 22,91% pada akhir 2015 (Grafik 3.2.1). Sementara itu, sepanjang periode semester I 2022 hingga semester I 2024, dampak peningkatan suku bunga acuan BI terhadap peningkatan suku bunga kredit baru RT dan DSR RT lebih terbatas. Kondisi perekonomian domestik yang relatif stabil membantu memoderasi dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan kemampuan bayar RT.

Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga menjaga tingkat harga aset RT di semester I 2024 tetap stabil. Hasil studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan penghasilan RT¹⁰ merupakan faktor utama yang mendorong kenaikan harga

properti¹¹. Sementara itu, kenaikan suku bunga tidak berdampak signifikan terhadap penurunan harga properti (Grafik 3.2.2). Pelemahan nilai tukar Rupiah juga ditengarai berdampak terbatas terhadap harga properti mengingat bahan bangunan mayoritas sudah menggunakan material produksi dalam negeri. Secara umum, kenaikan harga properti berdampak positif terhadap terjaganya kemampuan membayar RT.

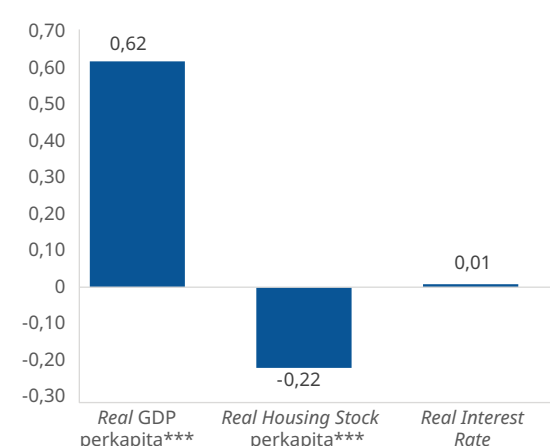
Penghasilan RT masih meningkat namun dengan tren pemulihan yang berbeda antar kelas penghasilan. Pada semester I 2024, indeks penghasilan RT meningkat menjadi 118,61%, lebih tinggi dibandingkan dengan semester II 2023 sebesar 117,59%. Berdasarkan kelas penghasilannya, penghasilan RT kelas menengah atas telah kembali pulih di atas level prapandemi, sementara RT kelas bawah belum pulih ke level prapandemi (Grafik 3.2.3). Kondisi ini turut disebabkan oleh struktur Tenaga Kerja (TK) Indonesia yang masih didominasi oleh TK informal (59%) dengan *path* pemulihan yang

10 Diproksi dengan rasio PDB/kapita

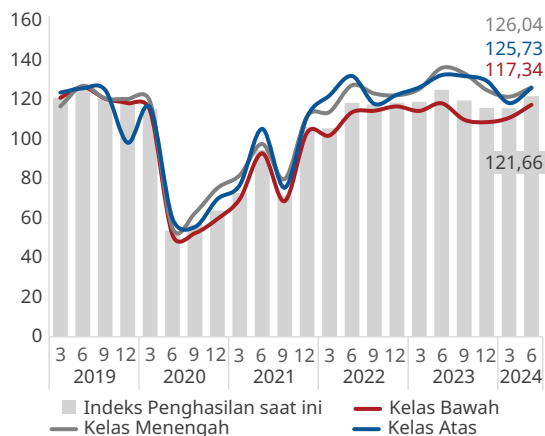


Grafik 3.2.1. Perkembangan DSR Rumah Tangga dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga

11 Merupakan proksi dari nilai aset atau kekayaan RT



Grafik 3.2.2. Determinan Harga Properti Residensial

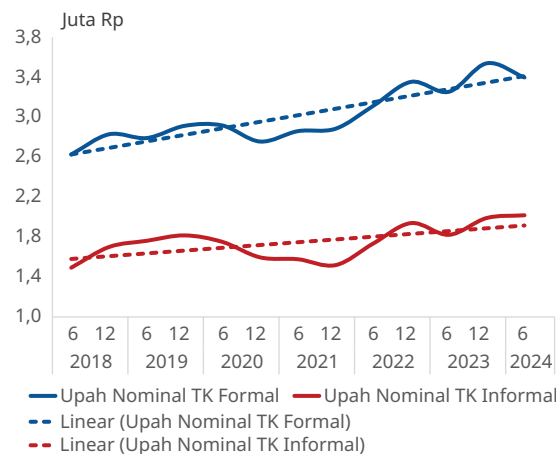


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.3. Perkembangan Indeks Penghasilan Saat Ini

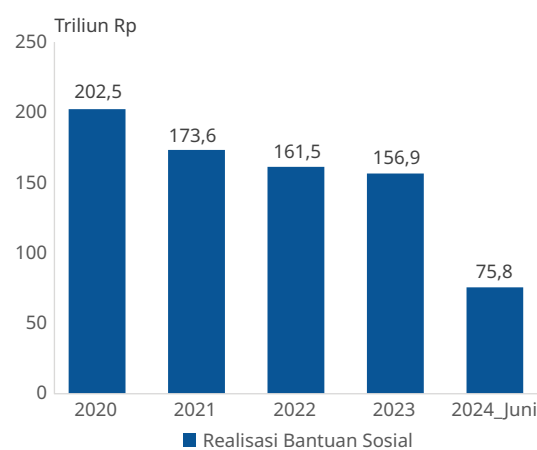
belum kembali seperti kondisi prapandemi (Grafik 3.2.4). Secara rata-rata, TK informal memiliki upah yang lebih rendah dengan tren peningkatan lebih terbatas dibandingkan dengan TK Formal (Grafik 3.2.5). Selain itu, realisasi anggaran bantuan sosial cenderung menurun sejak periode Covid-19 dengan realisasi Juni 2024 yang kurang dari 50% target penyaluran sehingga turut mendorong tertahannya indeks penghasilan kelas bawah (Grafik 3.2.6).

Penghasilan/pendapatan dan kemampuan membayar RT yang masih terjaga mendukung risiko kredit RT yang terkendali. Hal ini tecermin dari DSR RT yang tercatat naik terbatas dari 24,61% pada semester II 2023 menjadi 24,75% pada semester I 2024 (Grafik 3.2.7). Sejalan dengan



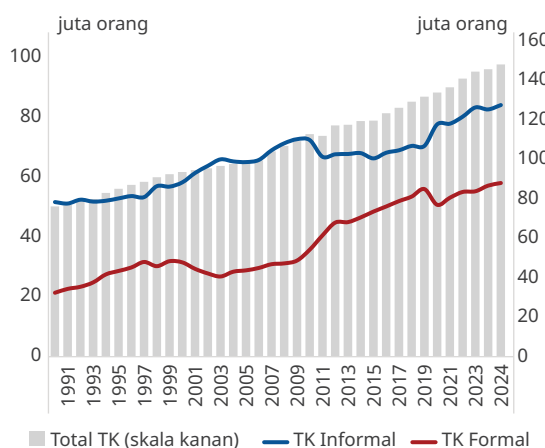
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.5. Perkembangan Upah TK Formal dan Informal



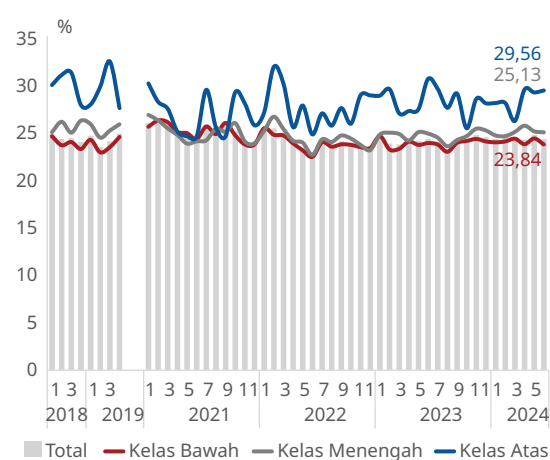
Sumber: Kemenkeu, diolah

Grafik 3.2.6. Perkembangan Realisasi Bantuan Sosial



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2.4. Perkembangan Jumlah TK Formal dan Informal

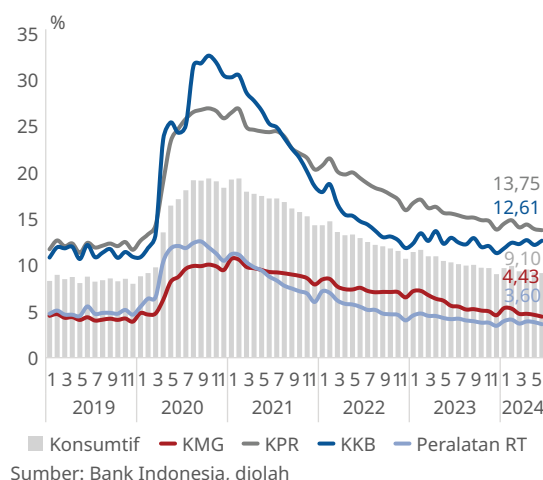


Sumber: Bank Indonesia, diolah

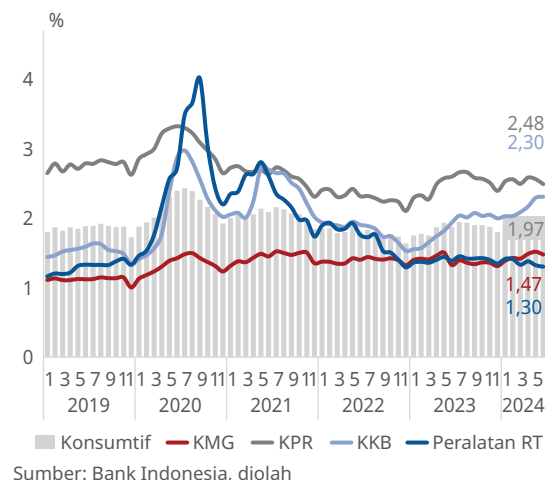
Grafik 3.2.7. DSR Rumah Tangga menurut Tingkat Pengeluaran

peningkatan terbatas DSR RT, LaR dan NPL RT terjaga pada tingkat yang rendah, meskipun terjadi sedikit peningkatan pada semester I 2024. LaR kredit RT sedikit meningkat dari 8,99% pada semester II 2023 menjadi 9,10% pada semester I 2024, namun membaik dibandingkan dengan semester I 2023 yang sebesar 10,26% (Grafik 3.2.8). Sementara itu, NPL kredit RT sebesar 1,97% pada semester I 2024, relatif meningkat dibandingkan dengan semester I dan semester II 2023, masing-

masing sebesar 1,87% dan 1,80% (Grafik 3.2.9). Jika ditinjau per kelas pendapatan, RT kelas atas memiliki DSR dan risiko kredit paling tinggi dibandingkan dengan kelas menengah dan bawah terutama pada segmen KPR. Namun, penurunan kemampuan bayar RT kelas atas diperkirakan dapat termitigasi oleh nilai asetnya yang masih berpotensi meningkat. Di sisi lain, peningkatan penghasilan RT kelas bawah yang tertahan berpotensi berdampak pada keberlanjutan kemampuan membayar utang RT kelas bawah.



Grafik 3.2.8. Perkembangan LaR Kredit Rumah Tangga

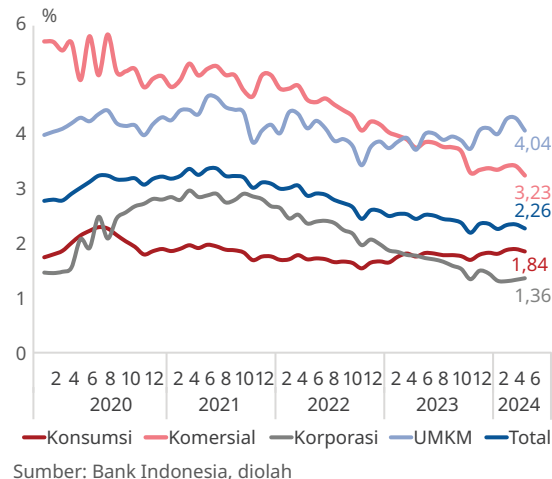


Grafik 3.2.9. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

3.3

Ketahanan Perbankan dan IKNB yang Kuat Menopang Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Di Tengah Ketidakpastian Global

Repayment capacity korporasi dan RT yang masih baik mendukung terjaganya risiko kredit perbankan pada Semester I 2024. Rasio *Loan at Risk* (LaR) dalam tren menurun dan NPL terjaga rendah di bawah ambang batas 5%. Pada Juni 2024, NPL perbankan tercatat sebesar 2,26%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan semester II 2023 sebesar 2,19%, namun sudah lebih rendah dibandingkan dengan posisi semester I 2023 (Grafik 3.3.1). Kenaikan NPL perbankan terutama dikarenakan penurunan kualitas kredit segmen UMKM yang mencapai 4,04%. Meningkatnya risiko kredit UMKM antara lain disebabkan oleh penyesuaian kualitas kredit setelah berakhirnya



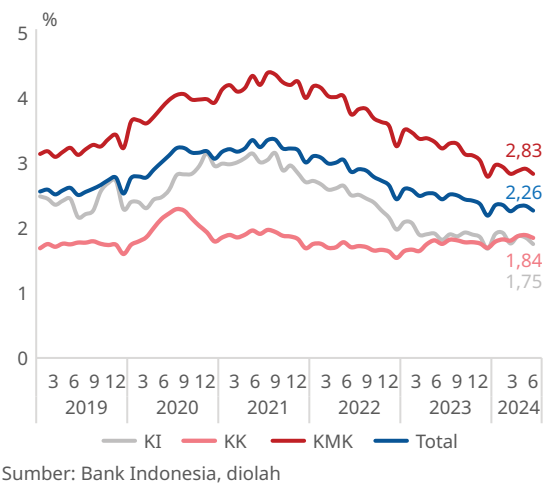
Grafik 3.3.1. Perkembangan NPL per Segmen

kebijakan relaksasi restrukturisasi Covid-19, dampak El Nino terutama pada sektor pertanian, dan pelemahan kinerja UMKM.

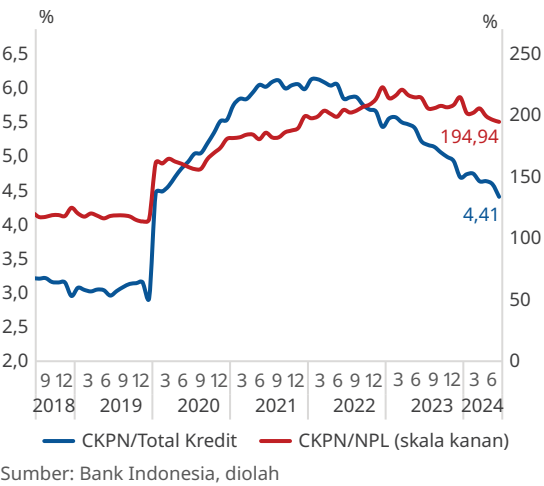
Rasio NPL juga tercatat masih stabil di seluruh jenis penggunaan dan mayoritas sektor ekonomi. Pada semester I 2024, NPL paling tinggi tercatat pada KMK, yaitu sebesar 2,83% terutama karena penurunan kualitas kredit segmen UMKM. Sementara itu, risiko segmen KI dan KK lebih rendah, masing-masing sebesar 1,75% dan 1,84% (Grafik 3.3.2). Secara sektoral, NPL sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan memiliki rasio NPL yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 3,31%, 3,74%, dan 3,41% (Tabel 3.3.1). Risiko kredit yang lebih tinggi pada beberapa sektor tersebut

dapat termitigasi oleh pembentukan CKPN yang memadai. Adapun penurunan rasio CKPN di semester I 2024 dibandingkan dengan semester II 2023 mengindikasikan prospek risiko kredit yang tetap terjaga (Grafik 3.3.3).

Sementara itu, risiko konsentrasi yang bersumber dari pertumbuhan kredit bank KBMI 3 dan 4 yang lebih akseleratif juga relatif terbatas. Pada periode Juni 2024, kelompok KBMI 3 dan 4 mendominasi pangsa kredit perbankan, masing-masing sebesar 25,63% dan 52,31%. Namun demikian, risiko konsentrasi dari dominasi kelompok bank besar tersebut relatif terbatas karena masih didukung risiko kredit yang lebih rendah, terutama pada KBMI 4 dibanding



Grafik 3.3.2. Perkembangan NPL per Jenis Penggunaan



Grafik 3.3.3. Perkembangan Rasio CKPN terhadap NPL dan Total Kredit

Tabel 3.3.1. Perkembangan NPL per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	NPL (Triliun Rp)			Total Kredit (Triliun Rp)			NPL (%)			Δ Des-23 & Jun-24		
	Jun-23	Des-23	Jun-24	Jun-23	Des-23	Jun-24	Jun-23	Des-23	Jun-24	Nominal NPL	Nominal Kredit	Rasio NPL
1. Pertanian	10,03	10,37	11,37	493,86	518,46	534,93	2,03	2,00	2,13	1,00	16,47	0,12
2. Pertambangan	6,11	3,56	5,05	253,17	290,47	326,44	2,41	1,23	1,55	1,48	35,97	0,32
3. Industri Pengolahan	38,92	36,38	38,58	1060,25	1117,34	1165,66	3,67	3,26	3,31	2,20	48,32	0,05
4. Listrik, gas, air	0,72	0,66	0,42	157,30	183,96	201,75	0,45	0,36	0,21	-0,25	17,79	-0,15
5. Konstruksi	14,67	14,28	14,73	403,11	395,10	393,44	3,64	3,62	3,74	0,44	-1,66	0,13
6. Perdagangan	43,14	41,10	45,20	1206,25	1269,95	1326,06	3,58	3,24	3,41	4,10	56,11	0,17
7. Pengangkutan	3,76	3,77	3,99	343,19	373,42	412,01	1,10	1,01	0,97	0,22	38,60	-0,04
8. Jasa Dunia Usaha	9,19	8,22	8,70	668,70	725,74	797,45	1,38	1,13	1,09	0,47	71,72	-0,04
9. Jasa Sosial	3,64	3,93	3,86	241,91	282,16	294,97	1,50	1,39	1,31	-0,07	12,81	-0,08
10. Lain-lain	32,03	32,69	37,34	1828,27	1933,66	2025,69	1,75	1,69	1,84	4,65	92,04	0,15
Total	162,20	154,98	169,23	6656,02	7090,24	7478,40	2,44	2,19	2,26	14,26	388,16	0,08

Sumber: Bank Indonesia, diolah

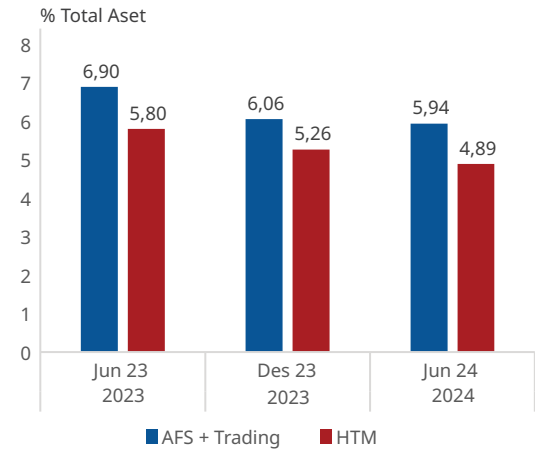
kelompok bank lainnya. Adapun LaR pada KBMI 4 yang menjadi motor pertumbuhan kredit pada Juni 2024 mencapai 9,72%, lebih rendah dari LaR agregat perbankan sebesar 10,51% (Tabel 3.3.2).

Risiko pasar perbankan yang berasal dari kenaikan yield SBN relatif terbatas sejalan dengan berkurangnya kepemilikan SBN perbankan. Pada Juni 2024, kepemilikan SBN perbankan pada kategori *Available for Sales* (AFS) dan *Trading* yang berpotensi menimbulkan *mark-to-market* terindikasi dalam tren menurun (Grafik 3.3.4). Sementara itu, risiko pasar perbankan dari pelemahan nilai tukar juga relatif terbatas. Di tengah pelemahan Rupiah, rasio posisi devisa neto (PDN) terhadap modal perbankan sebesar 1,53% yang berada pada *long position*¹² per Juni 2024 berdampak positif pada profitabilitas perbankan.

Likuiditas perbankan masih memadai untuk mendukung peningkatan penyaluran kredit. Rasio AL/DPK (Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga) tercatat sebesar 25,37% pada Juni 2024, menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 28,73%. Penurunan terutama terjadi pada kelompok bank KBMI 4 (Grafik 3.3.5). Meski menurun, rasio AL/DPK masih berada di atas ambang batas 10% dan di atas rata-rata AL/DPK prapandemi¹³ (20,66%). Penurunan AL/

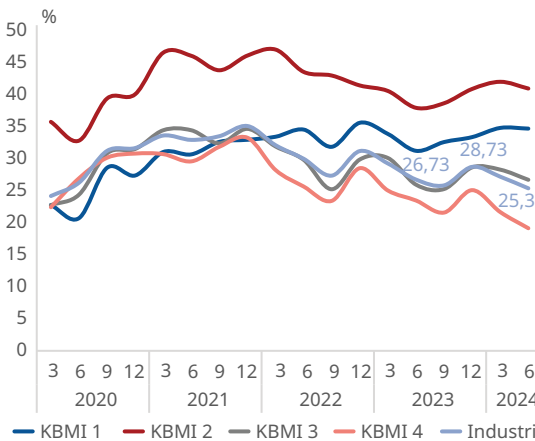
12 *Long* PDN merupakan posisi dimana perbankan memiliki aset valas yang lebih tinggi dari liabilitas valas

13 Rata-rata AL/DPK perbankan periode prapandemi (tahun 2012 – 2019) mencerminkan tingkat likuiditas yang dijaga perbankan pada periode normal.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.4. Kepemilikan SBN Pada Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.5. AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel 3.3.2. NPL dan LaR per Kelompok Bank

Kelompok Bank	Pangsa Kredit (%)			Rasio NPL (%)			Rasio LaR (%)		
	Jun-23	Des-23	Jun-24	Jun-23	Des-23	Jun-24	Jun-23	Des-23	Jun-24
KBMI 1	10,62	10,53	10,29	2,92	2,74	2,98	15,97	13,30	12,19
KBMI 2	12,11	11,84	11,77	2,18	2,00	2,16	11,94	9,62	9,91
KBMI 3	26,15	25,88	25,63	2,71	2,35	2,33	13,37	11,69	11,74
KBMI 4	51,12	51,75	52,31	2,26	2,03	2,11	12,78	10,39	9,72
Total	100,00	100,00	100,00	2,44	2,19	2,26	13,17	10,94	10,51

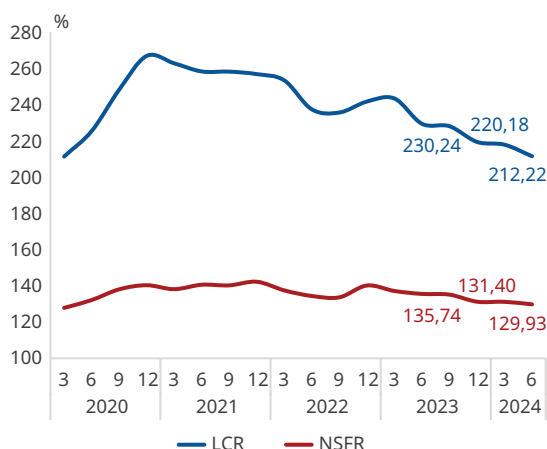
Sumber: Bank Indonesia, diolah

DPK tersebut mencerminkan normalisasi tingkat AL¹⁴ perbankan pascapandemi sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit.

Ketahanan likuiditas perbankan juga terindikasi pada rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang yang masih di atas ambang batas. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan pada Juni 2024 tercatat sebesar 212,22%, menurun dari 220,18% pada Desember 2023. Selain itu, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) juga mengalami penurunan dari 131,40% pada Desember 2023, menjadi 129,33% pada Juni 2024 (Grafik 3.3.6). Meskipun demikian, kedua rasio tersebut masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh otoritas sebesar 100%. Hal ini mencerminkan kemampuan perbankan dalam mengelola pemenuhan kewajiban jangka pendek dan panjangnya.

Profitabilitas bank termoderasi sejalan dengan upaya bank menahan laju kenaikan suku bunga kredit di tengah kenaikan suku bunga dana. Pada semester I 2024, ROA dan NIM perbankan masing-masing di 2,66% dan 4,57%, sedikit turun dibandingkan dengan posisi semester I 2023 yang masing-masing sebesar 2,73% dan 4,80%. Penurunan margin suku bunga berkontribusi

14 Alat Likuid (AL) dihitung dengan formula berikut: (Kas + Penempatan pada BI + Surat Berharga Pemerintah) - (Kewajiban GWM + Kewajiban PLM + Kewajiban RIM), dengan nilai ambang batas (*threshold*) rasio likuiditas (AL/DPK) sebesar 10%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

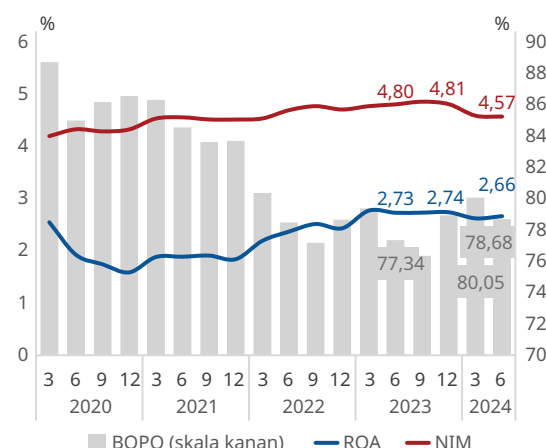
Grafik 3.3.6. Perkembangan LCR dan NSFR

terhadap kenaikan rasio BOPO dari 77,35% pada Juni 2023 menjadi 78,68% pada Juni 2024. Namun demikian, bila dibandingkan dengan rata-rata prapandemi¹⁵, kinerja ROA, NIM, dan BOPO semester I 2024 perbankan masih lebih baik (Grafik 3.3.7).

Risiko perbankan dari eksposur ULN relatif terbatas sejalan kontraksi pertumbuhan ULN dibandingkan dengan alternatif sumber pendanaan lain. Pertumbuhan ULN Juni 2024 berkontraksi sebesar 0,53%¹⁶ (yoy) (Grafik 3.3.8). Saat ini, ULN perbankan didominasi oleh tenor

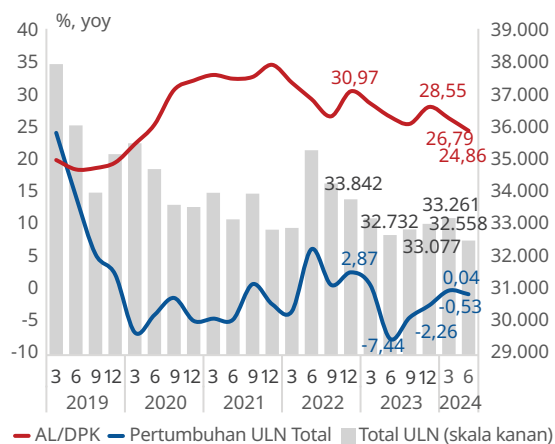
15 Rata-rata ROA, NIM, dan BOPO periode prapandemi merupakan rata-rata nilai setiap triwulan pada periode 2012-2019. Rata-rata ROA, NIM dan BOPO masing-masing adalah 2,63%, 4,91%, 78,79%.

16 Angka ini sudah mengeluarkan pengaruh nilai tukar



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.7. ROA, NIM dan BOPO Perbankan



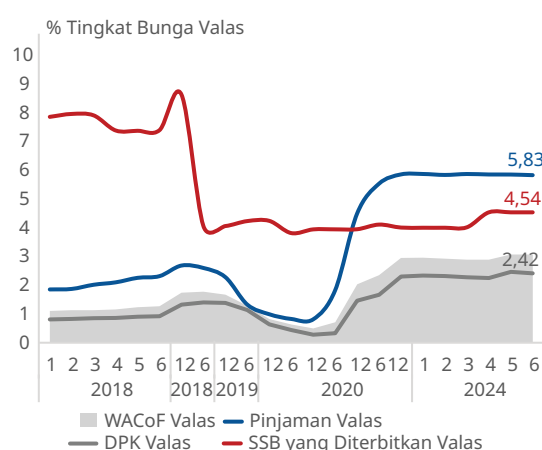
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.8. Perkembangan ULN Perbankan

jangka pendek dan digunakan untuk pembiayaan jangka pendek¹⁷ sehingga risiko *maturity mismatch* perbankan relatif terbatas. ULN jatuh tempo di tahun 2024 didominasi oleh ULN jangka pendek (98,71%), sedangkan ULN jangka panjang hanya sekitar 18,72%. Selanjutnya, tingkat suku bunga pinjaman valas yang lebih mahal cenderung menahan pertumbuhan pinjaman valas. Tingkat suku bunga pinjaman valas mencapai 5% di atas *weighted average cost of fund* valas per semester I 2024 (Grafik 3.3.9). Risiko ULN perbankan yang terbatas turut didukung oleh upaya perbankan dalam memitigasi risiko, kecukupan modal dan likuiditas yang memadai. Hasil perhitungan simulasi pelemahan nilai tukar menunjukkan perbankan masih memiliki ketahanan likuiditas yang kuat untuk membayar potensi peningkatan kewajiban ULN jatuh tempo.

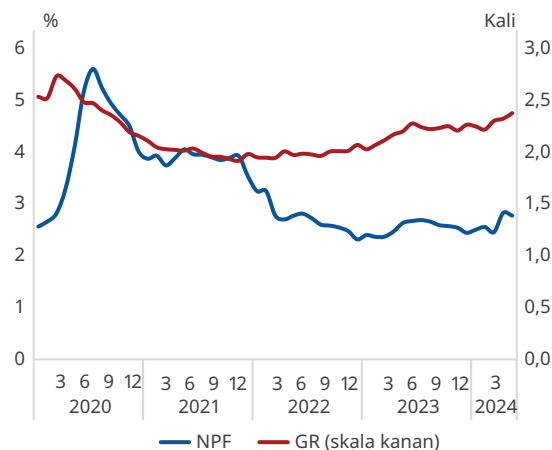
Sejalan dengan relatif terjaganya kemampuan membayar korporasi dan RT, kualitas pembiayaan PP dan *fintech lending* tetap terjaga sehingga mendukung terjaganya rasio permodalan. Risiko pembiayaan PP yang relatif rendah dengan NPF sebesar 2,77% pada Mei 2024, mendukung kuatnya rasio permodalan PP sebagaimana ditunjukkan oleh *gearing ratio* (GR) yang jauh di bawah ambang batas 10% (Grafik 3.3.10). Kemampuan membayar RT masih

17 Pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan perdagangan pembiayaan perdagangan (*trade financing*) ekspor impor, *Letter of Credit* (L/C), dan bank garansi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

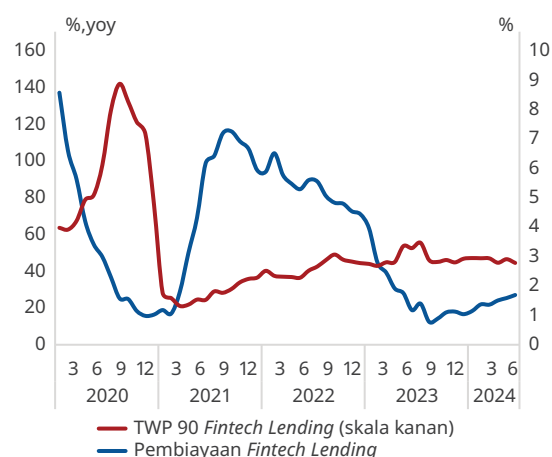
Grafik 3.3.9. Perkembangan Suku Bunga Valas



Sumber: OJK, diolah

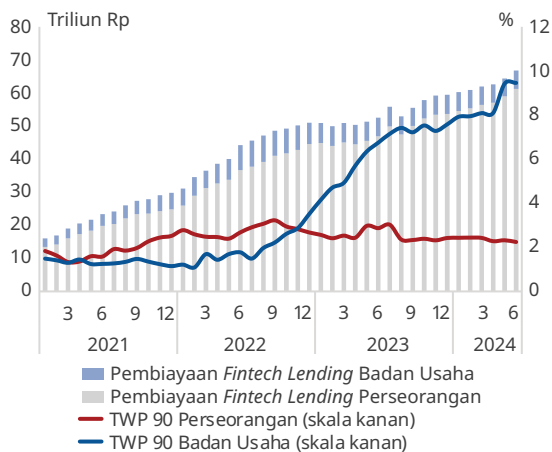
Grafik 3.3.10. Perkembangan NPF dan GR PP

baik tercermin pada TWP 90 perseorangan dari pembiayaan *fintech lending* dalam batas aman di bawah 5% dan cenderung menurun (Grafik 3.3.11). Sementara itu, pemburukan TWP 90 Badan Usaha bersumber dari model bisnis yang terkonsentrasi di sektor pertanian dan proses *credit scoring* berbasis daring yang dinilai kurang pruden (Grafik 3.3.12). Sebagai respons, *fintech lending* cenderung membatasi pembiayaan pada Badan Usaha. Adapun sumber dana terbesar pembiayaan *fintech lending* berasal dari bank domestik sebesar Rp35,62 triliun atau hanya 0,48% dari total kredit bank sehingga risiko *interconnectedness* dengan perbankan masih sangat terbatas.



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.3.11. Perkembangan TWP 90 Pembiayaan Fintech Lending

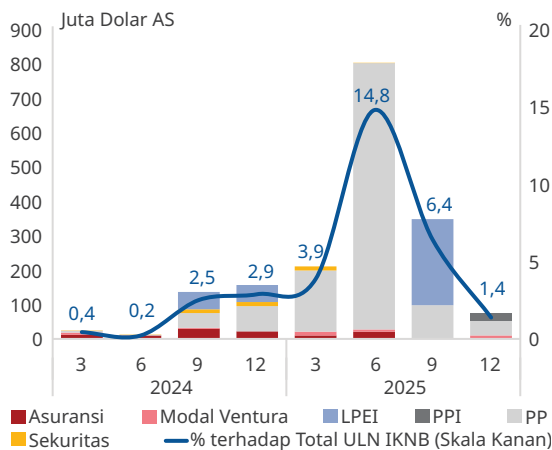


Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.3.12. Perkembangan TWP 90 Pembiayaan Perseorangan dan Badan Usaha Fintech Lending

Risiko pasar dari ULN IKNB yang jatuh tempo di tengah pelemahan Rupiah relatif terbatas.

Pangsa ULN jatuh tempo terhadap total ULN IKNB pada Juni 2024 masih terbatas pada kisaran 2% (Grafik 3.3.13). ULN IKNB tersebut dikontribusikan terutama oleh LPEI dan PP dengan pangsa masing-masing sebesar 30,3% dan 22,4% yang jatuh tempo pada tahun 2024, serta 17,4% dan 76,0% pada tahun 2025. Selain itu, PP diwajibkan untuk melakukan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3.13. Perkembangan Jatuh Tempo ULN IKNB

full hedge dan ULN LPEI wajib melalui persetujuan Menteri Keuangan. PP juga menurunkan ULN dengan melakukan *shifting* pinjaman ke dalam negeri yang lebih murah. Selain itu, GR yang terjaga dan permodalan yang kuat berkontribusi positif terhadap kemampuan IKNB melunasi kewajiban ULN yang jatuh tempo.

Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan kuat di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

Hasil *solvency stress test* menunjukkan permodalan perbankan kuat menahan dampak dari skenario pelemahan kondisi makroekonomi. CAR perbankan yang tinggi pada level 26,09% di Juni 2024 diperkirakan mampu menahan dampak peningkatan risiko kredit dan pasar jika terjadi pelemahan kondisi makroekonomi yang parah (*adverse scenario*). Selanjutnya, uji ketahanan likuiditas (*liquidity stress test*) menunjukkan likuiditas perbankan tetap kuat dalam menghadapi risiko dari dampak gejolak global, termasuk potensi pemburuan kualitas kredit pada sektor-sektor yang rentan, seperti sektor Konstruksi, *Real Estate*, dan UMKM. Ketahanan likuiditas perbankan juga didukung oleh rasio AL/DPK yang masih tinggi dan rasio kecukupan likuiditas jangka pendek (LCR) dan jangka panjang (NSFR) yang di atas ambang batas. Pada level individual bank, interkoneksi antarbank yang masih terbatas berkontribusi pada potensi dampak *contagion* (risiko sistemik) perbankan yang rendah.

Ketahanan IKNB diperkirakan tetap terjaga dengan risiko rambatan ke perbankan yang terbatas.

Hasil simulasi mengindikasikan bahwa GR PP masih kuat apabila terjadi kenaikan NPF hingga level tertinggi, seperti pada periode pandemi Covid-19. Di samping itu, risiko *interconnectedness* PP dan *fintech lending* terhadap perbankan juga masih rendah sebagaimana tercermin pada eksposur aset dan liabilitas ke perbankan yang terbatas.

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan asesmen yang dilakukan oleh IMF dan World Bank untuk menilai ketahanan dan perkembangan sistem keuangan suatu negara. Indonesia telah melaksanakan FSAP tahun 2023/2024 sebagai bagian komitmen keanggotaan Group of Twenty (G20) dan Financial Stability Board (FSB). Pelaksanaan asesmen ini melibatkan otoritas sektor keuangan terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, serta didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait serta pelaku jasa keuangan.

Hasil FSAP Indonesia tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia kuat dan stabil, didukung oleh sistem keuangan yang resilien dalam menghadapi gejala eksternal¹⁸. Asesmen ini mencakup beberapa area penting, termasuk stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada kerentanan melalui analisis risiko sistemik, kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, manajemen krisis dan jaring pengaman sistem keuangan, serta pengembangan sektor keuangan. Hasil asesmen ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari otoritas sektor keuangan Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan, melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sektor keuangan. Pelaksanaan mandat pengawasan perbankan dan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran telah patuh dan sejalan dengan standar internasional, yang mencakup pemenuhan persyaratan minum pengawasan sebagaimana *Basel Core Principles* (BCP) dan kepatuhan yang tinggi terhadap *Principles*

for Financial Market Infrastructures (PFMI) untuk BI-RTGS. Asesor IMF dan World Bank juga memberikan rekomendasi yang sejalan dengan rencana BI untuk terus meningkatkan resiliensi sistem pembayaran. Analisis pengelolaan likuiditas di sektor keuangan juga menunjukkan adanya kecukupan likuiditas secara struktural dan mengapresiasi peran BI yang dinilai telah dapat mendukung pengelolaan likuiditas perbankan dengan baik dan mendorong berlanjutnya pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, diantaranya melalui operasionalisasi sistem *Primary Dealer* di pasar uang.

Hasil asesmen mengindikasikan bahwa risiko sistemik pada sistem keuangan Indonesia terjaga. Sistem keuangan Indonesia didominasi oleh perbankan. Resiliensi sistem keuangan didukung oleh ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan serta pemulihan pertumbuhan kredit perbankan ke tingkat prapandemi. Risiko *contagion* di sektor keuangan domestik terbatas, namun mensyaratkan perlunya keberlanjutan pemantauan oleh otoritas. Di samping itu, *cross-border exposure* perbankan domestik juga relatif terbatas meski meningkat dibanding periode FSAP sebelumnya.

Selain itu, hasil asesmen menunjukkan perbaikan sektor korporasi di Indonesia pascapandemi. Pangsa utang luar negeri korporasi terhadap PDB terus menurun dan berada di posisi yang lebih baik dibanding negara *peers*. Analisis likuiditas membuktikan resiliensi sektor korporasi domestik terhadap tekanan di likuiditas valas di tengah masih tingginya pangsa utang valas terhadap total

18 International Monetary Fund. (2024). Indonesia Financial System Stability Assessment. IMF Country Report No. 24/272. <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2024/English/1idnea2024003-print-pdf.ashx>

utang korporasi. Hasil analisis tersebut menunjukkan ketahanan likuiditas korporasi yang terjaga baik secara *systemwide* maupun level individu korporasi.

Di area makroprudensial, asesor FSAP menilai bahwa UU P2SK memperkuat mandat makroprudensial untuk BI dan sinergi kebijakan antar otoritas sektor keuangan. BI menerapkan mandat makroprudensial melalui strategi tiga pilar, yaitu, (i) menjaga ketahanan keuangan dengan mengurangi penyebaran risiko dari *interconnectedness* dan *contagion*; (ii) mengelola intermediasi yang seimbang dan berkelanjutan untuk menangani prosiklikalitas; dan (iii) mendukung inklusi keuangan. Ketiga strategi kebijakan makroprudensial dimaksud bersinergi dalam mendukung pencapaian tujuan utama stabilitas keuangan. Perbankan yang kuat lebih mampu mengelola risiko terkait prosiklikal sehingga menyediakan layanan intermediasi keuangan yang stabil terutama dalam periode perlambatan ekonomi. Hal ini pada gilirannya mendukung inklusi keuangan. Sebaliknya, inklusi keuangan berkontribusi pada ketahanan bank dengan mendiversifikasi basis nasabah dan sumber pendanaan. Implementasi pilar strategi intermediasi dan inklusi keuangan dipastikan tidak

menimbulkan risiko di sektor keuangan dengan penerapan *safeguard* berupa prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Selanjutnya, IMF dan World Bank merekomendasikan agar otoritas terus memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial, khususnya dengan mempertimbangkan sektor IKNB, yang meski saat ini masih relatif kecil, terus tumbuh dan dapat menjadi sistemik di masa yang akan datang. Selain itu, asesor juga menilai pentingnya komunikasi publik terkait prioritas utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam implementasi strategi kebijakan makroprudensial.

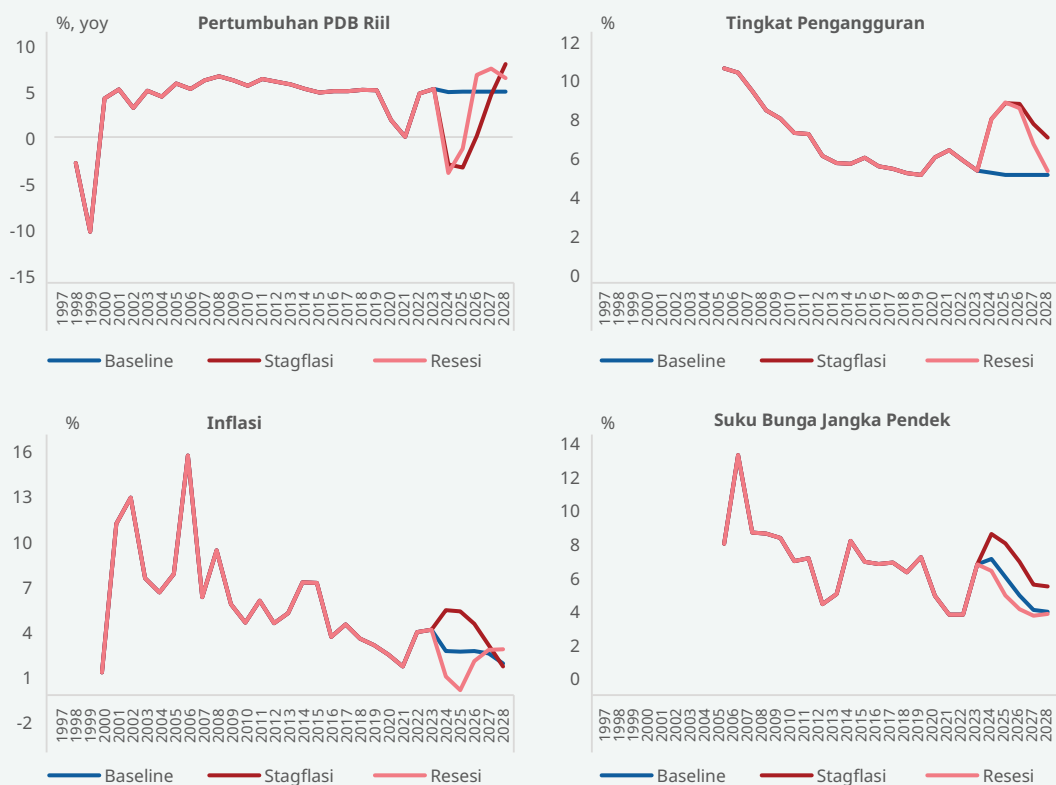
Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari asesmen FSAP diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas otoritas sektor keuangan dalam hal pengaturan, pengawasan, pengembangan, dan penguatan sektor keuangan domestik. Selain itu, hasil asesmen ini juga diharapkan akan mendukung implementasi reformasi struktural yang telah dicanangkan dalam UU P2SK, guna memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia, menjaga kepercayaan publik, mendorong investasi dan aliran modal, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Boks 3.2

Solvency Stress Test Perbankan pada FSAP 2023/2024

Pelaksanaan *solvency stress test (SST)*, untuk menguji ketahanan perbankan Indonesia dalam menghadapi pelemahan kondisi makroekonomi, merupakan salah satu agenda penting FSAP Indonesia 2023/2024. Hasil SST menunjukkan bahwa ketahanan permodalan perbankan tetap kuat pada berbagai skenario tekanan ekonomi. Terdapat tiga skenario¹⁹ yang digunakan pada FSAP 2023/2024, yaitu *baseline*, stagflasi, dan resesi dengan jangka waktu lima tahun. Pada skenario stagflasi, diasumsikan terjadi *lockdown* seperti pada periode Covid-19 yang diperparah dengan eskalasi ketegangan geopolitik. Hal ini

menyebabkan inflasi yang terus tinggi, serta menurunnya permintaan global dan harga komoditas. Respons kebijakan diasumsikan berupa pengetatan kebijakan moneter, yang menyebabkan penurunan konsumsi domestik dan harga aset, peningkatan biaya perusahaan, serta peningkatan pengangguran. Sementara itu, skenario resesi mengasumsikan terjadi resesi global secara serentak di banyak negara. Hal tersebut menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang sistemik, dengan perubahan signifikan pada premi risiko, penurunan permintaan domestik dan harga aset, serta peningkatan pengangguran.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.2.1. Skenario Makroekonomi pada Solvency Stress Test (SST)

¹⁹ Skenario tekanan tidak merepresentasikan proyeksi masa depan, melainkan sebuah hipotesis untuk menggambarkan kondisi ekonomi yang buruk. Skenario tersebut mengasumsikan bahwa tidak ada perubahan kebijakan selain penyesuaian suku bunga kebijakan dalam merespons tekanan.

Pada kondisi *baseline*, hasil uji ketahanan menunjukkan perbankan memiliki permodalan yang kuat. Bank BUMN memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank kecil, karena ditopang dengan modal yang kuat dan profitabilitas yang tinggi. Sementara itu, margin keuntungan bunga (NIM) bank-bank kecil lebih rendah di tengah biaya operasional yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dengan skenario stagflasi, rasio modal inti (CET1) perbankan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 5%. Sementara itu, penurunan modal dalam skenario resesi diperkirakan tidak sedalam skenario stagflasi, dengan rasio modal inti turun sebesar 2,6%. Hasil uji ketahanan menunjukkan bahwa baik dalam skenario stagflasi maupun resesi, perbankan memiliki ketahanan yang memadai dengan permodalan yang baik. Hanya terdapat beberapa bank yang perlu mendapatkan perhatian karena permodalannya menurun hingga di bawah ketentuan minimum CET1. Adapun pangsa aset sejumlah bank tersebut relatif kecil, hanya berkisar 2,9% hingga 7,4% terhadap total aset perbankan dengan besaran kekurangan modal berkisar antara 0,2% hingga 0,3% dari PDB. Jika dilihat lebih mendalam, penurunan modal pada skenario stagflasi dan resesi sebagian besar disebabkan oleh kerugian kredit, diikuti oleh risiko pasar dan suku bunga, serta peningkatan ATMR akibat risiko kredit yang meningkat.

Untuk melengkapi SST, turut dilakukan serangkaian uji sensitivitas untuk menilai: 1) dampak penurunan kualitas kredit pada pinjaman yang direstrukturisasi, 2) konsentrasi pemberian pinjaman kepada perusahaan dan BUMN, serta 3) pengetatan kondisi keuangan dan dampaknya terhadap valuasi obligasi. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa pengaruh penurunan kualitas kredit yang telah direstrukturisasi terhadap rasio modal inti diperkirakan relatif moderat. Rasio modal inti diperkirakan turun 1,3% sampai 2,6% dibandingkan dengan skenario stagflasi, dengan mengasumsikan 100% dan 50% dari pinjaman yang direstrukturisasi berubah menjadi pinjaman bermasalah. Ketahanan perbankan juga tetap terjaga meskipun lima korporasi dengan pinjaman terbesar mengalami gagal bayar secara bersamaan. Simulasi dilakukan dengan mengasumsikan kelima korporasi tersebut mengalami kerugian penuh (100% LGD). Dampaknya, rasio modal inti bank akan turun sebesar 5,5% terutama pada bank KBMI 1 hingga KBMI 3.

Selanjutnya, kenaikan *yield* dinilai tidak menyebabkan kerugian besar pada neraca bank. Peningkatan *yield* sebesar 400 basis poin dalam skenario stagflasi menyebabkan penurunan modal sekitar 1,7%. Penurunan ini terjadi karena penyesuaian harga pasar, baik untuk sekuritas dengan nilai wajar maupun sekuritas dengan biaya perolehan diamortisasi.

Boks 3.3

Penguatan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber di Sektor Keuangan sesuai dengan PBI No. 2/2024 (PBI KKS)

Tren dan akselerasi digitalisasi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) berpotensi meningkatkan paparan risiko siber yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) melalui digitalisasi Sistem Pembayaran (SP) dengan peningkatan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran tidak hanya berimplikasi terhadap peningkatan transaksi *digital banking* di sektor keuangan, namun juga berpotensi meningkatkan kerentanan karena meningkatnya risiko serangan siber yang berdampak sistemik. Berdasarkan lanskap keamanan siber 2023, Indonesia termasuk dalam daftar 10 negara yang menjadi sumber dan tujuan serangan siber dengan total trafik anomali ancaman siber mencapai 403.990.813²⁰. Selama empat tahun terakhir, Bank Indonesia mencatat peningkatan kejadian insiden siber, khususnya pada Penyelenggara sektor keuangan. Insiden siber tersebut berdampak negatif berupa kerugian finansial maupun reputasi publik. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia untuk mengeluarkan regulasi guna meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem informasi pada Penyelenggara sektor keuangan.

Untuk menjawab tantangan di atas, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (PBI Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS)). Penerbitan PBI KKS ini sebagai *"game changer"* penguatan peraturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing Lembaga²¹. *Framework* kerangka pengaturan PBI KKS terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu Tata Kelola, Pencegahan, dan Penanganan yang didukung dengan landasan Pengawasan dan Kolaborasi untuk mencapai tujuan dan sasaran KKS yang disusun sesuai dengan perkembangan kaidah terbaik internasional melalui penerapan prinsip *accountability*, *comprehensive strategy*, *embedded cyber risk management*, *cybersecurity culture*, dan *readiness for incident* (Gambar B3.3.1)

20 Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023*. Badan Siber dan Sandi Negara. <https://www.bssn.go.id/wp-content/uploads/2024/03/Lanskap-Keamanan-Siber-Indonesia-2023.pdf>

21 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN No. 4 Tahun 2023, Pasal 242.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar B3.3.1. Kerangka Pengaturan PBI KKS

Penguatan dan Pelaksanaan KKS dilakukan secara *end-to-end* meliputi saat kondisi normal hingga kondisi terjadinya insiden siber yang dilakukan secara kolaborasi oleh Bank Indonesia dan Lembaga serta keterlibatan *Self-Regulatory Organization* (SRO). Secara umum, kolaborasi bertujuan untuk menyusun protokol penanganan insiden siber di Sektor Keuangan yang terintegrasi, efisien, efektif, bertata kelola serta melibatkan seluruh *stakeholders* baik otoritas maupun pelaku usaha melalui pembangunan pusat analisis, *threat intelligence*, dan *platform* berbagi informasi terkait ancaman, kerentanan dan insiden siber. Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS-SK) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar Sektor Keuangan memiliki kapabilitas respons dan pemulihan insiden siber yang baik melalui penurunan jumlah insiden siber sebagai dampak peningkatan kapabilitas KKS. Adapun lingkup tugas TTIS-SK adalah *Capability Development*, *Threat Intelligence & Information Sharing*, dan *Incident Response*. Bank Indonesia dapat menunjuk SRO sebagai narahubung dengan Penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan prosedur KKS yang bersifat teknis

dan spesifik. Upaya penguatan dan pelaksanaan KKS juga dilakukan melalui sosialisasi ke Penyelenggara untuk meningkatkan kesadaran risiko siber serta perilaku positif dan etika siber di Sektor Keuangan.

Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan ketahanan dan keamanan sistem informasi pada Penyelenggara sektor keuangan melalui penyempurnaan *regulatory reform secara end-to-end*. Bank Indonesia tengah menyusun ketentuan yang lebih rinci melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) KKS yang mencakup 3 (tiga) pilar Utama, yaitu Tata Kelola, Pencegahan, dan Penanganan melalui landasan Pengawasan dan Kolaborasi yang dicerminkan melalui asesmen maturitas KKS untuk mengukur tingkat kesiapan Penyelenggara untuk menjaga resiliensi dan mempertahankan organisasi dan aset digitalnya dari serangan siber. Pengaturan pada PADG KKS disusun mengacu pada standar dan praktik terbaik di bidang *cybersecurity* yang banyak dijadikan rujukan oleh lembaga maupun bank sentral lain. Ketentuan PADG KKS direncanakan terbit akhir triwulan IV 2024.



BANK INDONESIA



BAB 4

KEUANGAN INKLUSIF DAN HIJAU TURUT MENDUKUNG KETAHANAN



Pembiayaan kepada UMKM pada semester I 2024 tumbuh positif, kendati melambat karena upaya bank menjaga risiko kredit di tengah perlambatan kinerja UMKM. Pada semester I 2024, pembiayaan kepada UMKM oleh perbankan konvensional dan syariah masing-masing tumbuh sebesar 5,68% (yoy) dan 8,93% (yoy). Risiko kredit UMKM terjaga di bawah threshold meskipun cenderung meningkat mencapai 4,04%. Pertumbuhan kredit UMKM terutama didorong oleh segmen kecil dan menengah, serta didukung oleh penyaluran KUR dengan target yang diperkirakan mencapai 95% pada akhir 2024. Pembiayaan oleh IKNB, terutama PP dan fintech lending masih mencatatkan pertumbuhan yang baik, masing-masing sebesar 12,04% dan 1,14%, kendati juga mengalami perlambatan. Untuk memperbaiki risiko kredit UMKM, perbankan dan IKNB melakukan selective lending, terutama pada segmen mikro. Upaya konsolidasi tersebut bersama dengan masih besarnya ruang pembiayaan kepada segmen ultra mikro, baik melalui bank maupun IKNB, berpotensi meningkatkan penyaluran kredit UMKM ke depan.

Pembiayaan hijau tumbuh akseleratif kendati pangsaanya terhadap kredit agregat masih relatif kecil. Pada semester I 2024 KKB Hijau dan KPR hijau masing-masing tumbuh sebesar 175% (yoy) dan

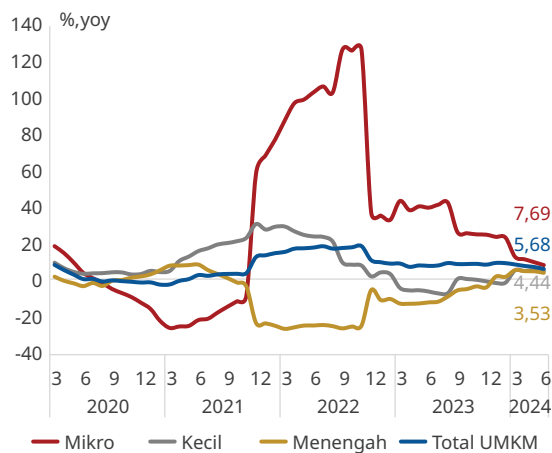
200% (yoy). Akselerasi kredit hijau tersebut didukung kualitas kredit yang jauh di bawah threshold, yaitu sebesar 0,2% untuk KKB hijau dan 1,1% untuk KPR hijau. Pesatnya penyaluran KKB hijau terutama ditopang oleh segmen mobil konsumtif di tengah pesatnya produk otomotif listrik. Sementara itu, akselerasi pertumbuhan KPR berwawasan lingkungan ditopang oleh tipe rusun 22-70.

Bank Indonesia terus memperkuat strategi dan program pengembangan keuangan inklusif dan hijau. Program tersebut antara lain mencakup penguatan model bisnis dan pengembangan pedoman pengembangan UMKM untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas serta akses terhadap pembiayaan dan perluasan pasar UMKM. Untuk mendukung keuangan hijau, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan KLM yang memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi telah mengembangkan alat perhitungan emisi karbon perusahaan. Sinergi terus dilakukan melalui berbagai kerjasama dan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional, guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan serta dukungan terhadap keuangan hijau.

Pembiayaan UMKM Tumbuh Positif di Tengah Perlambatan Kinerja UMKM, Kenaikan Risiko, dan Penurunan *Lending Appetite* Kredit UMKM

Penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan pertumbuhan positif kendati melambat. Kredit UMKM pada semester I 2024 tumbuh sebesar 5,68% (yoy), lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,34% (yoy) (Grafik 4.1.1). Namun demikian, pembiayaan syariah kepada UMKM pada semester I 2024 mencapai 8,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan kredit UMKM perbankan sebesar 5,68% (yoy) (Grafik 4.1.6). Pertumbuhan kredit UMKM perbankan terutama didorong oleh segmen Kecil dan Menengah yang beberapa triwulan sebelumnya berkontraksi (Grafik 4.1.1). Penyaluran kredit ke seluruh sektor tumbuh positif meskipun terjadi moderasi pertumbuhan dibandingkan dengan semester sebelumnya pada sektor dengan pangsa kredit terbesar, yaitu pertanian dan perdagangan, masing-masing sebesar 10,75% (yoy) dan 3,06% (yoy) (Tabel 4.1.1.).

Pertumbuhan kredit UMKM yang terbatas sejalan dengan perlambatan kinerja bisnis UMKM. Hal ini tecermin dari indeks kinerja UMKM yang pada semester I 2024 tercatat sebesar 139,6, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 142,1 (Grafik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.1. Pertumbuhan Kredit UMKM per Segmen

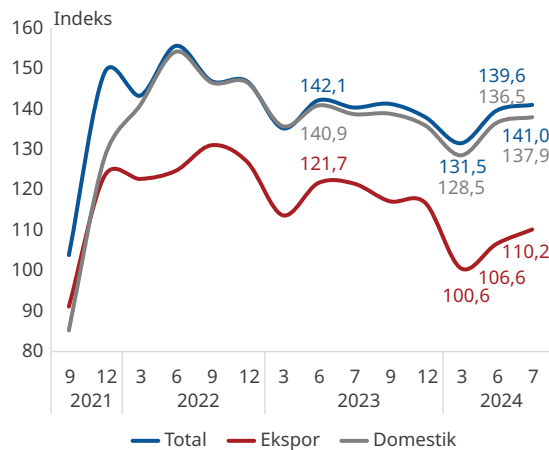
4.1.2)²². Perlambatan kinerja UMKM terutama terjadi pada segmen mikro, sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perlambatan kinerja UMKM antara lain meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada penurunan volume produksi

²² Indeks Kinerja UMKM berdasarkan Survei Kinerja UMKM yg dilakukan Bank Indonesia dg responden 750 UMKM binaan Bank Indonesia dan binaan Kementerian Lembaga.

Tabel 4.1.1. Tabel Kredit UMKM per 9 Sektor Ekonomi

Sektor	Pertumbuhan (%)					NPL (%)				Pangsa (%)
	yoy				ytd					
	2021	2022	2023	Q2 '24	Q2 '24	2021	2022	2023	Q2 '24	Q2 '24
1. Pertanian	24,59	30,65	13,94	10,75	2,90	1,86	1,54	2,15	2,62	18,34
2. Pertambangan	11,57	-21,06	15,07	32,91	13,00	3,81	5,37	4,61	3,17	0,63
3. Industri Pengolahan	13,80	5,84	7,07	3,99	0,88	4,23	3,45	4,06	4,11	9,95
4. Listrik, gas, air	-5,73	-6,37	23,41	47,91	15,37	3,50	2,88	2,22	3,27	0,34
5. Konstruksi	-2,67	-9,24	4,23	0,17	-0,98	12,75	10,81	9,62	9,95	3,67
6. Perdagangan	13,54	8,76	4,99	3,06	-0,12	3,53	3,58	3,89	4,24	51,15
7. Pengangkutan	-1,95	8,10	15,30	9,80	3,73	4,50	3,17	3,36	3,60	3,68
8. Jasa Dunia Usaha	-6,92	5,77	10,20	8,84	0,07	5,41	3,96	4,11	4,98	4,64
9. Jasa Sosial	12,75	10,66	14,20	10,44	3,00	2,19	2,30	2,75	2,98	7,60
Total	12.19	10.47	8.03	5.68	0.99	3.83	3.41	3.71	4.04	100.00

Sumber: Bank Indonesia, diolah



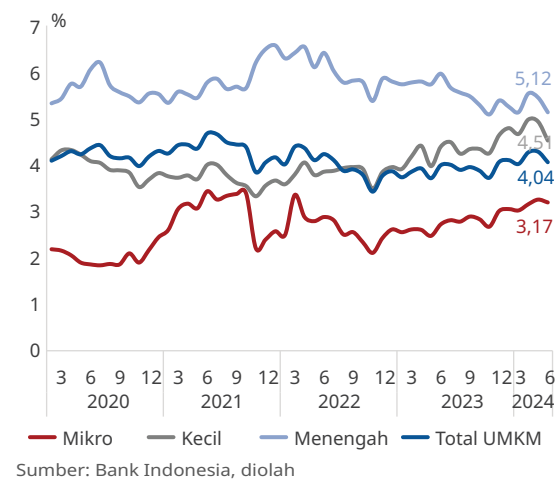
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.2. Indeks Kinerja UMKM

dan omset UMKM. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat menengah ke bawah turut mengurangi permintaan terhadap produk UMKM terutama di segmen mikro. Penurunan permintaan produk UMKM, volume produksi, penjualan dan omset tersebut berdampak pada perlambatan kebutuhan kredit UMKM di semester I 2024 (Grafik 4.1.3)²³.

Risiko kredit UMKM terjaga di bawah threshold, di tengah perlambatan pertumbuhan kredit dan kinerja UMKM. NPL UMKM meningkat dari sebesar 3,71% pada semester I 2023 menjadi 4,04% pada semester I 2024. Peningkatan NPL terjadi pada seluruh segmen kredit, kecuali pada segmen Menengah

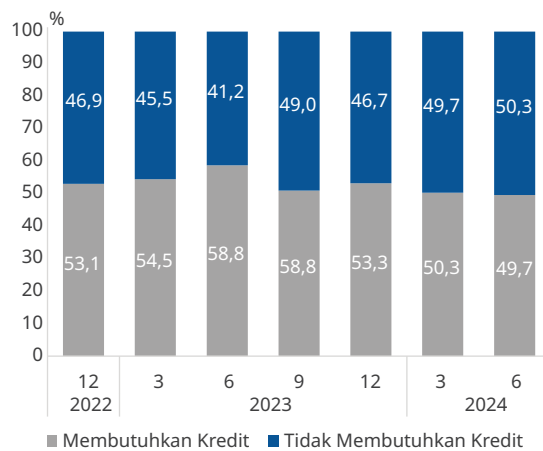
yang turun dari 5,73% pada semester I 2023 menjadi 5,12% pada semester I 2024 (Grafik 4.1.4.). Secara sektoral, tren peningkatan risiko kredit juga terjadi hampir di semua sektor ekonomi, termasuk sektor perdagangan, pertanian, dan industri yang merupakan pangsa terbesar kredit UMKM. Di sisi lain, pada perbankan Syariah, tren NPF UMKM yang cenderung menurun menjadi 3,88% pada semester I 2024 menunjukkan kualitas pembiayaan UMKM (Grafik 4.1.5.). Peningkatan NPL UMKM antara lain dikarenakan adanya penyesuaian kualitas kredit setelah penghentian relaksasi kebijakan restrukturisasi Covid-19 pada Maret 2024.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

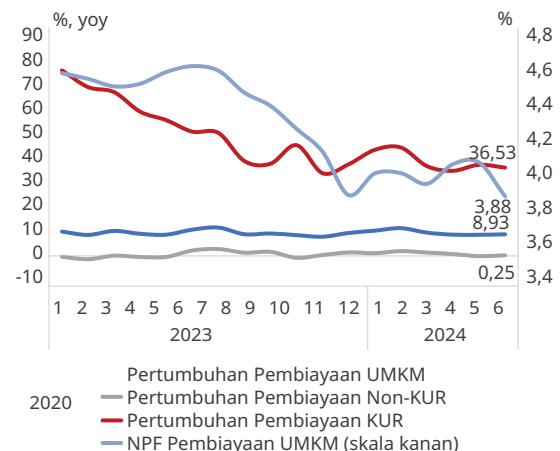
Grafik 4.1.4. NPL Kredit UMKM per Segmen

²³ Kebutuhan Kredit UMKM berdasarkan Survei Kinerja UMKM yg dilakukan Bank Indonesia dg responden 750 UMKM binaan Bank Indonesia dan binaan Kementerian Lembaga.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.3. Kebutuhan Kredit UMKM

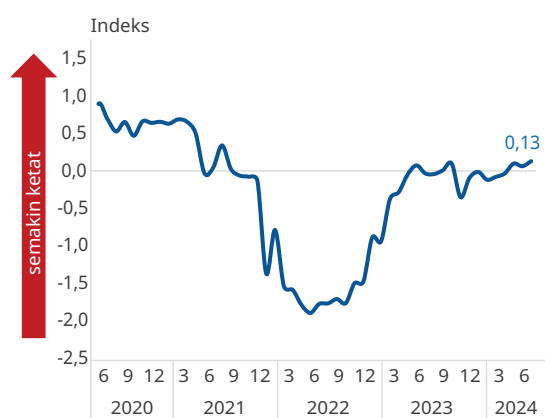


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.5. Pertumbuhan dan NPF Pembiayaan Syariah

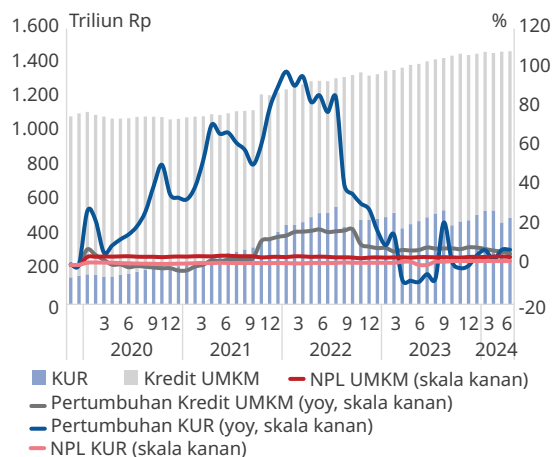
Tren kenaikan risiko kredit UMKM berdampak pada peningkatan kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit UMKM guna menahan kenaikan risiko kredit lebih lanjut. Seiring kenaikan risiko kredit UMKM, bank terindikasi melakukan *selective lending* dengan mengetatkan syarat penyaluran kredit UMKM sebagaimana terindikasi pada kenaikan Indeks *Lending Requirement* UMKM (Grafik 4.1.6). Pengetatan syarat pemberian kredit UMKM berupa penurunan plafon dan kenaikan suku bunga kredit turut berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan kredit UMKM sejak semester I 2023. Hal ini dilakukan bank sebagai upaya konsolidasi untuk memperbaiki kondisi NPL saat ini sehingga ke depannya masih terdapat optimisme penyaluran kredit UMKM akan kembali membaik.

Penyaluran kredit program Pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penopang pertumbuhan kredit UMKM. Realisasi KUR pada semester I 2024 sebesar Rp141,7 triliun atau 47,23% dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun. Kredit tersebut disalurkan kepada 2,4 juta debitur. Penyaluran KUR terbesar pada skala mikro yang mencapai 67,14% atau 2,1 juta debitur. Kontribusi KUR terhadap total kredit UMKM mencapai 33,2% dengan rasio NPL terjaga rendah di level 2% (Grafik 4.1.7.). Pemerintah turut mengakselerasi pertumbuhan kredit UMKM melalui Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No.7 Tahun 2024 yang memberikan kemudahan bagi UMKM di sektor pertanian tanaman pangan untuk dapat mengakses KUR secara berulang.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.6. Indeks *Lending Requirement* UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.7. Perkembangan Kredit UMKM dan KUR

Bank Indonesia terus memperkuat strategi dan program pengembangan keuangan inklusif dan hijau untuk mendukung pelaksanaan tugas utama, termasuk menjaga ketahanan sistem keuangan. Strategi dan program pengembangan dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu kebijakan, implementasi, dan sinergi. Pilar kebijakan mencakup asesmen, penguatan model bisnis dan pedoman pengembangan UMKM dengan fokus mendukung implementasi kebijakan keuangan inklusif dan berkelanjutan. Implementasi melibatkan penerapan model bisnis yang mendukung, memfasilitasi pembiayaan, hingga memperluas pasar global UMKM untuk peningkatan daya saing dan produktivitas. Sementara pilar sinergi diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Pembiayaan UMKM oleh PP tumbuh positif meski dalam tren melambat. Pada semester I 2024, pembiayaan UMKM oleh PP mencapai sebesar 12,04% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan industri PP sebesar 11,21% (yoy). Pembiayaan UMKM oleh PP tumbuh melambat yang berasal dari segmen kendaraan bermotor, khususnya mobil pengangkutan, kendaraan bermotor roda empat baru, dan kendaraan bermotor roda dua bekas, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,76% (yoy), 9,95% (yoy), dan -0,03% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan

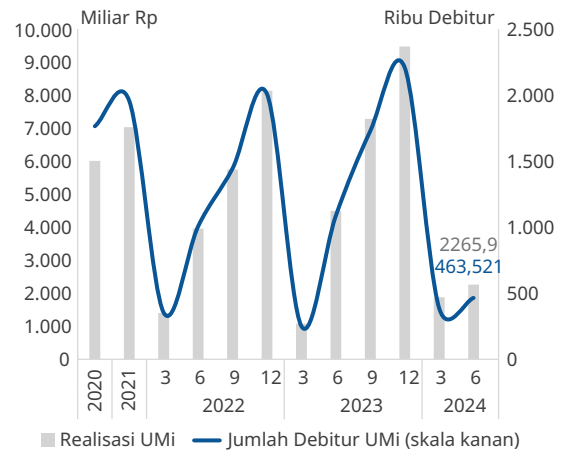
konsumen terhadap kendaraan bermotor sebagai imbas penurunan daya beli dan *selective lending* yang dilakukan oleh PP.

Penyaluran pembiayaan segmen mikro oleh PP tergolong baik meskipun terjadi perlambatan.

Pembiayaan usaha mikro memiliki pangsa 28,21% terhadap total pembiayaan PP pada UMKM. Pada semester I 2024 pembiayaan usaha mikro mencapai sebesar 18,91% (yoy), turun dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dipicu penurunan *repayment capacity* masyarakat menengah ke bawah. Pembiayaan pada segmen kecil tumbuh sebesar 22,10% (yoy), melambat dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 26,26% (yoy), sementara pada segmen menengah tumbuh sebesar 42,17% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,33% (yoy).

Perlambatan pembiayaan UMKM juga terjadi pada *fintech lending*. Outstanding pembiayaan UMKM di *fintech lending* tumbuh 1,14% (yoy) pada Juni 2024, melambat dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 28,92% (yoy). Perlambatan pembiayaan UMKM di *fintech lending* diindikasikan terkait dengan pemburukan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) pada kategori debitur badan usaha, yang diantaranya mencakup UMKM. Pangsa pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan *fintech lending* sebesar 30,93% pada Juni 2024, dengan nilai Rp20,72 triliun yang diberikan kepada 3,51 juta entitas jumlah rekening penerima pinjaman aktif.

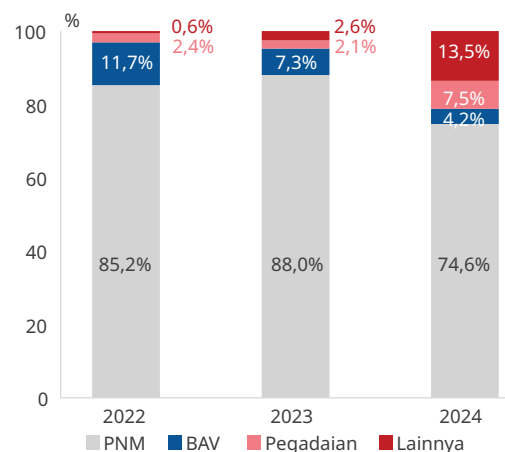
Peningkatan penyaluran pembiayaan kepada segmen ultra mikro berpotensi mendorong pertumbuhan kredit UMKM. Sumber dana pembiayaan kepada segmen ultra mikro berasal dari bank dan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan kontribusi masing-masing 67,6% dan 32,4%. Pembiayaan ultra mikro oleh bank pada semester I 2024 mencapai Rp79,2 Triliun, sebesar Rp35 Triliun disalurkan secara langsung dan Rp44,2 triliun disalurkan melalui



Sumber: Kemenkeu, diolah

Grafik 4.1.8. Perkembangan Penyaluran Kredit Ultra Mikro

IKNB, antara lain melalui PNM, PT Pegadaian dan koperasi. Di sisi lain, pembiayaan ultra mikro yang berasal dari dana PIP pada semester I 2024 mencapai Rp2,26 Triliun yang disalurkan kepada 463.521 debitur (Grafik 4.1.8). Sebagian besar pembiayaan UMi disalurkan melalui PNM (74,6%) dan PT Pegadaian (7,5%) sebagai penyalur langsung, serta PT Bahana Artha Ventura (4,2%) dan koperasi sebagai penyalur *linkage* (Grafik 4.1.9.). Mekanisme penyaluran pembiayaan ultra mikro, baik oleh bank maupun IKNB, disertai dengan pendampingan dan pembinaan kepada debitur yang mayoritas adalah perempuan dan berbasis komunitas.



Sumber: Kemenkeu, diolah

Grafik 4.1.9. Pangsa Pembiayaan Ultra Mikro

Boks 4.1

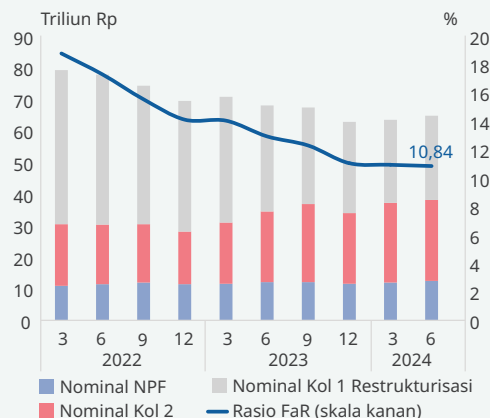
Pembiayaan Syariah Tumbuh Tinggi dengan Risiko Terjaga

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh tinggi di atas industri dengan kualitas terjaga. Pertumbuhan pembiayaan mencapai 13,61% (yoy) pada Juni 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang tumbuh 12,25% (yoy) (Grafik B4.1.1). Secara umum, pembiayaan tumbuh positif pada mayoritas bank syariah, tetapi pertumbuhannya tertahan oleh kontraksi pada KBMI 2. Risiko pembiayaan perbankan syariah relatif terjaga, tecermin dari penurunan rasio *Financing at Risk* (FaR) menjadi sebesar 10,84% pada Juni 2024 dan tingkat NPF yang relatif rendah pada seluruh kelompok BUS (Grafik B4.1.2.). Namun demikian, perlu dicermati adanya peningkatan risiko



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.1.1. Pembiayaan Perbankan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.1.2. Pangsa Pembiayaan Ultra Mikro

pembiayaan sejumlah kelompok bank pada sektor tertentu, yaitu adanya kecenderungan peningkatan NPF pembiayaan perumahan, sektor konstruksi, perdagangan dan jasa dunia usaha pada BUS KBMI 1 maupun UUS BPD KBMI 1. Sedangkan kualitas pembiayaan pada BUS KBMI 2 dan KBMI 3 terjaga baik dengan tren NPF yang menurun (Grafik B.4.1.3.).

Inklusi pembiayaan syariah melalui penyaluran ke sektor UMKM terus tumbuh positif. Peningkatan pembiayaan UMKM ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah ke segmen kecil dan menengah. Pertumbuhan pembiayaan usaha mikro mengalami kontraksi dan pembiayaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B4.1.3. NPF Gross per Kelompok Bank

non-KUR tumbuh relatif stagnan. Ke depan, pembiayaan KUR diperkirakan masih akan terus meningkat, khususnya ditopang oleh penetrasi bank penyalur KUR KBMI 3 melalui strategi intensifikasi pemasaran produk mikro serta pengembangan model bisnis kemitraan.

Kualitas pembiayaan Syariah kepada UMKM terjaga sejalan dengan tren NPF yang cenderung menurun. Secara sektoral, pada semester I 2024 pembiayaan UMKM ke seluruh sektor tumbuh positif dengan kualitas yang semakin membaik (Tabel B4.1.1). Pertumbuhan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor pertanian dan pengangkutan yang masing-masing tumbuh sebesar 16,8% dan 4% (yoy).

Kinerja keuangan sosial syariah turut mendukung ketahanan sektor keuangan.

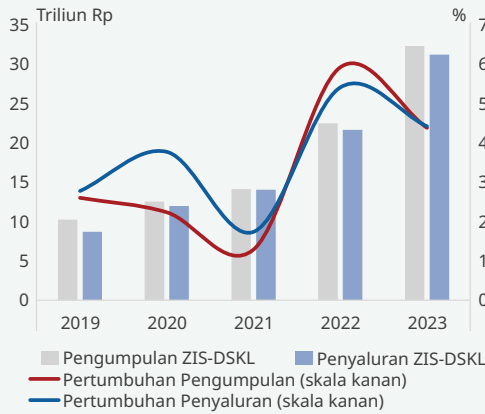
Penyaluran dana sosial syariah khususnya Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dapat memperkuat daya beli serta memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat kelas bawah. Pendayagunaan ZIS juga dapat meningkatkan kapasitas produktif usaha sektor informal yang sulit terjangkau layanan keuangan komersial. Pengumpulan dana ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) terus meningkat hingga mencapai Rp32,3 triliun tumbuh 43,8% (yoy) pada

Tabel B4.1.1. Pertumbuhan Pembiayaan UMKM dan NPF per Sektor Ekonomi

Sektor	Pertumbuhan Pembiayaan UMKM (%)			NPF (%)			Pangsa (%)	Kontribusi (%)
	yoy							
	2022	2023	Tw II 2024	2022	2023	Tw II 2024	Tw II 2024	Tw II 2024
1. Pertanian	48,4	30,7	16,8	2,64	2,59	2,68	20,55	3,23
2. Pertambangan	-18,8	7,9	18,3	6,26	2,80	2,52	0,53	0,09
3. Industri Pengolahan	19,9	28,3	11,7	4,13	4,17	3,38	7,72	0,88
4. Listrik, gas, air	6,5	-4,2	37,8	5,07	2,24	0,87	0,60	0,18
5. Konstruksi	-2,4	4,0	6,6	17,10	14,50	14,18	4,96	0,33
6. Perdagangan	33,2	-0,4	22,8	2,89	2,94	3,40	3,73	0,75
7. Pengangkutan	13,4	0,9	4,0	4,42	4,13	4,12	38,95	1,61
8. Jasa Dunia Usaha	0,1	-2,0	11,2	4,29	3,55	4,15	8,10	0,89
9. Jasa Sosial	4,5	13,6	6,3	1,87	1,67	1,89	14,85	0,96
Total	14,6	9,5	8,9	4,37	3,89	3,88	100	8,9

Sumber: Bank Indonesia, diolah

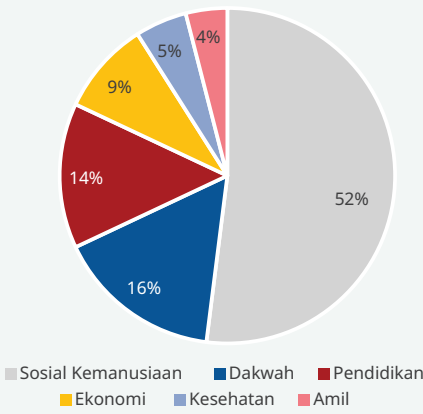
tahun 2023 (Grafik B4.1.4). Hal ini diiringi oleh penyaluran dana pada berbagai sektor yang berperan penting dalam *Human Development Index* (HDI), seperti sektor ekonomi, pendidikan,



Sumber: BAZNAS, diolah

Grafik B4.1.4. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS-DSKL

dan kesehatan (Grafik B4.1.5). Potensi dan optimalisasi dana keuangan sosial syariah berpeluang untuk terus ditingkatkan untuk mendukung inklusi ekonomi dan ketahanan rumah tangga.



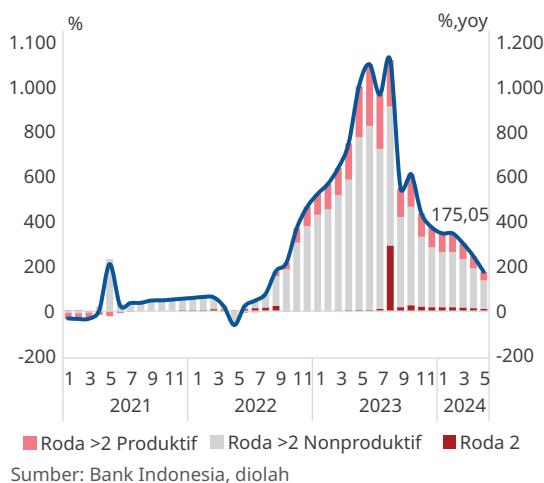
Sumber: BAZNAS, diolah

Grafik B4.1.5. Pangsa Penyaluran Dana ZIS-DSKL

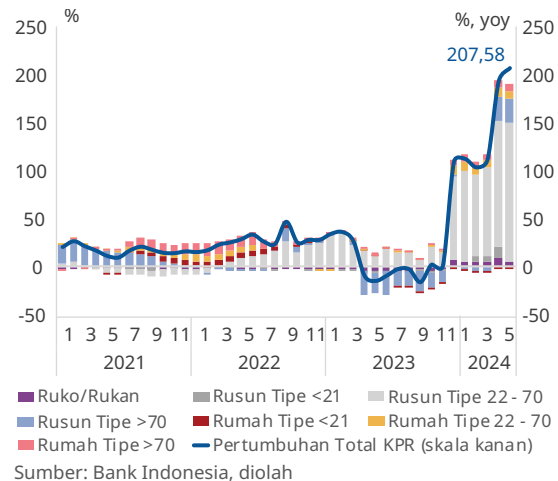
4.2

Pembiayaan Hijau Masih Prospektif Mendukung Intermediasi Perbankan

Indonesia terus menuju transisi hijau secara *just dan affordable*. Upaya tersebut tecermin dari penyaluran kredit hijau yang terus mengalami peningkatan, meskipun pangsa kredit masih rendah dibandingkan dengan kredit non hijau. Hingga semester I 2024, KKB hijau tumbuh 175% (yoy) terutama didukung oleh penyaluran KKB hijau mobil konsumtif (Grafik 4.2.1.). Pesatnya produk otomotif listrik mendorong pembiayaan kendaraan berwawasan lingkungan. Demikian pula dengan KPR berwawasan lingkungan yang mengalami pertumbuhan hingga lebih dari 200% pada semester I 2024 yang ditopang oleh tipe rusun 22-70 (Grafik 4.2.2.). Perbankan telah memulai mengidentifikasi sektor hijau berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia pada Desember 2023 terhadap lebih dari 40 bank besar, perbankan sudah mulai melakukan identifikasi pada sektor yang masuk dalam kategori berkelanjutan. Pembiayaan kepada sektor yang telah teridentifikasi hijau lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang belum teridentifikasi memiliki rencana transisi.



Grafik 4.2.1. Perkembangan KKB Hijau Menurut Jenis KKB



Grafik 4.2.2. Pertumbuhan KPR Hijau Menurut Jenis KPR

Bank Indonesia mendorong keuangan hijau melalui kebijakan KLM yang memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) memberikan hingga 50 bps potongan GWM bagi bank yang menyalurkan KKB dan KPR hijau hingga mencapai *threshold* tertentu. Upaya ini merupakan dukungan bauran kebijakan Bank Indonesia pada ekonomi berkelanjutan yang telah dilakukan sejak tahun 2019. Kebijakan Bank Indonesia tersebut melengkapi bauran kebijakan nasional, antara lain kebijakan fiskal dan mikroprudensial dalam mendukung keuangan hijau. Pada kebijakan fiskal, pemerintah telah memberikan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pada kebijakan mikroprudensial, OJK telah melonggarkan bobot ATMR. Pemerintah daerah juga turut mendukung upaya transisi melalui pemberian akses khusus pada kendaraan berwawasan lingkungan dan pajak kendaraan yang lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan berbasis bahan bakar fosil. Bauran kebijakan nasional tersebut turut mendorong pertumbuhan KKB hijau dan KPR hijau.

Tanggal	NPL KKB Hijau (%)	NPL KPR Hijau (%)
1 Januari 2020	7.0	7.0
1 Maret 2020	8.0	7.5
1 Mei 2020	9.0	2.5
1 Juli 2020	11.5	6.8
1 September 2020	10.5	6.8
1 November 2020	10.5	1.8
1 Januari 2021	4.0	4.8
1 Maret 2021	3.8	4.2
1 Mei 2021	9.5	4.0
1 Juli 2021	2.0	3.8
1 September 2021	5.5	2.5
1 November 2021	5.0	1.0
1 Januari 2022	5.8	0.8
1 Maret 2022	2.0	1.8
1 Mei 2022	3.2	1.5
1 Juli 2022	1.8	2.0
1 September 2022	0.5	2.2
1 November 2022	0.2	2.5
1 Januari 2023	0.1	2.2
1 Maret 2023	0.1	4.0
1 Mei 2023	0.1	1.5
1 Juli 2023	0.1	1.2
1 September 2023	0.1	1.0
1 November 2023	0.1	1.2
1 Januari 2024	0.19	1.01
1 Maret 2024	0.31	1.59

Grafik 4.2.3. NPL KKB dan KPR Hijau

Tahun	KKB Hijau (Triliun Rp)	KPR Hijau (Triliun Rp)
2020	0,1	0,3
2021	0,2	0,4
2022	0,4	0,6
2023	1,5	0,6
2024	2,31	1,30

Grafik 4.2.4. Nominal Baki Debet KKB dan KPR Hijau

Boks 4.2

Peran Kalkulator Hijau dalam mendukung *Green Initiatives*

Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan membawa peluang dan risiko bagi perekonomian. Upaya transformasi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Inovasi pada sektor-sektor teknologi bersih tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian, transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan juga menimbulkan risiko. Perubahan kebijakan global dan preferensi konsumen maupun investor dapat mendisrupsi kinerja industri yang bersifat *carbon intensive*.

Agar perekonomian Indonesia tetap resilien dan mampu tumbuh secara berkelanjutan, transisi perlu dilakukan secara *orderly, just, dan affordable*. Transisi perlu dikelola untuk menghindari disrupsi berlebihan pada sektor keuangan maupun sektor riil, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi baru. Sejalan dengan hal tersebut, sektor keuangan memegang peran kunci melalui pembiayaan dan investasi pada aktivitas transisi yang mendukung keberlanjutan perekonomian.

Upaya menyelaraskan pembiayaan dan investasi dengan kebijakan transisi perubahan iklim didukung dengan penerbitan International Financial Reporting Standards (IFRS) S1 dan S2 oleh International Sustainability Standards Board (ISSB). Penerapan prinsip transparansi dan konsistensi pada pengungkapan keberlanjutan digunakan pada tataran global untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Standar IFRS tersebut memuat praktek pengungkapan target dan realisasi penurunan emisi perusahaan. Sejalan

dengan hal itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah membentuk Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) yang beranggotakan perwakilan industri dan regulator guna mempersiapkan adopsi standar IFRS di Indonesia.

Saat ini mayoritas perusahaan di Indonesia belum memiliki kapabilitas dalam mengkuantifikasi emisi karbon guna memenuhi standar pengungkapan keberlanjutan. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyusun Alat Perhitungan Emisi Karbon Perusahaan yang dikenal dengan Kalkulator Hijau. Alat tersebut dilengkapi dengan kertas kerja dan aplikasi berbasis *mobile*, yang dapat digunakan secara *voluntary/optional* dan gratis untuk menghitung emisi karbon.

Desain Kalkulator Hijau mengacu pada standar internasional Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) dan ISO 14064-1:2018. Berdasarkan kedua standar tersebut, ruang lingkup pengukuran emisi pada Kalkulator Hijau dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu

- 1) emisi yang langsung dihasilkan oleh perusahaan (*scope 1*), berasal dari penggunaan mesin bakar tidak bergerak (a.l. genset) dan mesin bakar bergerak (a.l. kendaraan);
- 2) emisi yang tidak langsung dihasilkan oleh perusahaan (*scope 2*), berasal dari energi listrik yang dibeli dari PLN; dan
- 3) sumber pengurang emisi, yang dapat berasal dari penggunaan energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, maupun kepemilikan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE).

Kalkulator Hijau dapat digunakan secara sukarela oleh seluruh pelaku usaha dan masyarakat, khususnya oleh UMKM dan/atau Usaha Besar yang memiliki aktivitas penghasil emisi karbon yang tidak kompleks.

Alat ini dapat membantu penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menetapkan target dan rencana tindak penurunan emisi GRK atas aktivitas usahanya. Hasil pengukuran emisi dimaksud dapat dilaporkan dan menjadi strategi komunikasi publik sekaligus menunjukkan komitmen dan upaya pelaku usaha dalam mendukung keberlanjutan.

Pengembangan Kalkulator Hijau sejalan dengan mandat Bank Indonesia untuk mengatur dan mengembangkan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan UU P2SK, kebijakan makprudensial diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang optimal,

menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendukung keuangan inklusi dan hijau²⁴. Untuk mengakselerasi pertumbuhan keuangan berkelanjutan, penguatan dilakukan pada multiaspek yang mencakup: 1) data, *tools*, dan riset; 2) pengawasan dan pengaturan; serta 3) kebijakan transisi terkait iklim yang dilandaskan pada prinsip kolaborasi, akuntabilitas, dan transparansi. Kalkulator Hijau menjadi salah satu produk pada area *data, tools*, dan riset untuk membangun kesadaran masyarakat dan mendukung pelaku usaha dalam bertransisi menuju praktik bisnis yang berkelanjutan. Kalkulator Hijau merupakan *living tools* yang akan terus dikinikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan industri. Ke depan, pengkinian dan perluasan ruang lingkup Kalkulator Hijau akan terus dilakukan melalui penguatan koordinasi antarlembaga dan industri.



Sumber: Juhro, Robinson, dan Rahadyan (2024)

Gambar B4.2.1. Kerangka Kerja Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Bank Sentral

24 Juhro, S.M., Robinson, I. & Rahadyan, R. (2024). Climate Risks and Central Bank Policy: Paving to the Way for Sustainable Economic Growth. *Bank Indonesia Working Paper*.

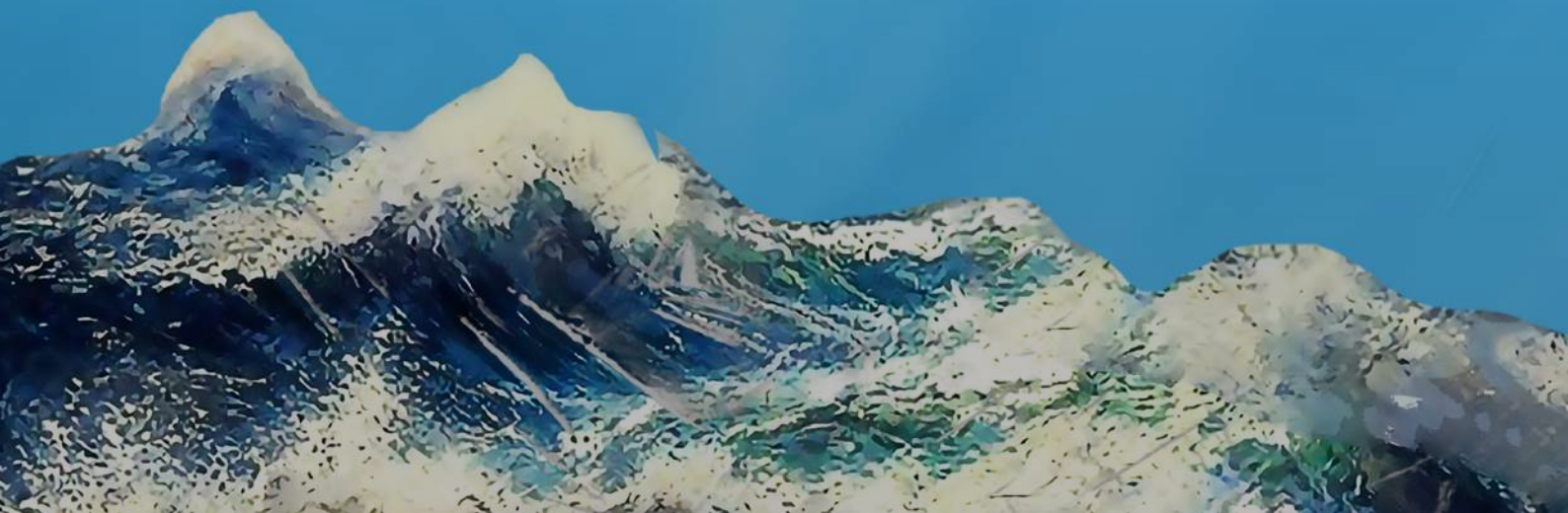


BANK INDONESIA



BAB 5

RESPONS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL DALAM MENJAGA RESILIENSI



Kebijakan makroprudensial akomodatif terus diperkuat dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk mendorong intermediasi perbankan, dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, kebijakan makroprudensial yang longgar masih dibutuhkan untuk mendorong ruang intermediasi sejalan dengan siklus keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendukung intermediasi mencakup penguatan Kebijakan Insentif KLM serta penetapan kebijakan RPLN. Penguatan KLM dapat mengurangi risiko konsentrasi pada sektor tertentu dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan kredit terutama pada sektor-sektor dengan daya ungkit tinggi pada perekonomian. Sementara itu, kebijakan

RPLN memberikan fleksibilitas bagi bank untuk mengoptimalkan pendanaan non-DPK dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan kreditnya. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio CCyB dan melanjutkan kebijakan yang longgar mencakup LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, RIM dan rasio PLM guna tetap menjaga ketahanan. Penguatan asesmen transparansi SBDK juga terus dilakukan antara lain mencakup pendalaman pada sektor prioritas KLM. Sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas keuangan dalam KSSK juga terus diperkuat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, termasuk secara bilateral dalam rangka harmonisasi kebijakan.

Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Dilanjutkan untuk Mendorong Intermediasi dan Ketahanan Sistem Keuangan

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan makroprudensial untuk turut menjaga SSK dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan berbagai tantangan domestik, kebijakan makroprudensial akomodatif terus dilanjutkan untuk meningkatkan kredit/pembiayaan yang optimal dengan turut menjaga ketahanan sistem keuangan. Dalam rangka mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan, Bank Indonesia kembali memperkuat KLM efektif per 1 Juni 2024²⁵. Penguatan dilakukan melalui perluasan cakupan sektor eksisting dan tambahan sektor baru yang dinilai memiliki daya ungkit tinggi dan tersinergi dengan program Pemerintah, serta penyesuaian distribusi alokasi insentif untuk setiap sektor.

Bank Indonesia juga turut memperkuat sisi pendanaan perbankan yang dibutuhkan untuk mendorong intermediasi, melalui penetapan kebijakan RPLN pada Juni 2024 yang berlaku efektif per 1 Agustus 2024. Instrumen kebijakan RPLN bersifat kontrasiklikal dan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), dengan memerhatikan prinsip kehati-hatian bank. Kebijakan ini mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek terhadap modal bank (batasan RPLN) yang dapat disesuaikan berdasarkan besaran Parameter Kontrasiklikal (PK) sebagai faktor pengurang ataupun penambah batasan RPLN. Penyesuaian tersebut menggunakan asesmen *forward looking* atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko SSK.

25 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

Bank Indonesia melakukan penguatan KLM untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan. Penguatan dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama. Pertama adalah perluasan cakupan sektor KLM eksisting dan peningkatan insentif yang mencakup sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan inklusif. Aspek kedua, penambahan sektor baru yang merupakan sektor pendukung program Pemerintah atau sektor lain yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian. Sektor baru tersebut meliputi sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan *real estate* produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial. Aspek ketiga, penyesuaian distribusi besaran insentif pada sektor yang lebih mendukung pertumbuhan dan alokasi besaran insentif pada bank dengan kontribusi pertumbuhan kredit yang tergolong tinggi. Redistribusi besaran insentif pada sektor KLM diharapkan dapat mengoptimalkan insentif yang diterima bank (*more accesible*). Sementara itu, peningkatan alokasi insentif pada beberapa sektor dengan pertumbuhan kredit yang tinggi diharapkan dapat semakin mendorong minat penyaluran kredit perbankan. Secara keseluruhan, besaran insentif masih ditetapkan paling tinggi sebesar 4%²⁶. Insentif tersebut terdiri dari insentif untuk penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi paling tinggi sebesar 2,2%, insentif kepada bank penyalur kredit/pembiayaan inklusif menjadi paling tinggi sebesar 1,3%, dan insentif terhadap penyaluran kredit/pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,5%. Terdapat tambahan insentif sebesar 0,2% bagi bank yang mencapai pertumbuhan kredit sektoral di atas median industri.

26 Pemberian tambahan insentif tersebut diprioritaskan berdasarkan besar pangsa kredit masing-masing sektor, yaitu: (i) sektor Hilirisasi; (ii) sektor Otomotif, Perdagangan, LGA dan Jasa Sosial; (iii) Sektor Perumahan dan (iv) sektor Pariwisata & Ekonomi kreatif.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan makroprudensial RPLN yang berlaku efektif 1 Agustus 2024, untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank, sesuai kebutuhan perekonomian²⁷. Di tengah kuatnya pertumbuhan kredit, kebutuhan pendanaan bank juga terus meningkat. Laju pertumbuhan kredit bank yang lebih tinggi daripada pertumbuhan DPK berpotensi meningkatkan kebutuhan pendanaan non-DPK termasuk pinjaman luar negeri. Kebijakan RPLN bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber pendanaan luar negeri bank, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian bank. Kebijakan RPLN merupakan penguatan atas kebijakan batas maksimum kewajiban jangka pendek bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing, dengan penerapan PK sebagai faktor penambah atau faktor pengurang batasan RPLN.

Kebijakan RPLN memiliki 2 (dua) fitur, yaitu kontrasiklikal sehingga bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian, serta *risk-based* yang penerapannya memerhatikan aspek manajemen risiko meliputi risiko eksternal dan SSK. Hal ini mempertimbangkan terdapatnya potensi risiko SSK dari *macro-financial linkages* antara *capital flows* dan makroekonomi yang bersifat prosiklikal. Batas maksimum pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal bank (*threshold* RPLN) adalah sebesar 30%. Aspek kontrasiklikal diterapkan melalui PK 0%, positif 5%, atau negatif 5% yang

dapat disesuaikan berdasarkan asesmen *forward looking* Bank Indonesia atas siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko SSK. PK tersebut memberikan ruang fleksibilitas bagi perbankan untuk memperoleh pendanaan dari luar negeri, dengan kelonggaran rasio pendanaan luar negeri jangka pendek terhadap modal hingga 35%. Selain itu, kebijakan RPLN juga memperkuat definisi dan cakupan pendanaan luar negeri bank melalui penambahan komponen yang tidak masuk ke dalam perhitungan batas maksimum kewajiban jangka pendek. Komponen tersebut meliputi DPK milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk, kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk akibat transaksi repo instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia, serta ULN bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

Batasan RPLN ditetapkan sebesar 30% dengan PK sebesar 0% efektif per 1 Agustus 2024. Reviu dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Melalui penetapan batasan RPLN, diharapkan perbankan dapat meningkatkan pendanaan non-DPK untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian.

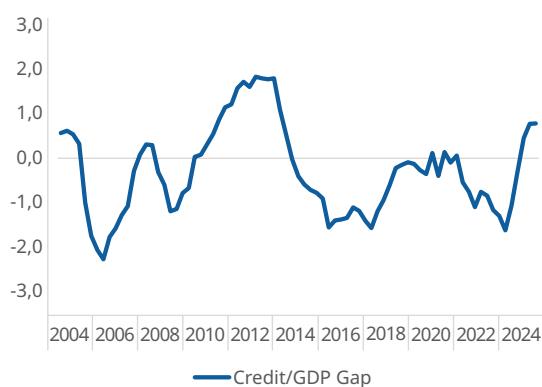
27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank dan Peraturan Anggota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

Instrumen kebijakan makroprudensial lainnya juga dipertahankan longgar, yang mencakup rasio CCyB, LTV/FTV untuk kredit/pembiayaan properti dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, rasio RIM dan PLM, guna mendukung kredit/pembiayaan yang optimal. Sejalan dengan siklus keuangan yang masih berada di bawah tren jangka panjang, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan rasio CCyB sebesar 0%. Bank tidak diwajibkan untuk membentuk penyangga (*buffer*) modal tambahan mempertimbangkan belum adanya indikasi intermediasi perbankan yang berlebihan antara lain tecermin dari masih rendahnya rasio *Credit to GDP Gap* (Grafik 5.1.1). Rasio LTV/FTV kredit/pembiayaan properti tetap longgar untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan), yaitu maksimal 100%. Sementara itu, uang muka juga dipertahankan longgar untuk semua jenis kendaraan bermotor baru dengan rasio minimal 0%. Upaya ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian terutama di sektor properti dan otomotif sebagai sektor yang memiliki *backward dan forward linkages* serta daya ungkit tinggi terhadap perekonomian nasional. Penerapan kebijakan LTV/FTV dan uang muka yang akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 mewajibkan perbankan untuk

tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Selanjutnya, RIM dipertahankan pada rentang 84-94%, dengan deaktivasi disinsentif batas atas. RIM tercatat sebesar 84,3% pada posisi Juni 2024, sedikit di atas batas bawah (84%), yang menunjukkan bahwa tingkat intermediasi perbankan belum mencapai tingkat yang optimal, sehingga dapat terus didorong dengan tetap menjaga kehati-hatian (Grafik 5.1.2). Upaya menjaga kehati-hatian dilakukan dengan mengecualikan kewajiban pemenuhan RIM 84-94% bagi bank dengan NPL di atas 5%.

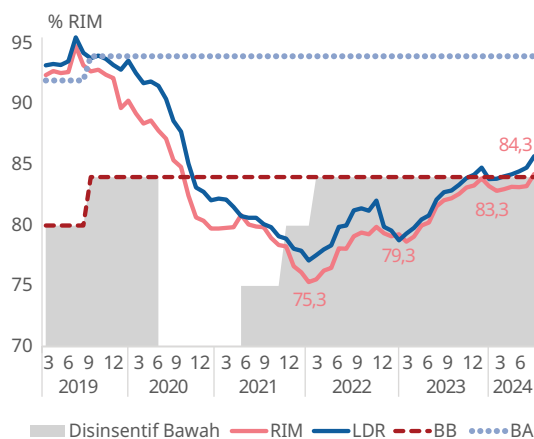
Rasio PLM dan PLM Syariah dipertahankan tetap, untuk mendukung ketahanan likuiditas perbankan. Bank Indonesia mempertahankan rasio PLM sebesar 5% untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 3,5% untuk Bank Umum Syariah (BUS) dengan fleksibilitas repo PLM sebesar 5% untuk BUK dan sebesar 3,5% untuk BUS. Fleksibilitas dalam PLM tersebut ditujukan untuk mendukung penyaluran kredit/pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Bank Indonesia melakukan penguatan asesmen transparansi SBDK dengan pendalaman pada sektor prioritas KLM. Dalam rangka memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter



*) Berdasarkan panduan BCBS, kredit ditengarai ekseesif ketika Credit/GDP Gap > 2
Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1.1. Credit/GDP Gap



Sumber: Bank Indonesia, diolah

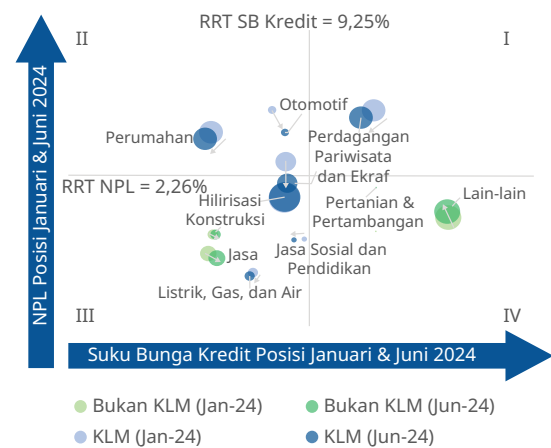
Grafik 5.1.2. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

dan makroprudensial, Bank Indonesia terus melakukan publikasi asesmen transmisi Suku Bunga Kebijakan Bank Indonesia terhadap SBDK perbankan²⁸.

Berdasarkan hasil asesmen, suku bunga kredit pada mayoritas sektor KLM relatif menurun, di tengah perkembangan suku bunga kredit industri yang relatif stabil. Sejak akhir triwulan I 2024, suku bunga kredit sektor prioritas KLM relatif menurun, di antaranya sektor perumahan, perdagangan, sektor LGA, sektor jasa sosial dan pendidikan, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Grafik 5.1.3). Namun demikian, suku bunga kredit di sektor prioritas otomotif dan hilirisasi mengalami kenaikan. Apabila dilihat berdasarkan suku bunga kredit baru, pada kedua sektor tersebut mengalami penurunan. Namun terbatasnya porsi pencairan kredit baru menyebabkan penurunan ini belum tecermin dari suku bunga kreditnya.

Selama 6 (enam) bulan terakhir, suku bunga kredit pada mayoritas sektor prioritas KLM secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan industri disertai dengan risiko kredit yang terjaga. Perkembangan tersebut terlihat

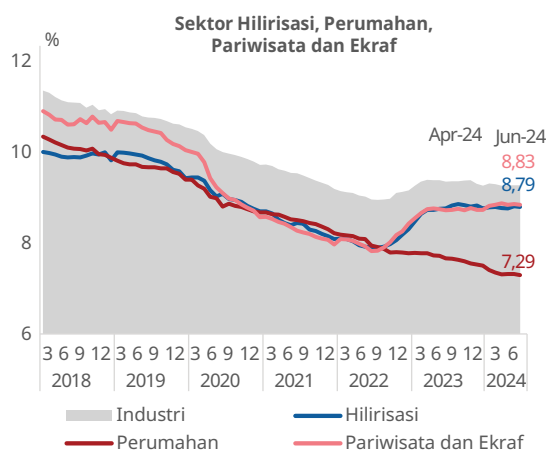
dari hasil pemetaan perubahan suku bunga dan kualitas kredit mayoritas sektor jasa yang relatif terdorong ke arah kuadran III (Grafik 5.1.4), NPL rendah dengan suku bunga yang juga rendah. Sementara itu, pemetaan untuk sektor-sektor non-KLM menunjukkan adanya dinamika yang lebih heterogen. Di satu sisi, mayoritas sektor non-KLM juga mengalami perbaikan kualitas kredit selama 6 (enam) bulan terakhir. Di sisi lain, mayoritas sektor dimaksud mengalami kenaikan suku bunga kredit, yaitu sektor non-KLM konstruksi dan jasa. Penurunan suku bunga mayoritas sektor-sektor KLM yang disertai dengan perbaikan kualitas kredit, mengindikasikan daya saing sektor-sektor prioritas KLM yang baik dibandingkan dengan sektor lainnya.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

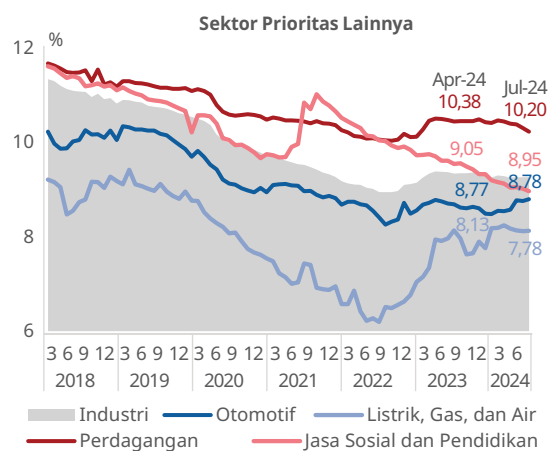
Grafik 5.1.4. Pemetaan Kuadran Suku Bunga dan NPL Sektor Prioritas KLM

²⁸ SBDK merupakan suku bunga dasar kredit yang dipublikasikan oleh bank sesuai dengan Peraturan OJK No.37/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank." SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan pada nasabah, namun belum mencakup premi risiko yang dapat bervariasi untuk tiap debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur secara umum tidak sama dengan SBDK.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1.3. Perkembangan Suku Bunga Kredit pada Sektor Prioritas KLM



5.2 Sinergi Kebijakan Terus Dipererat

Bank Indonesia terus mempererat koordinasi dan sinergi kebijakan baik melalui KSSK maupun secara bilateral dengan otoritas di sektor keuangan untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha serta menjaga SSK. Sinergi lintas otoritas sektor keuangan dalam kerangka KSSK yang beranggotakan Bank Indonesia, Kemenkeu, OJK, dan LPS terus diperkuat melalui *coordinated policy responses* atau bauran kebijakan lintas otoritas. Sinergi diimplementasikan guna mengantisipasi peningkatan ketidakpastian, baik di tingkat global maupun domestik, serta potensi rambatannya terhadap perekonomian dan sistem keuangan.

Sinergi dan koordinasi antarlembaga anggota KSSK tidak hanya dilakukan melalui KSSK, tetapi juga dilakukan secara bilateral. Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dilakukan antara lain melalui restrukturisasi forum koordinasi. Hal ini ditujukan agar kerja sama dan koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif sejalan dengan perluasan mandat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Bank Indonesia dan OJK terus melakukan harmonisasi kebijakan dan ketentuan dalam rangka mendukung efektivitas kebijakan. Beberapa kebijakan Bank Indonesia yang diharmonisasikan bersama OJK meliputi KLM, RPLN, dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah. Beberapa

kebijakan OJK dalam mendukung fungsi intermediasi bank diharmonisasikan dengan ketentuan Bank Indonesia di antaranya mengenai Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), RPOJK mengenai *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), serta RPOJK mengenai pemberian kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Lebih lanjut, guna memperkuat surveilans makroprudensial dan mikroprudensial, Bank Indonesia dan OJK secara intensif melakukan pertukaran data dan/atau informasi, koordinasi pengembangan metodologi bank sistemik, dan *joint stress-test*.

Kerja sama bilateral antara Bank Indonesia dan LPS turut diperkuat untuk menjaga SSK sesuai dengan mandat UU P2SK. Bank Indonesia dan LPS telah menyempurnakan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penjualan dan/atau *Repurchase Agreement* Surat Berharga Negara oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Indonesia (PKS Penjualan/Repo SBN LPS). Kerja sama ini merupakan wujud pelaksanaan Nota Kesepahaman BI dan LPS serta menjadi pedoman pelaksanaan dukungan Bank Indonesia dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas. Selain itu, sebagai implikasi dari UU P2SK yang memperluas mandat LPS untuk melakukan persiapan dan penanganan bank dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP), telah dilakukan *benchmarking* antar otoritas untuk memperkuat kelembagaan LPS.

Dalam rangka mendorong peningkatan kredit/pembiayaan untuk menjaga sustainabilitas pertumbuhan ekonomi ke depan, Bank Indonesia kembali melakukan **penguatan KLM**. Penguatan KLM yang diimplementasikan per 1 Juni 2024 dilakukan melalui perluasan dan penambahan cakupan sektor KLM, di antaranya disinergikan dengan program Pemerintah atau sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian serta penyesuaian distribusi alokasi besaran insentif.

Perluasan cakupan sektor KLM eksisting pada beberapa sektor, yaitu hilirisasi, perumahan, dan pariwisata. Perluasan sektor hilirisasi dilakukan dengan menambahkan komoditas baru, di luar 4 (empat) komoditas hulu-hilir strategis (nikel, timah, tembaga, dan bauksit) yang sebelumnya sudah tercakup dalam KLM. Beberapa komoditas tambahan tersebut antara lain adalah batu bara, minyak dan gas, emas, serta besi untuk sektor hilirisasi minerba. Perluasan pada sektor nonminerba mencakup penambahan komoditas, seperti buah-buahan dan karet. Selanjutnya, perluasan sektor perumahan dilakukan melalui penambahan sektor konstruksi dan *real estate* untuk gedung produktif atau komersial, seperti gedung industri dan pusat perbelanjaan. Dan tambahan cakupan pada sektor pariwisata dilakukan dengan menambahkan sektor-sektor baru yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.

Penguatan KLM juga ditempuh melalui penambahan sektor baru yang mendukung program pemerintah serta memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian.

Sektor-sektor tersebut meliputi sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial. Penambahan sektor otomotif dilatarbelakangi oleh tingginya *forward* dan *backward linkages* serta merupakan industri andalan nasional. Untuk penambahan sektor perdagangan dan LGA dilatarbelakangi oleh peran kedua sektor tersebut dalam mendukung kelancaran proses distribusi aktivitas hilirisasi. Sedangkan penambahan sektor jasa sosial pada KLM yang mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta aktivitas kegiatan sosial disebabkan karena sektor-sektor tersebut memiliki urgensi dalam meningkatkan kualitas dan inklusi pembangunan. Dengan adanya perluasan cakupan sektor tersebut maka pangsa kredit yang tercakup dalam sektor KLM meningkat menjadi sekitar 70%, dari sebelumnya sekitar 30%.

Terakhir, penguatan KLM juga dilakukan melalui penyesuaian distribusi besaran insentif dalam bentuk penyesuaian *tiering* dan peningkatan besaran insentif sektoral.

Penguatan aspek ini dilakukan agar bank menjadi lebih mudah dalam mendapatkan insentif KLM (*more accesible*). Sebagai ilustrasi, pada skema KLM sebelumnya bank hanya mampu mendapatkan maksimum insentif

0,3% untuk sektor hilirisasi minerba maka pada penguatan KLM ini insentif sektor hilirisasi minerba disatukan dengan nonminerba sehingga maksimum insentif yang diperoleh bank meningkat menjadi 0,8%. Penguatan juga dilakukan pada insentif untuk sektor inklusif. *Tiering* maksimum insentif terkait Rasio Pembiayaan Insentif Makroprudensial (RPIM) juga disesuaikan sehingga bank yang memiliki pencapaian RPIM 30% atau lebih akan mendapatkan insentif maksimum sebesar 1%. *Threshold* tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu minimum RPIM 50% yang akan mendapatkan insentif maksimum sebesar 1%. Selain itu, penguatan KLM juga berupa pemberian tambahan insentif bagi bank dengan pencapaian pertumbuhan kredit sektoral yang tinggi, di atas median perbankan. Besaran tambahan insentif untuk setiap sektor prioritas adalah sebesar 0,2% dengan maksimum besaran insentif untuk setiap individu bank tetap dijaga pada maksimal 4%²⁹.

Melalui penguatan KLM tersebut, perbankan mendapatkan tambahan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan. Kelonggaran likuiditas bank dari penguatan KLM tercatat meningkat dibandingkan dengan insentif KLM sebelumnya,

29 Pemberian tambahan insentif tersebut diprioritaskan berdasarkan besar pangsa kredit masing-masing sektor, yaitu: (i) sektor Hilirisasi; (ii) sektor Otomotif, Perdagangan, LGA, dan Jasa Sosial; (iii) Sektor Perumahan dan (iv) sektor Pariwisata & Ekonomi kreatif.

tercermin dari besaran insentif yang diperoleh perbankan pada Juni 2024 adalah sebesar Rp255,77 triliun atau setara dengan rasio insentif sebesar 3,42% terhadap total DPK. Angka tersebut meningkat hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan insentif KLM sejak pertama kali diimplementasikan pada Oktober 2023, yaitu sebesar Rp137,67 triliun. Mayoritas peningkatan likuiditas tersebut diberikan kepada bank KBMI 3 dan 4 (Grafik B5.1.1). Hal ini sejalan dengan upaya dan kontribusi kelompok bank tersebut dalam mendorong pertumbuhan kredit, terutama pada sektor prioritas. Ke depan, dengan meningkatnya likuiditas, diharapkan perbankan memiliki kapasitas tambahan untuk menopang pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik B5.1.1. Capaian Insentif KLM Berdasarkan KBMI

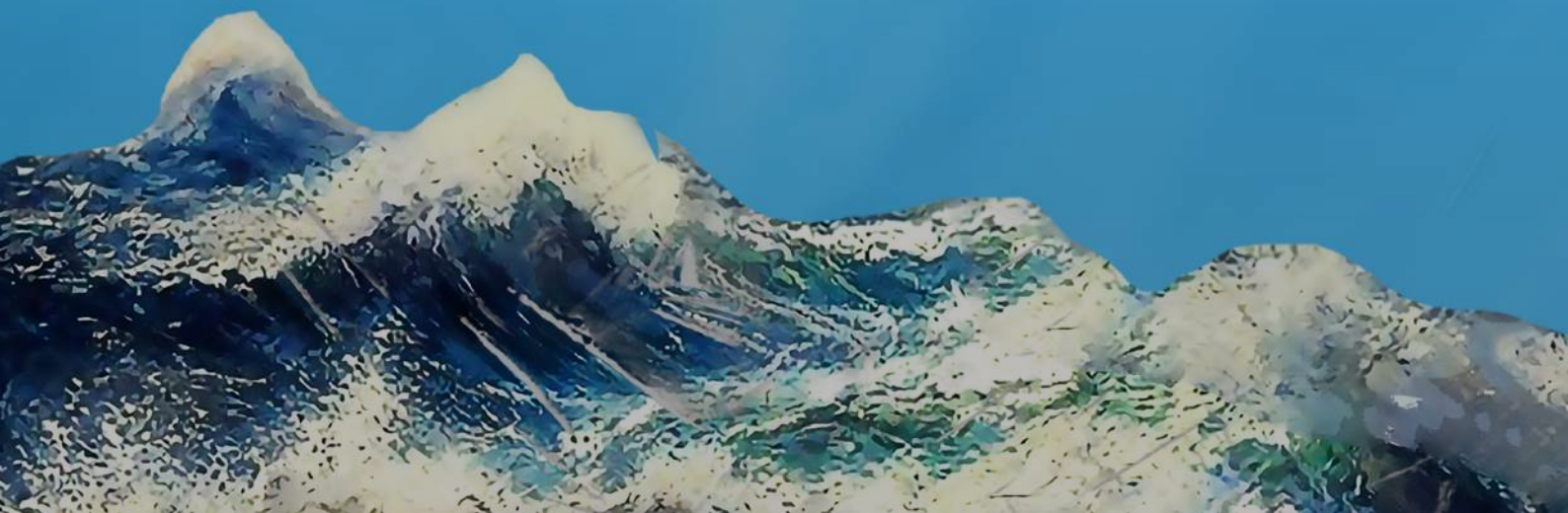


BANK INDONESIA



BAB 6

OUTLOOK INTERMEDIASI DAN ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL



Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda disertai dengan prospek ekonomi yang melambat pada paruh kedua 2024. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2%, tetapi berpotensi melambat khususnya di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pelemahan ekonomi AS menimbulkan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang lebih cepat dan lebih dalam dari prakiraan sehingga menurunkan ketidakpastian di pasar keuangan global dan menopang aliran masuk modal asing ke negara berkembang termasuk Indonesia. Selanjutnya, nilai tukar Rupiah diperkirakan terjaga stabil didukung fundamental ekonomi domestik dan inflasi yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diperkirakan dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik didukung stimulus fiskal dan berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke depan, risiko perlambatan ekonomi AS dan dinamika geopolitik perlu terus dicermati.

Optimisme intermediasi perbankan terjaga didukung ketahanan sistem keuangan yang baik. Pertumbuhan kredit masih akan ditopang oleh permintaan kredit korporasi dan rumah tangga kelas atas sejalan dengan prospek peningkatan aktivitas ekonomi dan likuiditas perbankan yang memadai. Ketahanan perbankan diperkirakan terjaga didukung permodalan yang tinggi dan risiko yang terkelola dengan baik. Hasil stress-test menunjukkan bahwa ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi dampak rambatan gelombang global

dan domestik. Selanjutnya, pembiayaan UMKM, syariah, dan hijau/berkelanjutan diperkirakan tetap tumbuh positif dan turut menopang pertumbuhan kredit agregat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit diperkirakan mencapai kisaran sasaran 10-12% pada akhir 2024 dan meningkat menjadi 11-13% pada 2025.

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dan memberikan ruang bagi pembiayaan, serta penguatan sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit ke depan, Bank Indonesia memperkuat KLM dan menetapkan kebijakan RPLN, serta mempertahankan antara lain RIM, rasio CCyB dan LTV/FTV. Untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan PLM. Selanjutnya, Bank Indonesia terus melakukan pengawasan tidak langsung (surveilans) dan pengawasan langsung (pemeriksaan) secara tematik. Di samping itu, Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan otoritas di sektor keuangan untuk menjaga SSK. Koordinasi dan sinergi kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui sharing informasi dan analisis, serta penyelarasan arah kebijakan dan koordinasi pengawasan guna mendukung pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dengan risiko yang masih tinggi serta prospek ekonomi yang melambat. Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan sebesar 3,2% (yoy) dan berpotensi melambat pada semester II 2024 seiring dengan penurunan permintaan domestik AS. Ekonomi Tiongkok belum kuat akibat lemahnya permintaan domestik dan ekonomi, sementara Eropa diperkirakan terus membaik didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi. Perlambatan ekonomi AS berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya inflasi yang lebih cepat ke arah sasaran inflasi jangka panjang sebesar 2%. Hal tersebut memperkuat ekspektasi penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar daripada prakiraan, sehingga mendorong penurunan *yield US Treasury* tenor 10 tahun dan pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian pasar keuangan global mereda dan mendorong aliran masuk modal asing sehingga akan memperkuat mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Ke depan, risiko terkait kekhawatiran perlambatan ekonomi AS dan dinamika geopolitik perlu terus dicermati. Bank Indonesia akan merumuskan respons kebijakan secara berhati-hati atas dampak rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap kuat disertai dengan inflasi dan nilai tukar Rupiah yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi pada 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-

5,5% (yoy) ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik. Hal tersebut didukung antara lain oleh peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB yang diharapkan dapat memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian, berlanjutnya PSN yang dapat meningkatkan investasi, dan membaiknya kinerja ekspor. Ke depan, konsumsi rumah tangga perlu terus didorong sejalan dengan berakhirnya faktor musiman, seperti hari besar keagamaan dan dampak pelaksanaan Pemilu pada semester I 2024. Dari sisi harga, inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam sasarannya didukung oleh kebijakan pengendalian inflasi melalui TPIP/TPID dan GNPIP yang akan terus diperkuat. Nilai tukar Rupiah diperkirakan cenderung menguat sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya fundamental ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus (i) memperkuat sinergi stimulus fiskal dengan stimulus makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan; (ii) memperkuat kebijakan moneter *pro-stability* dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah guna memastikan inflasi pada 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$; dan (iii) mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk penerbitan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) untuk mendorong aliran modal masuk dan menopang stabilisasi nilai tukar Rupiah lebih lanjut.

6.2

Optimisme Intermediasi Terjaga Didukung Kinerja Korporasi, *Appetite* Perbankan, dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

Prospek intermediasi perbankan tetap kuat didukung oleh ketahanan sistem keuangan dan optimisme pertumbuhan ekonomi. *Outlook* pertumbuhan kredit pada akhir 2024 terjaga dalam sasaran 10-12% dan diperkirakan meningkat pada 2025 pada kisaran 11-13%. Optimisme pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh prospek perekonomian domestik yang tetap kuat, inflasi IHK yang terjaga, serta nilai tukar dan suku bunga yang kondusif. Kondisi tersebut diperkirakan menopang permintaan kebutuhan kredit oleh korporasi, khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja. Prospek kredit rumah tangga terjaga baik terutama didukung oleh permintaan kredit rumah tangga kelas atas, khususnya pada segmen KPR. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja korporasi yang tetap baik dan likuiditas yang memadai didukung antara lain oleh tambahan likuiditas dari KLM. Ketahanan perbankan akan tetap terjaga sejalan dengan risiko yang terkelola dan permodalan yang kuat sehingga fungsi intermediasi menjadi semakin efektif. Hasil *stress test* sepanjang paruh pertama 2024 menunjukkan bahwa ketahanan perbankan tetap kuat dan kinerja korporasi tetap baik dalam menghadapi dampak rambatan gejolak global dan domestik.

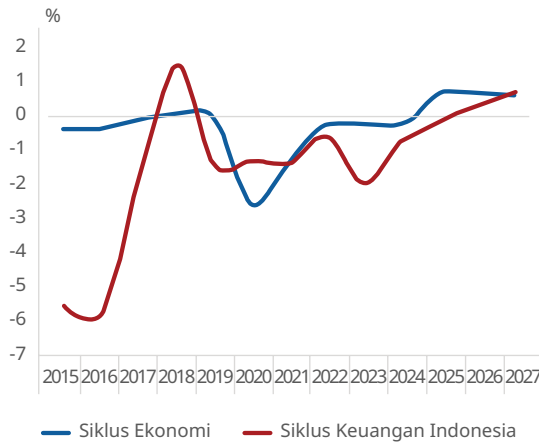
Pembiayaan inklusif dan hijau (berkelanjutan) diperkirakan tetap tumbuh positif. Perlu dicermati kredit UMKM yang berpotensi lebih

rendah akibat kinerja UMKM yang lebih terbatas dan perilaku *selective lending* oleh perbankan untuk menjaga risiko kredit. Namun demikian, optimalisasi penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2024 dan rencana penerbitan kebijakan restrukturisasi KUR oleh Pemerintah diperkirakan mendukung pertumbuhan kredit UMKM lebih baik ke depan. Sementara itu, pembiayaan syariah diperkirakan tetap kuat dan pembiayaan hijau diperkirakan masih prospektif untuk mendukung pertumbuhan kredit agregat. Bauran kebijakan energi nasional yang menginisiasi peralihan ke energi terbarukan dan meningkatnya kesadaran masyarakat mendukung *appetite* penyaluran kredit hijau oleh perbankan serta menopang pertumbuhan kredit agregat lebih lanjut.

Tantangan intermediasi ke depan khususnya yang bersumber dari domestik masih perlu diwaspadai. Sustainability kecukupan likuiditas perbankan untuk mendukung intermediasi perlu terus dijaga, termasuk melalui optimalisasi sumber pendanaan non-DPK. Penyaluran kredit secara lebih merata perlu terus didorong untuk mengurangi risiko segmentasi kredit. Selanjutnya, upaya peningkatan daya beli rumah tangga khususnya kelas menengah bawah diperlukan untuk turut menopang pertumbuhan kredit rumah tangga secara agregat.

Bank Indonesia terus menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan memperluas ruang pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. *Stance* kebijakan tersebut didasarkan pada siklus ekonomi dan siklus keuangan yang diperkirakan meningkat, tetapi masih berada di bawah kapasitas potensialnya, mengindikasikan masih adanya ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit. Bank Indonesia memprakirakan siklus ekonomi akan memasuki periode puncak (*boom*) pada 2025-2026, sementara puncak siklus keuangan pada 2027 (Grafik 6.3.1). Kebijakan makroprudensial longgar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pada sektor-sektor prioritas ataupun yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan.

Bauran kebijakan makroprudensial akomodatif ditempuh melalui pengelolaan berbagai instrumen sesuai dengan sasaran kredit/pembiayaan yang optimal, ketahanan sektor keuangan, serta keuangan inklusif dan hijau. Penguatan KLM diperkirakan dapat menambah likuiditas hingga akhir 2024 untuk terus mendukung penyaluran kredit. Selanjutnya, implementasi kebijakan RPLN diharapkan dapat memberikan fleksibilitas opsi sumber pembiayaan oleh bank. Selain itu, Bank Indonesia akan tetap



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3.1. Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia

mempertahankan kebijakan RIM pada kisaran 84-94%, rasio CCyB sebesar 0%, dan LTV/FTV. Guna menjaga ketahanan sektor keuangan, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan PLM sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%. Sebagai upaya mendorong keuangan inklusif dan hijau, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan RPIM dan LTV/FTV hijau, termasuk KLM untuk inklusi dan hijau hingga Desember 2024. Secara reguler, Bank Indonesia akan melanjutkan publikasi asesmen transparansi suku bunga dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas cakupan KLM dalam rangka mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial.

Sebagai bagian dari bauran kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia juga melanjutkan surveilans dan pemeriksaan secara tematik. Surveilans dilakukan antara lain

untuk memantau dan mengidentifikasi eksposur risiko sistemik dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan makroprudensial. Surveilans saat ini dilakukan melalui pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) untuk menganalisis area makroprudensial secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Ke depan, pengawasan terintegrasi akan diperkuat dan memerhatikan keterkaitan antarpelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, serta akan mencakup obyek pengaturan kebijakan utama. Selanjutnya, pemeriksaan tematik dilakukan terhadap beberapa bank berdasarkan fokus dan strategi pengawasan yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia akan melanjutkan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan otoritas sektor keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Berbagai sinergi dan koordinasi akan terus dilakukan dalam rangka penyelarasan arah kebijakan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan peningkatan efektivitas kebijakan. Selain itu, koordinasi dan sinergi juga akan dilakukan dalam konteks surveilans untuk menjaga ketahanan sistem keuangan. Koordinasi dan sinergi dilakukan antara lain melalui forum KSSK maupun kerja sama bilateral antar otoritas anggota KSSK.

Boks 6.1

Implementasi Kebijakan Makroprudensial Kontrasiklikal RPLN Memperkuat Pengelolaan Sumber Pembiayaan Perbankan

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kebutuhan pembiayaan perekonomian meningkat di tengah sumber pendanaan bank yang terbatas. Terbatasnya sumber pendanaan bank terindikasi dari pertumbuhan DPK yang rendah dan fiskal Pemerintah yang konsolidatif, serta potensi *outflows* di tengah ketidakpastian global sehingga meningkatkan risiko *funding gap*. Untuk itu, bank perlu mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, misalnya melalui sumber pendanaan luar negeri. Namun demikian, pendanaan luar negeri bank perlu dilakukan secara berhati-hati mengingat dinamika aliran modal asing dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi dan keuangan (*macro-financial linkages*). Hal ini diperkuat oleh sejumlah studi yang menegaskan hubungan prosiklikalitas aliran modal asing terhadap siklus bisnis dan keuangan.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pendanaan luar negeri bank dan memastikan pengelolaannya tetap memerhatikan aspek manajemen risiko.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) untuk memperkuat pengelolaan pendanaan luar negeri bank dalam mendukung kredit sesuai dengan kebutuhan perekonomian, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan RPLN yang diumumkan pada Juni 2024 dan efektif berlaku pada 1 Agustus 2024, mengatur batas maksimum kewajiban jangka pendek terhadap modal bank yang dapat disesuaikan dengan besaran Parameter Kontrasiklikal (PK). Kebijakan RPLN

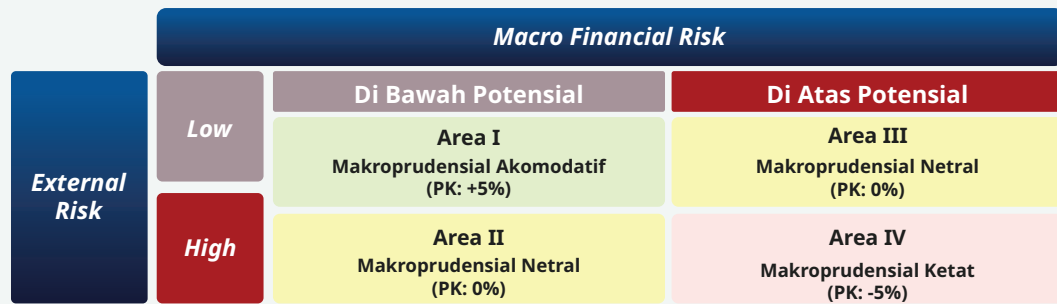
ditetapkan, sebesar 30%, dengan PK sebagai faktor penambah atau faktor pengurang batasan RPLN, yaitu sebesar -5%, 0%, atau 5%. Penetapan PK dilakukan berdasarkan asesmen *forward looking* atas indikator siklus keuangan, risiko eksternal, dan risiko SSK.³¹ Indikator tersebut meliputi Siklus Keuangan Indonesia (SKI) termasuk pertumbuhan kredit, siklus pendanaan luar negeri berdasarkan rasio kewajiban jangka pendek terhadap modal bank, indikator risiko eksternal, serta indikator risiko SSK, terutama nilai tukar dan perbankan (Gambar B6.1.1). Pada 1 Agustus 2024, PK ditetapkan sebesar 0% sehingga batasan maksimum RPLN menjadi sebesar 30%

Kebijakan RPLN memiliki 2 (dua) fitur utama, yaitu kontrasiklikal dan *risk-based approach*, serta diterapkan dengan memerhatikan aspek kehati-hatian perbankan. Fitur kontrasiklikal, yaitu *threshold* bersifat dinamis, mempertimbangkan perkembangan siklus keuangan dan siklus utang luar negeri. Batasan RPLN dapat ditingkatkan (dilonggarkan) saat perbankan membutuhkan tambahan pendanaan luar negeri dan dapat diturunkan (diperketat) saat kebutuhan pendanaan luar negeri memadai. Fitur *risk-based approach*, yaitu memperhitungkan risiko eksternal dan risiko SSK domestik, termasuk risiko perbankan. Implementasi RPLN juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian bank dengan survailans berkala, meliputi kapasitas permodalan, yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai profil risiko, risiko pasar, yaitu rasio Posisi Devisa Neto sesuai ketentuan ($\leq 20\%$), serta risiko kredit, yaitu rasio kredit bermasalah atau NPL bruto $< 5\%$.

30 Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M., & Vegh, C.A. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. *NBER Working Paper No. 10780*.

Juhro, S.M., Iyke, B.N., and Narayan, P.K. (2021). Capital flow dynamics and the synchronization of financial cycles and business cycles in emerging market economies. *Bank Indonesia Working Paper No. WP/02/2021*.

31 Kebijakan RPLN menyempurnakan ketentuan PBI 21/1/2019 tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing.



Sumber: Juhro, Robinson, dan Rahadyan (2024)

Gambar B6.1.1. Asesmen Parameter Kontrasiklikal RPLN

Kebijakan RPLN juga memperkuat definisi dan cakupan pendanaan luar negeri bank yang berimplikasi pada penambahan komponen yang tidak masuk dalam perhitungan kewajiban jangka pendek untuk RPLN. Komponen tersebut meliputi (i) giro, tabungan, dan deposito milik bukan Penduduk yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan digunakan untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada bukan Penduduk; (ii) kewajiban yang muncul kepada bukan Penduduk yang timbul akibat transaksi repo instrumen valuta asing yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; (iii) ULN bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa instrumen valuta asing (*back-to-back*) yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; dan/atau (iv) bentuk pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia. Instrumen yang dapat digunakan untuk saat ini adalah Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Evaluasi kebijakan RPLN dilakukan setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dan diumumkan kepada publik. Perubahan PK akan dilakukan melalui penyesuaian ketentuan. Peningkatan PK kepada bank akan diterapkan segera sejak ditetapkan, sementara penurunan PK akan diberikan waktu transisi hingga 6 (enam) bulan untuk memberikan ruang penyesuaian. Dengan penerapan RPLN tersebut, fleksibilitas bank dalam memperoleh pendanaan akan meningkat dengan tetap memerhatikan aspek manajemen risiko, yang pada gilirannya akan memperkuat pembiayaan ekonomi secara berkelanjutan.

LAMPIRAN



Kumpulan Grafik dan Tabel

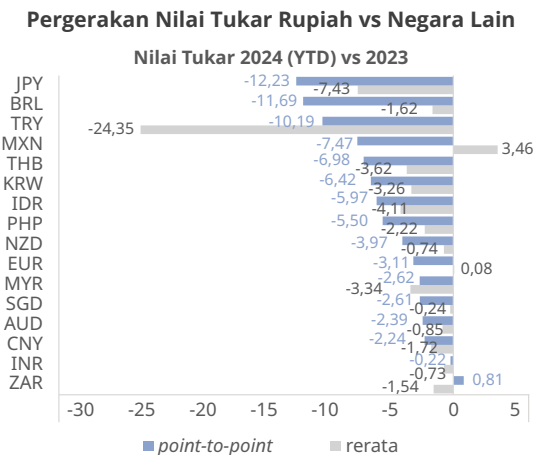
Pertumbuhan ekonomi global tetap kuat meski terjadi divergensi

Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,2	3,2
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,5	2,5	1,9
Kawasan Eropa	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,5	0,9	1,4
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,9	0,3	1,1
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,2	4,1
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,9	4,4
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	7,7	7,0	6,7
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,1	4,8	4,8
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,3	2,1	2,3
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	3,2	2,7	2,5
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,6	4,3	5,4	2,0	3,1	3,6

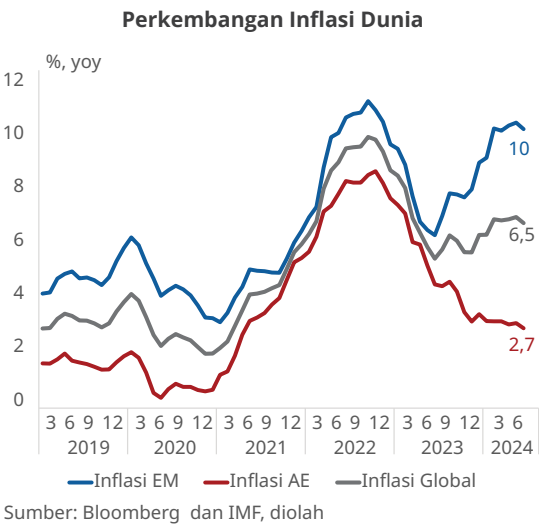
*Proyeksi Bank Indonesia
Sumber: IMF dan WEO, diolah

Nilai tukar Rupiah lebih baik dibandingkan dengan negara kawasan

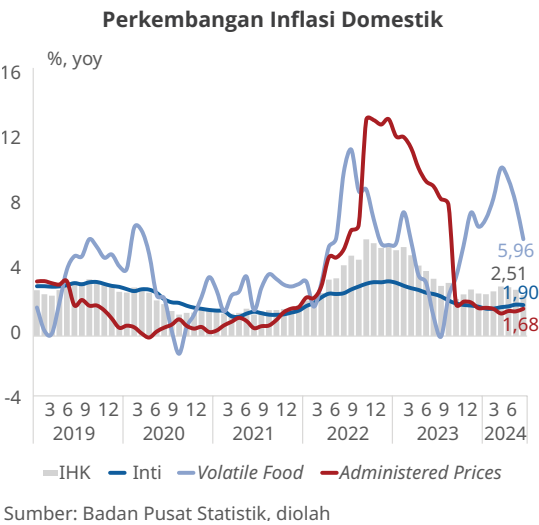


Keterangan: Data sd 28 Juni 2024
Sumber: Reuters dan Bloomberg, diolah

Penurunan inflasi di negara maju terus berlanjut



Inflasi semester I 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%



Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh permintaan domestik dan ekspor

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan

% , yoy

Group	2022				2022	2023				2023	2024	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,35	5,52	5,40	4,50	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91	4,93
Konsumsi Pemerintah	-6,60	-4,61	-2,50	-4,72	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90	1,42
Investasi (PMTDB)	4,08	3,09	4,98	3,33	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79	4,43
Ekspor	14,40	16,32	19,09	14,95	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	1,37	8,28
Impor	16,06	13,06	25,73	6,49	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,94	8,57
PDB	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11	5,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

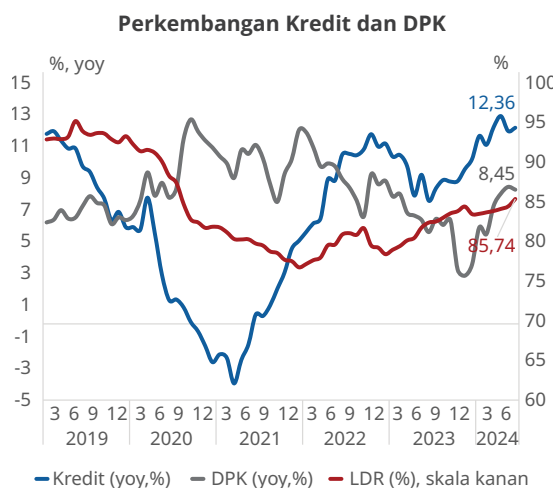
Dari sisi lapangan usaha (LU), seluruh LU pada triwulan II 2024 menunjukkan kinerja positif

Pertumbuhan Ekonomi Berdasar Lapangan Usaha (% , yoy)

Komponen	2022				2022	2023				2023	2024	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,16	1,68	1,95	4,51	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,30	-3,54	3,25
Pertambangan dan Penggalian	3,82	4,01	3,22	6,46	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31	3,17
Industri Pengolahan	5,07	4,01	4,83	5,64	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13	3,95
Pengadaan Listrik dan Gas	7,04	9,33	8,05	2,31	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35	5,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,35	4,46	4,26	2,84	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44	0,84
Konstruksi	4,83	1,02	0,63	1,61	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59	7,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	4,43	5,37	6,56	5,53	4,94	5,29	5,10	4,09	4,85	4,59	4,86
Transportasi dan Pergudangan	15,79	21,27	25,80	16,99	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,66	9,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,57	9,79	17,79	13,77	11,94	11,54	9,91	10,94	7,89	10,01	9,39	10,17
Informasi dan Komunikasi	7,15	8,06	6,94	8,72	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,41	7,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,50	0,87	3,76	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,91	7,90
Real Estat	3,78	2,16	0,63	0,39	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54	2,16
Jasa Perusahaan	5,96	7,92	10,79	10,42	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63	7,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,29	-1,53	12,47	1,77	2,51	2,10	8,16	-6,24	1,61	1,50	18,88	2,79
Jasa Pendidikan	-1,41	-1,07	4,45	0,40	0,57	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78	7,34	2,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,52	6,51	-1,70	2,48	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66	11,64	8,56
Jasa lainnya	8,25	9,26	9,13	11,14	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92	8,85
PDB	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11	5,05

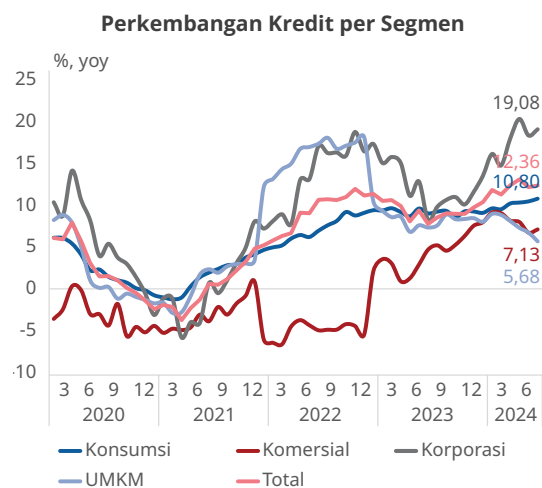
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kredit tumbuh tinggi, didukung penguatan DPK



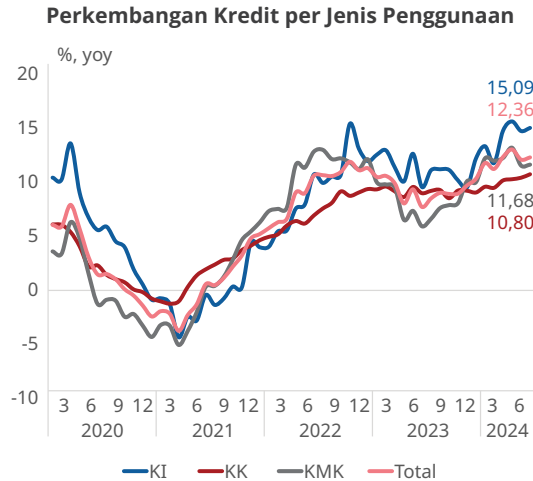
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pertumbuhan kredit terutama didorong oleh segmen korporasi

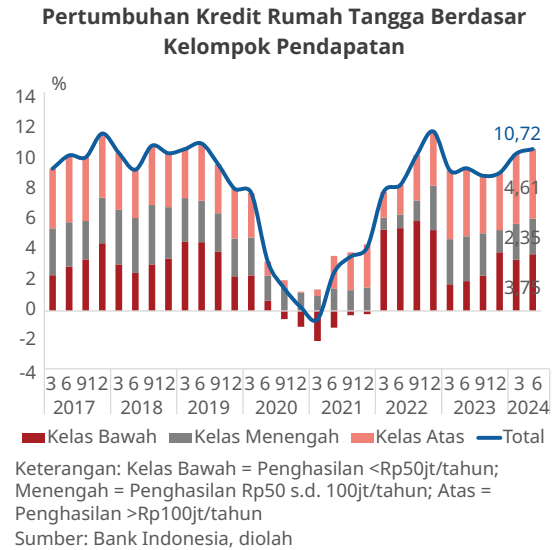


Sumber: Bank Indonesia, diolah

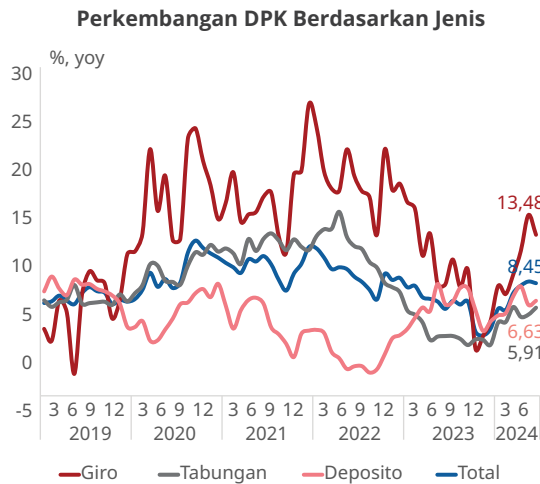
Dari segi penggunaan, peningkatan kredit terutama didorong oleh kredit produktif seperti kredit investasi (KI) dan kredit modal kerja (KMK)



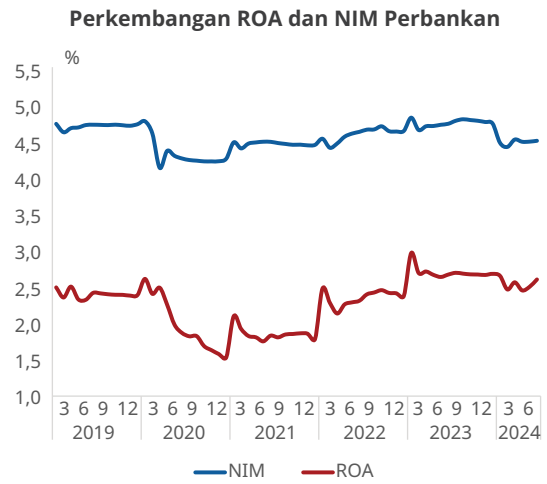
Kelompok kelas atas merupakan kontributor utama kredit konsumsi rumah tangga



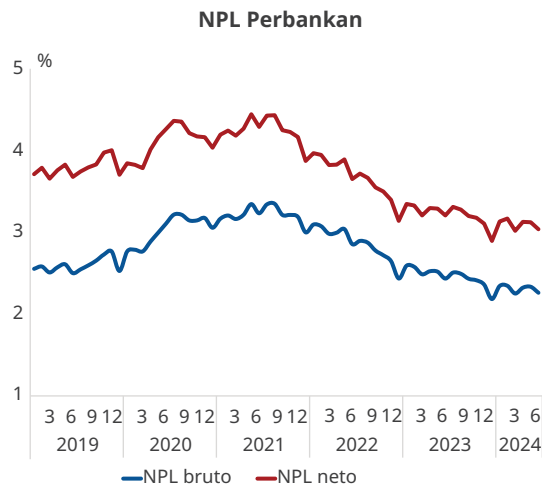
Penyaluran kredit didukung Dana Pihak Ketiga sebagai sumber pendanaan utama



Profitabilitas perbankan terjaga

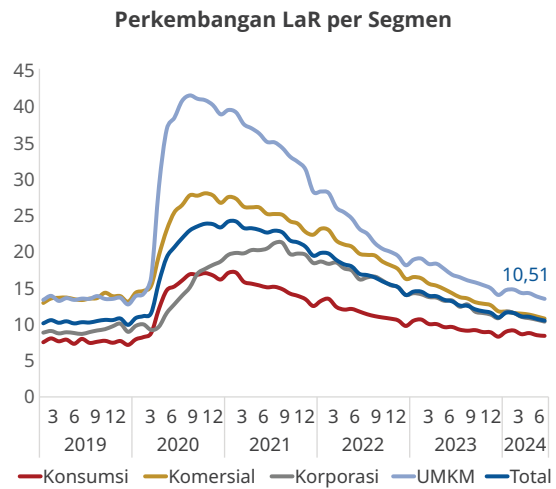


Peningkatan fungsi intermediasi perbankan seiring risiko kredit bermasalah yang rendah



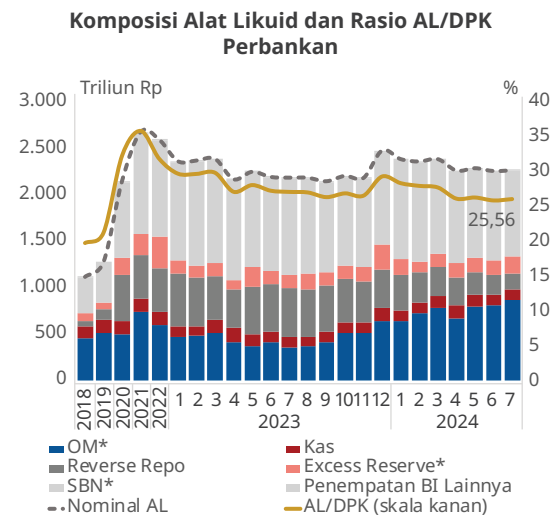
Sumber: Bank Indonesia dan OJK, diolah

Risiko kredit yang terjaga juga tecermin dari tren menurun LaR



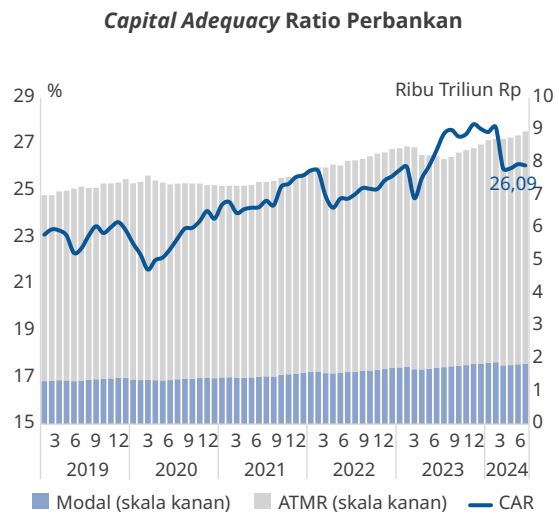
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ketahanan perbankan tecermin dari likuiditas yang memadai



Keterangan: 1) SBN yang dihitung telah dikurangi dengan kewajiban PLM; 2) OM = SBI, SUKBI, SRBI, SBBI, SVBI, SUVBI, SDBI, FASBI, TD; 3) Giro telah dikurangi kewajiban GWM dan PLM
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ketahanan perbankan yang kuat ditopang oleh tingginya rasio kecukupan modal



Sumber: Bank Indonesia, diolah



BANK INDONESIA

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

No. 43, SEPTEMBER 2024

PENGARAH

Juda Agung – Solikin M. Juhro – Irman Robinson – Bambang Arianito – Evie Sylviani – Nugroho Joko Prastowo

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Mestika Widantri – Gilang Andrianty – Arief Adrianto Rasyid – Elis Deriantino – Yenny Imelda Magdalena – Wienda Afrianty

PENULIS

Ina Nurmalia Kurniati, Ida Ari Kusumawaty, Risa Fadila, Yon Widiyono, Wicaksono Aryo Pradipto, Rani Wijayanti, Kartika Caroline, Dhanita Fauziah Ulfa, Anita, Vidi Adyatma Nugraha, Ardhitama Shaumarli, Ajeng Khrisnasari, Prayoga Dharma, Dwi Oktaviyanti, Azka Azifah D., Charvin Lim, Irman Ramdani, Kevin Joshua Sinaga, Suhardina Dwi Putrisari, Syekhan Adesia Ramadhan, Dewa Ayu Widia Lestari, M. Iqbal Pratama, Grace Priscilla Siahaan, Luthfiana Rahma, Muhammad Farhan Perdana, Nia Nirmala Sari Ambarita, Octavia Manullang, Rahutomo Anugrah Dewanto, Ikhsan Utama, Fyona Dhillasari Putri I., Mahdiah Aulia, Herninta Lagoon Fatika

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter dan Market (DSMM)
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK)
Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)
Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital (DPID)

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada September 2024, didasarkan pada data dan informasi per Juni 2024, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEBSITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Email: DKMP-K2MK@bi.go.id

